



Intress
INDONESIAN TREASURY



LAPORAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Audited

20
25

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
KANTOR PUSAT



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Keuangan yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat, dan akuntabel.

Informasi yang dihasilkan tersebut diharapkan dapat berguna kepada para pengguna laporan dalam pengambilan keputusan. Salah satunya adalah untuk menilai akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, Mei 2026
Direktur Jenderal,



Ditandatangani secara elektronik
Astera Primanto Bhakti

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR GRAFIK	iv
DAFTAR TABEL	v
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	ix
RINGKASAN	1
I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	3
II. NERACA	4
III. LAPORAN OPERASIONAL	6
IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	8
V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	9
A. Penjelasan Umum	9
B. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	24
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	50
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	80
E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	99
F. Pengungkapan Penting Lainnya	102
VI. LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN UAPPA-E1	
A. Laporan Realisasi Anggaran status Final	
B. Neraca status Final	
C. Laporan Operasional status Final	
D. Laporan Perubahan Ekuitas status Final	
E. Kertas Kerja Telaah Laporan Keuangan	
F. Daftar Saldo Rekening Pemerintah	
G. BA Rekonsiliasi Penerimaan Perpajakan	
H. BA Rekonsiliasi TGR	
I. BA Rekonsiliasi Hibah	
J. Laporan Kualitas Piutang dan Penyisihan Piutang	
K. Matriks Tindak Lanjut Temuan BPK terbaru	
L. Memo Penyesuaian	
M. Laporan Barang Milik Negara	
N. Laporan Kinerja	
O. Dokumen Lainnya Pendukung LK	

DAFTAR GAMBAR

Gambar A. 1	Bagan Organisasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan	11
Gambar A. 2	Entitas Akuntansi Direktorat Jenderal Perbendaharaan	14
Gambar A. 3	Peta Strategi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2025	14

DAFTAR GRAFIK

Grafik B. 1	Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja Tahun 2025 (Rupiah)	35
Grafik B. 2	Komposisi Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja Tahun 2025 (persen)	35
Grafik F. 1	Alokasi Belanja Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2025 (Miliar Rupiah)	102
Grafik F. 2	Alokasi dan Blokir Anggaran Satuan Kerja BLU Tahun 2025	102
Grafik F. 3	Alokasi dan Blokir Satuan Kerja Non BLU Tahun 2025	103

DAFTAR TABEL

Tabel A. 1	Nilai Kinerja Organisasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2025	15
Tabel A. 3	Perhitungan Penyisihan Piutang	19
Tabel A. 4	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	21
Tabel B. 1	Pagu Berdasarkan Sumber Pendapatan dan Jenis Belanja Tahun 2025 (Rupiah)	24
Tabel B. 2	Estimasi Pendapatan Tahun 2025 (Rupiah)	24
Tabel B. 3	Pagu Belanja Menurut Jenis Belanja Tahun 2025 (Rupiah)	25
Tabel B. 4	Pagu Belanja Berdasarkan Kegiatan Tahun 2025 (Rupiah)	25
Tabel B. 5	Realisasi Pendapatan Menurut Akun Tahun 2025 (Rupiah)	26
Tabel B. 6	Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 (Rupiah)	27
Tabel B. 7	Realisasi PNBP Lainnya Tahun 2025 dan 2024 (Rupiah)	27
Tabel B. 8	Realisasi Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu (425913) Tahun 2025 (Rupiah)	29
Tabel B. 9	Realisasi PNBP Lainnya per Kantor Wilayah Tahun 2025 (Rupiah)	29
Tabel B. 10	Realisasi Pendapatan Badan Layanan Umum (Rupiah)	31
Tabel B. 11	Realisasi Pendapatan Per Akun per 31 Desember 2025 (Rupiah)	32
Tabel B. 12	Realisasi Belanja Menurut Program dan Kegiatan Tahun 2025 (Rupiah)	34
Tabel B. 13	Realisasi Belanja Menurut Fungsi Tahun 2025 (Rupiah)	34
Tabel B. 14	Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja Tahun 2025 (Rupiah)	35
Tabel B. 15	Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja Tahun 2025 dan 2024 (Rupiah)	36
Tabel B. 16	Realisasi Belanja Pegawai Menurut Akun Tahun 2025 (Rupiah)	36
Tabel B. 17	Realisasi Belanja Pegawai Menurut Akun Tahun 2025 - 2024 (Rupiah)	37
Tabel B. 18	Realisasi Belanja Pegawai Menurut Kantor Wilayah Tahun 2025 (Rupiah)	37
Tabel B. 19	Realisasi Belanja Barang Menurut Akun Tahun 2025 (Rupiah)	39
Tabel B. 20	Realisasi Belanja Barang Menurut Akun Tahun 2025 - 2024 (Rupiah)	39
Tabel B. 21	Realisasi Belanja Barang Per Kanwil Tahun 2025 - 2024 (Rupiah)	40
Tabel B. 22	Realisasi Belanja Barang-BLU Tahun 2025 - 2024 (Rupiah)	42
Tabel B. 23	Realisasi Belanja Barang-BLU Menurut Satuan Kerja BLU Tahun 2025 (Rupiah)	42
Tabel B. 24	Realisasi Belanja Modal Tahun 2025 (Rupiah)	42
Tabel B. 25	Realisasi Belanja Modal Menurut Akun Tahun 2025 - 2024 (Rupiah)	43
Tabel B. 26	Realisasi Belanja Modal Menurut Akun Tahun 2025 (Rupiah)	43
Tabel B. 27	Realisasi Belanja Modal dan Bangunan Tahun 2025 - 2024 (Rupiah)	45
Tabel B. 28	Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025 - 2024 (Rupiah)	45
Tabel B. 27	Realisasi Belanja Modal dan Bangunan Tahun 2025 - 2024 (Rupiah)	46
Tabel B. 28	Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025 - 2024 (Rupiah)	47
Tabel B. 29	Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahun 2025 - 2024 (Rupiah)	48
Tabel B. 30	Realisasi Belanja Modal Lainnya Menurut Kantor Wilayah Tahun 2025 - 2024 (Rupiah)	48
Tabel B. 31	Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin-BLU Tahun 2025 - 2024 (Rupiah)	48
Tabel B. 32	Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin-BLU menurut Satuan Kerja Tahun 2025-2024 (Rupiah)	49
Tabel B. 33	Realisasi Belanja Modal Lainnya-BLU Tahun 2025-2024 (Rupiah)	49
Tabel B. 34	Realisasi Belanja Modal Lainnya-BLU menurut Satuan Kerja Tahun 2025-2024 (Rupiah)	49

Tabel C. 1	Rekapitulasi rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025-2024 (Rupiah)	50
Tabel C. 2	Rincian Saldo Kas Lainnya dan Setaran Kas Menurut Kantor Wilayah Tahun 2025-2024 (Rupiah)	50
Tabel C. 3	Rincian Kas pada Badan Layanan Umum per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	51
Tabel C. 4	Rincian Kas setiap Badan Layanan Umum per 31 Desember 2025	51
Tabel C. 5	Rincian Saldo Awal Kas Badan Layanan Umum	51
Tabel C. 6	Rincian Investasi Jangka Pendek-BLU per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 (Rupiah)	53
Tabel C. 7	Saldo Realisasi Belanja Dibayar Dimuka Menurut Kantor Wilayah Tahun 2025 (Rupiah)	53
Tabel C. 8	Rekapitulasi Saldo Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 (Rupiah)	54
Tabel C. 9	Rekapitulasi Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 (Rupiah)	55
Tabel C. 10	Rincian Saldo Piutang PNPB per Wilayah per 31 Desember 2025 (Rupiah)	55
Tabel C. 11	Saldo Piutang Bulan Pajak per 31 Desember 2025 menurut Kantor Wilayah (Rupiah)	55
Tabel C. 12	Rekapitulasi Kualitas Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 (Rupiah)	56
Tabel C. 13	Rekapitulasi Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 (Rupiah)	56
Tabel C. 14	Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 (Rupiah)	56
Tabel C. 15	Rekapitulasi Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih per Wilayah 31 Desember 2025 (Rupiah)	57
Tabel C. 16	Rekapitulasi Saldo Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum per 30 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 (Rupiah)	57
Tabel C. 17	Rekapitulasi Saldo Piutang Bukan Pajak per 30 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 (Rupiah)	57
Tabel C. 18	Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 (Rupiah)	58
Tabel C. 19	rincian saldo barang konsumsi per kantor wilayah per 30 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 (Rupiah)	58
Tabel C. 20	Rincian saldo barang untuk pemeliharaan per kantor wilayah per 30 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 (Rupiah)	59
Tabel C. 21	Rincian Saldo Dana Bergulir per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 (Rupiah)	60
Tabel C. 22	Rincian Investasi Non Permanen Lainnya pada Satker Pusat Investasi Pemerintah Per 31 Desember 2025 (Rupiah)	60
Tabel C. 23	Rincian Saldo Dana Bergulir Diragukan Tertagih Tahun 2025 (Rupiah)	62
Tabel C. 24	Rincian Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih PIP per 31 Desember 2025 (Rupiah)	62
Tabel C. 25	Rincian Saldo Tanah per 31 Desember 2025 (Rupiah)	63
Tabel C. 26	Rincian Tanah per Wilayah (Rupiah)	63
Tabel C. 27	Rincian Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025	64
Tabel C. 28	Rincian Peralatan dan Mesin per Wilayah (Rupiah)	64
Tabel C. 29	Rincian Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 (Rupiah)	65
Tabel C. 30	Rincian Gedung dan Bangunan per Wilayah (Rupiah)	66
Tabel C. 31	Rincian Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 (Rupiah)	67

Tabel C. 32	Rincian Jalan dan Jembatan per Wilayah (Rupiah)	67
Tabel C. 33	Rincian Irigasi per Wilayah (Rupiah)	67
Tabel C. 34	Rincian Jaringan per Wilayah	67
Tabel C. 35	Rincian Saldo Aset Tetap Renovasi a per 31 Desember 2025 (Rupiah)	68
Tabel C. 36	Rincian Saldo Aset Tetap Renovasi per Wilayah (Rupiah)	68
Tabel C. 37	Rincian Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 (Rupiah)	68
Tabel C. 38	Rincian Saldo Aset Tetap Lainnya per Wilayah (Rupiah)	68
Tabel C. 39	Rincian Saldo Kontruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 (Rupiah)	69
Tabel C. 40	Rincian Saldo Konstruksi Dalam Pekerjaan per Wilayah (Rupiah)	69
Tabel C. 41	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 (Rupiah)	70
Tabel C. 42	Rincian Saldo Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per Wilayah (Rupiah)	70
Tabel C. 43	Rincian Saldo Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per Wilayah (Rupiah)	71
Tabel C. 44	Rincian Saldo Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan per Wilayah (Rupiah)	71
Tabel C. 45	Rincian Saldo Akumulasi Penyusutan Irigasi per Wilayah (Rupiah)	72
Tabel C. 46	Rincian Saldo Akumulasi Penyusutan Jaringan per Wilayah (Rupiah)	72
Tabel C. 47	Rincian Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya per Wilayah (Rupiah)	72
Tabel C. 48	Rincian Saldo Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 (Rupiah)	73
Tabel C. 49	Rincian per debitor disajikan dalam lampiran Laporan Keuangan sedangkan Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2025 (Rupiah)	73
Tabel C. 50	Rincian Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Taguhan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per Wilayah (Rupiah)	73
Tabel C. 51	Rincian Saldo Aset Berwujud Per 31 Desember 2025 (Rupiah)	73
Tabel C. 52	Uraian Jenis Aset Berwujud Per 31 Desember 2025 (Rupiah)	74
Tabel C. 53	Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per Wilayah (Rupiah)	74
Tabel C. 54	Rincian Saldo Dana yang Dibatasi Pengunaanya per 31 Desember 2025 (Rupiah)	75
Tabel C. 55	Saldo RPATA per 31 Desember 2025 menurut satuan kerja (Rupiah)	75
Tabel C. 56	Rekapitulasi Dana Kelolaan BLU per 31 Desember 2025 (Rupiah)	76
Tabel C. 57	Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 (Rupiah)	76
Tabel C. 58	Rincian Saldo Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan per Wilayah (Rupiah)	76
Tabel C. 59	Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 (Rupiah)	77
Tabel C. 60	Rincian Saldo Utang kepada Pihak Ketiga Tahun 2025-2024 (Rupiah)	77
Tabel C. 61	Rincian Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per Wilayah (Rupiah)	78
Tabel C. 62	Rincian Saldo Pendapatan Diterima di Muka per Wilayah (Rupiah)	78
Tabel C. 63	Rincian Saldo Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor per Wilayah (Rupiah)	79
Tabel C. 64	Rincian Utang Jangka Panjang BLU Kepada BUN Per 31 Desember 2025 (Rupiah)	79
Tabel D. 1	Saldo Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya (Rupiah)	81
Tabel D. 2	Saldo Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak BLU (Rupiah)	82
Tabel D. 3	Saldo Beban Pegawai Tahun 2025-2024 (Rupiah)	84
Tabel D. 4	Saldo Beban Persediaan Tahun 2025-2024 (Rupiah)	86
Tabel D. 5	Saldo Beban Barang dan Jasa Tahun 2025-2024 (Rupiah)	86
Tabel D. 6	Saldo Beban Pemeliharaan Tahun 2025-2024 (Rupiah)	88

Tabel D. 7	Saldo Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025-2024 (Rupiah)	90
Tabel D. 8	Saldo Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda Tahun 2025-2024 (Rupiah)	91
Tabel D. 9	Saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 (Rupiah)	92
Tabel D. 11	Rincian Saldo Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2025-2024 (Rupiah)	93
Tabel D. 12	Rincian Saldo Kegiatan Non Operasional Tahun 2025-2024 (Rupiah)	94
Tabel D. 13	Rincian Saldo Pendapatan Pelepasan Aset Tahun 2025-2024 (Rupiah)	95
Tabel D. 14	Rincian Saldo Beban Pelepasan Aset Tahun 2025-2024 (Rupiah)	96
Tabel D. 15	Rincian Saldo Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025-2024 (Rupiah)	96
Tabel D. 16	Rincian Saldo Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025-2024 (Rupiah)	97
Tabel E. 1	Rincian Transaksi Antar Entitas Tahun 2025 dan Tahun 2024 (Rupiah)	100
Tabel F. 1	Capaian Kinerja Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko (CD) Tahun 2025	104
Tabel F. 2	Capaian Kinerja Program Dukungan Manajemen Tahun 2025 (Rupiah)	106
Tabel F. 3	Capaian Kinerja Program Nasional (PN.3) Tahun 2025 (Rupiah)	109
Tabel F. 4	Capaian Kinerja Program Nasional (PN.3) Tahun 2025 (Rupiah)	110
Tabel F. 5	Capaian Kinerja Program Prioritas Utama Tahun 2025 (Rupiah)	110
Tabel F. 6	Rincian Saldo RPATA Tahun 2025 (Rupiah)	110
Tabel F. 7	Daftar BMN Bersengketa Direktorat Jenderal Perbendaharaan	111
Tabel F. 8	Rincian Aset Tetap Perolehan Saldo Awal Satuan Kerja BPD LH Tahun 2025	113
Tabel F. 9	Selisih Saldo Akun Pendapatan pada Neraca Akrual dan Neraca Kas Tahun 2025 (Rupiah)	114
Tabel F. 10	Selisih Saldo Akun Belanja pada Neraca Akrual dan Neraca Kas Tahun 2025 (Rupiah)	116
Tabel F. 11	Rincian Saldo dan Jumlah Rekening 31 Desember 2025 per Wilayah (Rupiah)	122
Tabel F. 12	Rincian Saldo Rekening Menurut Jenis per Wilayah (Rupiah)	123
Tabel F. 13	Rekapitulasi Daftar Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK Tahun 2024	123
Tabel F. 14	Ikhitsar Badan Layanan Umum	125



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI II, JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO 2-4 JAKARTA 10710
TELEPON 344-9230 (20 SALURAN) PSW 5200 3812436 FAKSIMILE 3846402, SITUS www.djpb.kemenkeu.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Penggabungan Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan tingkat Eselon I selaku UAPPA-E1 yang terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran, (b) Neraca, (c) Laporan Operasional, (d) Laporan Perubahan Ekuitas, dan (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 *Audited* sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami, sedangkan substansi Laporan Keuangan dari masing-masing Satuan Kerja merupakan tanggungjawab UAKPA.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, Mei 2026
Direktur Jenderal,



Ditandatangani secara elektronik
Astera Primanto Bhakti

RINGKASAN EKSEKUTIF



LAPORAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL
PERBENDAHARAAN TA 2025 AUDITED

RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun Anggaran 2025 *Audited* ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode sampai dengan 31 Desember 2025.

Realisasi Pendapatan Negara per 31 Desember 2025 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar **Rp35.674.747.097.520,-** atau mencapai **137,04** persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar **Rp26.032.135.072.000,-**.

Realisasi Belanja Negara per 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp51.949.822.849.115,-** atau mencapai **89,40** persen dari alokasi anggaran sebesar **Rp58.107.597.813.000,-**.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2025.

Nilai Aset per 31 Desember 2025 dicatat dan disajikan sebesar **Rp60.428.182.618.395,-** yang terdiri atas: Aset Lancar sebesar **Rp24.976.822.759.494,-** Investasi Jangka Panjang (*netto*) sebesar **Rp9.112.802.846.422,-** Aset Tetap (*netto*) sebesar **Rp11.406.087.801.144,-** dan Aset Lainnya (*netto*) sebesar **Rp14.932.469.211.335,-**.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar **Rp27.747.192.523.498,-** dan **Rp32.680.990.094.897,-**.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, Surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa dan surplus/defisit-LO yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp35.930.369.040.395,-** sedangkan jumlah beban adalah sebesar **Rp49.807.342.327.508,-** sehingga terdapat defisit dari Kegiatan Operasional senilai **Rp13.876.973.287.113,-**. Jumlah defisit Kegiatan Non Operasional dan Pos Luar Biasa masing-masing sebesar defisit **Rp95.201.292.703,-** dan **Rp0,-** sehingga entitas mengalami defisit -LO sebesar **Rp13.781.771.994.410,-**.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2025 adalah sebesar **Rp46.424.125.342.175,-** dikurangi Defisit-LO sebesar **Rp13.781.771.994.410,-** ditambah dengan koreksi-koreksi senilai **Rp14.104.698.967,-** dan Transaksi Antar Entitas sebesar **Rp24.532.048.165,-** sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai **Rp32.680.990.094.897,-**.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk per 31 Desember 2025 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

LAPORAN REALISASI ANGGARAN



LAPORAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL
PERBENDAHARAAN TA 2025 AUDITED

I. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT	31 DESEMBER 2025		%	31 DESEMBER 2024	NAIK/TURUN (%)
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI	
PENDAPATAN	B.1					
Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	26.032.135.072.000	35.682.387.502.566	137,07	30.971.102.363.660	15,21
JUMLAH PENDAPATAN		26.032.135.072.000	35.682.387.502.566	137,07	30.971.102.363.660	15,21
BELANJA	B.2					
Belanja Pegawai	B.2.1	84.438.378.000	82.737.854.367	97,99	84.954.829.673	(2,61)
Belanja Barang	B.2.2	57.351.164.340.000	51.448.862.270.023	89,71	33.109.966.963.553	55,39
Belanja Modal	B.2.3	671.995.095.000	418.222.724.725	62,24	510.725.438.724	(18,11)
JUMLAH BELANJA		58.107.597.813.000	51.949.822.849.115	89,40	33.705.647.231.950	54,13

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Jakarta, Mei 2026
Direktur Jenderal,



Ditandatangani secara elektronik
Astera Primanto Bhakti

NERACA

LAPORAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL
PERBENDAHARAAN TA 2025 AUDITED

II. NERACA

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN NERACA PER 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	NAIK/TURUN	NAIK/TURUN (%)
ASET					
ASET LANCAR					
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1	2.328.244.088	2.053.484.598	274.759.490	13,38
Kas pada Badan Layanan Umum	C.2	12.043.877.697.341	26.288.295.885.004	(14.244.418.187.663)	(54,19)
Investasi Jangka Pendek- Badan Layanan Umum	C.3	12.210.494.086.649	14.213.310.755.807	(2.002.816.669.158)	(14,09)
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.4	28.959.108.007	2.106.664.901.835	(2.077.705.793.828)	(98,63)
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	C.5	116.710.996.014	166.786.059.598	(50.075.063.584)	(30,02)
Piutang Bukan Pajak	C.6	607.365.352	434.752.276	172.613.076	39,70
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.7	(384.362.189)	(253.031.675)	(131.330.514)	51,90
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)		223.003.163	181.720.601	41.282.562	22,72
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.8	5.000.000	12.000.000	(7.000.000)	(58,33)
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	C.9	(25.000)	(60.000)	35.000	(58,33)
BAGIAN LANCAR TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/ TUNTUTAN GANTI RUGI (NETTO)		4.975.000	11.940.000	(6.965.000)	(58,33)
Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum	C.10	931.001.742.106	458.136.218.063	472.865.524.043	103,22
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang dari Kegiatan Operasional BLU "	C.11	(427.428.946.870)	(190.632.471.678)	(236.796.475.192)	124,22
PIUTANG DARI KEGIATAN OPERASIONAL BLU (NETTO)		503.572.795.236	267.503.746.385	236.069.048.851	88,25
Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum	C.12	1.327.154.000	0	1.327.154.000	0,00
PIUTANG DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL BLU (NETTO)		1.327.154.000	0	1.327.154.000	0,00
Persediaan	C.13	15.064.238.831	17.143.291.030	(2.079.052.199)	(12,13)
JUMLAH ASET LANCAR		24.922.562.298.329	43.061.951.784.858	(18.139.389.486.529)	(42,12)
INVESTASI JANGKA PANJANG					
Dana Bergilir	C.14	1.377.619.421.093	1.324.501.615.055	53.117.806.038	4,01
Investasi Non Permanen Badan Layanan Umum	C.15	8.349.005.709.284	8.399.546.659.356	(50.540.950.072)	(0,60)
Dana Bergilir Diragukan Tertagih	C.16	(531.424.203.269)	(438.310.115.578)	(93.114.087.691)	21,24
Investasi Non Permanen BLU Bentuk Tagihan Diragukan Tertagih	C.17	(89.198.323.975)	(87.654.597.764)	(1.543.726.211)	1,76
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		9.106.002.603.133	9.198.083.561.069	(92.080.957.936)	(1,00)
ASET TETAP					
Tanah	C.18	9.181.203.085.559	9.177.179.647.830	4.023.437.729	0,04
Perlitan dan Mesin	C.19	2.077.948.116.906	1.904.038.313.381	173.909.803.525	9,13
Gedung dan Bangunan	C.20	2.440.737.773.157	2.308.842.190.683	131.895.582.474	5,71
Jalan Irigasi dan Jaringan	C.21	1.114.536.000	1.114.536.000	0	0,00
Aset Tetap Lainnya	C.22	67.020.107.506	13.554.602.492	53.465.505.014	394,45
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.23	11.052.413.978	97.822.985.061	(86.770.571.083)	(88,70)

URAIAN	CAT	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	NAIK/TURUN	NAIK/TURUN (%)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.24	(2.372.528.652.629)	(2.150.265.196.885)	(222.263.455.744)	10,34
JUMLAH ASET TETAP		11.406.547.380.477	11.352.287.078.562	54.260.301.915	0,48
PIUTANG JANGKA PANJANG					
Piutang Tagihan TP/TGR	C.25	1.809.811.088	1.832.811.088	(23.000.000)	(1,25)
Penyisihan Piutang Tak Tertagih - TP/TGR	C.26	(1.809.811.088)	(1.827.836.088)	18.025.000	(0,99)
TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI (NETTO)		0,00	4.975.000	(4.975.000)	(100,00)
JUMLAH PIUTANG JANGKA PANJANG		-	4.975.000	(4.975.000)	(100,00)
ASET LAINNYA					
Aset Tak Berwujud	C.27	1.021.839.428.066	941.109.031.886	80.730.396.180	8,58
Aset Tak Berwujud Dalam Pengerjaan	C.28	0,00	3.794.326.637	(3.794.326.637)	(100,00)
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.29	1.884.889.930.979	50.488.840.795	1.834.401.090.184	3.633,28
Dana Kelolaan Badan Layanan Umum	C.30	12.717.800.019.673	12.870.873.477.257	(153.073.457.584)	(1,19)
Aset Lain-Lain	C.31	51.048.186.530	68.017.778.101	(16.969.591.571)	(24,95)
Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	C.32	(742.958.512.238)	(709.979.706.167)	(32.978.806.071)	4,65
JUMLAH ASET LAINNYA		14.932.619.053.010	13.224.303.748.509	1.708.315.304.501	12,92
JUMLAH ASET		60.367.731.334.949	76.836.631.147.998	(16.468.899.813.049)	(21,43)
KEWAJIBAN					
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK					
Utang kepada Pihak Ketiga	C.33	5.301.444.657.107	7.816.678.114.255	(2.515.233.457.148)	(32,18)
Pendapatan Diterima di Muka	C.34	1.334.357.514	905.939.300	428.418.214	47,29
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.35	477.966	600	477.366	0,9987
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		5.302.779.492.587	7.817.584.054.155	(2.514.804.561.568)	(32,17)
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG					
Utang jangka panjang BLU kepada BUN	C.36	22.444.425.150.050	22.594.921.751.668	(150.496.601.618)	(0,67)
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		22.444.425.150.050	22.594.921.751.668	(150.496.601.618)	(0,67)
JUMLAH KEWAJIBAN		27.747.204.642.637	30.412.505.805.823	(2.665.301.163.186)	(8,76)
EKUITAS					
Ekuitas	C.37	32.620.526.692.312	46.424.125.342.175	(13.803.598.649.863)	(29,73)
JUMLAH EKUITAS		32.620.526.692.312	46.424.125.342.175	(13.803.598.649.863)	(29,73)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		60.367.731.334.949	76.836.631.147.998	(16.468.899.813.049)	(21,43)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Jakarta, Mei 2026
Direktur Jenderal,



Ditandatangani secara elektronik
Astera Primanto Bhakti

LAPORAN OPERASIONAL



LAPORAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL
PERBENDAHARAAN TA 2025 AUDITED

III. LAPORAN OPERASIONAL

**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN
LAPORAN OPERASIONAL
PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024**

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	KENAIKAN / PENURUNAN	NAIK/ TURUN (%)
KEGIATAN OPERASIONAL					
PENDAPATAN					
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	3.022.460.080	3.914.446.037	(891.985.957)	(22,79)
Pendapatan Badan Layanan Umum	D.2	35.991.226.667.688	30.872.158.773.705	5.119.067.893.983	16,58
JUMLAH PENDAPATAN		35.994.249.127.768	30.876.073.219.742	5.118.175.908.026	16,58
BEBAN					
Beban Pegawai	D.3	261.811.228.365	251.069.390.043	10.741.838.322	4,28
Beban Persediaan	D.4	10.798.252.465	13.564.000.704	(2.765.748.239)	(20,39)
Beban Barang dan Jasa	D.5	46.441.116.145.758	40.080.337.256.561	6.360.778.889.197	15,87
Beban Pemeliharaan	D.6	341.714.317.887	325.894.723.183	15.819.594.704	4,85
Beban Perjalanan Dinas	D.7	101.858.099.018	147.398.704.480	(45.540.605.462)	(30,90)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda	D.8	587.241.203	0	587.241.203	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.9	354.351.761.573	347.374.729.201	6.977.032.372	2,01
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.10	331.155.981.324	425.627.991.464	(94.472.010.140)	(22,20)
JUMLAH BEBAN		47.843.393.027.593	41.591.266.795.636	6.252.126.231.957	15,03
SURPLUS (DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(11.849.143.899.825)	(10.715.193.575.894)	(1.133.950.323.931)	(10,58)
KEGIATAN NON OPERASIONAL					
Surplus/defisit Pelepasan Aset Non Lancar		829.435.172	(1.699.085.166)	2.528.520.338	148,82
Pendapatan Pelepasan Aset		4.477.021.378	2.802.026.854	1.674.994.524	59,78
Beban Pelepasan Aset		3.647.586.206	4.501.112.020	(853.525.814)	(18,96)
Surplus/defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya		94.371.857.531	115.023.016.032	(20.651.158.501)	(17,95)

URAIAN	CAT	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	KENAIKAN / PENURUNAN	NAIK/ TURUN (%)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		94.633.108.673	127.158.427.083	(32.525.318.410)	(25,58)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		261.251.142	12.135.411.051	(11.874.159.909)	(97,85)
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		95.201.292.703	113.323.930.866	(18.122.638.163)	(15,99)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA		(11.753.942.607.122)	(10.601.869.645.028)	(1.152.072.962.094)	(10,87)
POS LUAR BIASA					
Pendapatan PNBPN	-	-	-	-	0,00
Beban Perjalanan Dinas	-	-	-	-	0,00
Beban Persediaan	-	-	-	-	0,00
SURPLUS/DEFISIT LO		(11.753.942.607.122)	(10.601.869.645.028)	(1.152.072.962.094)	(10,87)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Jakarta, Mei 2026
Direktur Jenderal,



Ditandatangani secara elektronik
Astera Primanto Bhakti

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS



LAPORAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL
PERBENDAHARAAN TA 2025 AUDITED

IV. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025 DAN 31 DESEMBER 2024

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CAT	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	NAIK/TURUN	NAIK/TURUN (%)
EKUITAS AWAL	E.1	46.424.125.342.175	55.683.836.703.776	(9.259.711.361.601)	(16,63)
SURPLUS/DEFISIT LO	E.2	(11.753.942.607.122)	(10.601.869.645.028)	(1.152.072.962.094)	10,87
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	E.4	(2.074.188.090.906)	(21.578.083.988)	(2.052.610.006.918)	9.512,48
PENYESUAIAN NILAI ASET		-	-	-	-
KOREKSI NILAI PERSEDIAAN		-	-	-	-
KOREKSI ATAS REKLASIFIKASI		-	-	-	-
SELISIH REVALUASI ASET TETAP		-	-	-	-
KOREKSI NILAI ASET TETAP NON REVALUASI		14.011.228.562	(860.351.667)	14.871.580.229	(1.728,55)
LAIN-LAIN		(2.088.199.319.468)	(20.717.732.321)	(2.067.481.587.147)	(9.979,25)
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.5	24.532.048.165	1.363.736.367.415	(1.339.204.319.250)	(98,20)
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(13.803.598.649.863)	(9.259.711.361.601)	(4.543.887.288.262)	49,07
EKUITAS AKHIR	E.6	32.620.526.692.312	46.424.125.342.175	(13.803.598.649.863)	(29,73)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

Jakarta, Mei 2026
Direktur Jenderal,



Ditandatangani secara elektronik
Astera Primanto Bhakti

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN



LAPORAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL
PERBENDAHARAAN TA 2025 AUDITED

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

A.1 Dasar Hukum dan Peraturan

Dasar Hukum
Entitas

1. UUD 1945 Pasal 23 ayat (1) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar;
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.05/2021 tentang Sistem Akuntansi Hibah;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2025 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 107 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2025 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang Belum Diselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran Melalui Rekening Penampungan;
15. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 393 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Akuntansi Lingkup Kementerian Keuangan Bagian Anggaran 015.

A.2 Profil dan Kebijakan Teknis Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Profil Entitas dan
Rencana Strategis

Direktorat Jenderal Perbendaharaan terbentuknya tidak terlepas dari konsekuensi pelaksanaan reformasi penyempurnaan manajemen keuangan negara di Indonesia, ketika semangat mewujudkan tata kelola pemerintahan

yang baik (*good governance*) digulirkan, Pemerintah Pusat menempuh langkah perubahan melalui reformasi hukum dan reformasi organisasi. Secara paralel, reformasi hukum yang ditandai dengan lahirnya paket Undang-Undang Bidang Keuangan Negara diiringi dengan perubahan organisasional di tubuh Kementerian Keuangan guna menyelaraskan perangkat organisasi dengan penegasan fungsi Kementerian Keuangan selaku institusi Pengelola Fiskal.

Selaku institusi Pengelola Fiskal, Kementerian Keuangan membagi pemisahan kewenangan, yaitu fungsi-fungsi pengkajian, penganggaran, dan perbendaharaan. Inilah alasan kuat terjadinya penyempurnaan organisasi (*reorganisasi*) dengan "terbentuknya" 3 (tiga) organisasi dengan nomenklatur baru, yaitu Direktorat Jenderal Anggaran dan Perimbangan Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan Badan Pengkajian Ekonomi, Keuangan, dan Kerjasama Internasional. Perubahan organisasi yang ditandai dengan memisahkan fungsi-fungsi yang berbeda, namun berada dalam satu naungan organisasi, serta menyatukan fungsi-fungsi yang sama, namun tersebar di berbagai unit.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan sendiri bukanlah organisasi yang sama sekali baru. "*Core function*"nya tersebar di berbagai unit Eselon I dengan fungsi paling dominan, yaitu fungsi pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas negara, pengelolaan barang milik kekayaan negara, dan pengelolaan hutang luar negeri berada di bawah unit Eselon I Direktorat Jenderal Anggaran. Sementara itu, fungsi perbendaharaan lainnya tersebar di beberapa unit Eselon I dan II, yaitu fungsi pengelolaan hutang dalam negeri pada Pusat Manajemen Obligasi Negara, pengelolaan penerusan pinjaman dan pengelolaan kasnya pada Ditjen Lembaga Keuangan, dan penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pada Badan Akuntansi Keuangan Negara, serta fungsi pengolahan data pada Kantor Pengolahan Data Informasi Keuangan Regional.

Selanjutnya, dengan terbitnya Keputusan Presiden Nomor 35, 36, dan 37 Tahun 2004 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK/2004 dan Nomor 303/KMK/2004, secara hukum meleburkan unit-unit pengelola fungsi perbendaharaan tersebut menjadi satu Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang terdiri dari 1 (satu) Sekretariat Ditjen dan 7 (tujuh) Direktorat Teknis pada Kantor Pusat serta Kantor Wilayah DJPB dan KPPN pada kantor instansi vertikal.

Pelantikan Direktur Jenderal Perbendaharaan dan seluruh pejabat Eselon II pada bulan Oktober 2004 merupakan titik awal sinergi organisasi baru tersebut. Landasan Kegiatan Operasional Direktorat Jenderal Perbendaharaan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Kementerian Keuangan.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, dan akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas bidang perbendaharaan negara, Direktorat Jenderal Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, serta akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, serta akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, serta akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah;
4. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, serta akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah;
5. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelaksanaan anggaran, pengelolaan kas dan investasi, pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum, serta akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah;
6. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan; dan Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan berkomitmen dengan visi ***“Menjadi Pengelola Perbendaharaan Negara yang Profesional, Modern, Adaptif, Terpercaya dan Berorientasi pada Pelayanan Prima untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dalam rangka Mencapai Visi Kementerian Keuangan.”*** Untuk mewujudkannya akan dilakukan misi sebagai berikut.

1. Mendukung pelaksanaan APBN yang efisien, efektif, berkualitas, terarah, transparan, akuntabel, dan berdampak;
2. Mewujudkan pengelolaan kas negara yang modern, kredibel, dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan pertanggungjawaban keuangan negara melalui pelaporan keuangan pemerintah yang akuntabel, transparan, dan kredibel;
4. Mewujudkan tata kelola investasi pemerintah dan pemberian pinjaman yang strategis, inklusif, dan berkelanjutan;
5. Mewujudkan tata kelola keuangan BLU yang inovatif, akuntabel, dan berdampak;
6. Mewujudkan tata kelola sumber daya, proses bisnis, serta sistem teknologi informasi perbendaharaan yang digital, adaptif, dan terintegrasi.

Misi yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan kemudian dilaksanakan oleh unit-unit organisasi pada tingkat pusat dan vertikal. Susunan organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 234/PMK.01/2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan. Susunan Organisasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai berikut.

Gambar A.1 Bagan Organisasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan



1. Sekretariat Direktorat Jenderal;
Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan strategis kepada semua unsur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.
2. Direktorat Pelaksanaan Anggaran;
Mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan, standardisasi, monitoring dan evaluasi di bidang pelaksanaan anggaran.
3. Direktorat Pengelolaan Kas Negara;
Mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengelolaan kas negara.
4. Direktorat Sistem Manajemen Investasi;
Direktorat Sistem Manajemen Investasi mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sistem manajemen investasi.
5. Direktorat Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
Mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan Badan Layanan Umum.
6. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
Mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan.
7. Direktorat Sistem Perbendaharaan;
Mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pengembangan sistem perbendaharaan.
8. Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan;
Mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang sistem informasi dan teknologi perbendaharaan.

Selain itu terdapat organisasi vertikal Ditjen Perbendaharaan, Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.01/2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan Jumlah entitas akuntansi adalah 217 satuan kerja yang terdiri dari 34 Kantor Wilayah, 177 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang terdiri dari 98 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1, 79 Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2, dan 3 (tiga) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus. Selain satker vertikal tersebut pada DJPb terdapat juga 3 (empat) satker Kantor Pusat dan 3 (tiga) Satuan Kerja Badan Layanan Umum. Tugas unit vertikal pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai berikut.

1. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, supervisi, bimbingan teknis, dukungan teknis, monitoring, evaluasi, penyusunan laporan, verifikasi dan pertanggungjawaban di bidang perbendaharaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 dan A2;
Mempunyai tugas melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Pinjaman dan Hibah; Mempunyai tugas melaksanakan penyaluran pembiayaan atas beban anggaran untuk dana yang berasal dari luar dan dalam negeri secara lancar, transparan, dan akuntabel serta melaksanakan kewenangan perbendaharaan dan bendahara umum negara, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.
4. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Penerimaan; Mempunyai tugas melaksanakan penerimaan, pengelolaan, pelaporan, dan rekonsiliasi transaksi data penerimaan serta penatausahaan penerimaan negara melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Investasi; Mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan naskah perjanjian investasi, penyaluran dana investasi pemerintah, penghitungan, penagihan, dan penerbitan perintah membayar investasi pemerintah, penerusan pinjaman, kredit program, dan investasi lainnya.

Pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan juga terdapat entitas Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran yang koordinasi pelaporan keuangannya dibawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan mempunyai tugas, yaitu:

1. Satuan Kerja Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP); Mempunyai tugas mempersiapkan penyusunan konsep Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sebagai prinsip-prinsip akuntansi yang wajib diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.
2. Satuan Kerja Komite Investasi Pemerintah (KIP); Mempunyai tugas dalam implementasi PP 63/2019 terkait Investasi Pemerintah melalui penetapan Operator Investasi Pemerintah pada BLU Pengelola Dana serta diharapkan dapat menunjukkan pengelolaan dana investasi pemerintah yang optimal dan prudent.
3. Satuan Kerja Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP); Mempunyai tugas untuk melaksanakan pengelolaan Dana Perkebunan, sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Satuan Kerja Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (PIP); Mempunyai tugas melaksanakan koordinasi di bidang pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Satuan Kerja Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH); Mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan dana lingkungan hidup di bidang kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan karbon, jasa lingkungan, industri, transportasi, pertanian, kelautan dan perikanan,

dan bidang lainnya terkait lingkungan hidup sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Gambar A. 2 Entitas Akuntansi Direktorat Jenderal Perbendaharaan

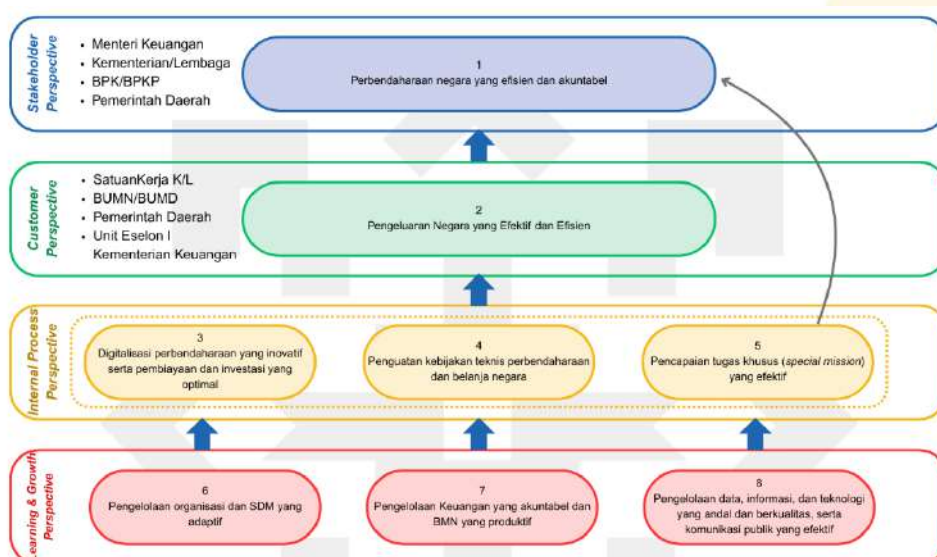


Lokasi Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan berkedudukan di Gedung Prijadi Praptosuhardjo I, Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2 Jakarta Pusat.

A.3 Nilai Kinerja Organisasi

Nilai Kinerja Organisasi

Gambar A. 3 Peta Strategi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2025



Pada Tahun 2025 terdapat 8 (delapan) Sasaran Strategis (SS) dan 20 Indikator Kinerja Utama (IKU), yang diukur pada Tahun 2025 pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan dengan rincian sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Tabel A. 1 Nilai Kinerja Organisasi Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2025

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/IKU	Target	Realisasi	Indeks
Stakeholder (30.00)				116,6

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/IKU	Target	Realisasi	Indeks
Perbendaharaan negara yang efisien dan akuntabel				116,6
1a-CP	Tingkat kepuasan stakeholder dan pengguna layanan	100.00	120,66	120
1b-CP	Indeks integritas	100.00	108,98	108,98
1c-CP	Indeks optimalisasi kas terhadap bunga utang	3,25	4,00	120
1d-CP	Indeks kualitas LKPP dan LK BUN	98,8	117,52	118,95
Customer (20.00)				117,02
Pengeluaran negara yang efektif dan efisien				
2a-CP	Indeks kinerja kebijakan belanja negara	100	112,97	112,97
2b-CP	Indeks efektivitas belanja dan investasi	91,6	111,4	120
Internal Process (25.00)				118,63
Digitalisasi perbendaharaan yang inovatif serta pembiayaan dan investasi yang efektif				119,53
3a-CP	Indeks digitalisasi pengelolaan keuangan negara	100	118,7	118,7
3b-CP	Indeks keberhasilan inklusi keuangan	100.00	120	120
3c-N	Indeks efektivitas investasi pemerintah	4.00	5,00	120
Penguatan Kebijakan teknis Perbendaharaan dan Belanja Negara				120
4a-N	Persentase Implementasi ISRBTK dan Data Analytics Unit	100.00	100	120
4b-N	Indeks efektivitas implementasi Kemenkeu Kewilayahan	4.00	5.00	120.00
Pencapaian tugas khusus (special mission) yang efektif				116,37
5a-CP	Indeks efektivitas kinerja SMV	100	115,54	115,54
5b-CP	Indeks maturitas tata kelola SMV	100	120.00	120.00
5c-CP	Indeks Peningkatan Efisiensi Layanan BLU	3,00	3,9	120
Learning and Growth (25.00)				118,47
Pengelolaan organisasi, SDM, dan IT yang adaptif				116,35
6a-CP	Tingkat kualitas pengelolaan SDM Keuangan negara	97,5	116,54	119,53
6b-CP	Nilai evaluasi organisasi	100	114	114
Pengelolaan keuangan yang akuntabel dan BMN yang produktif				120,00
7a-CP	Indeks kualitas pengelolaan Keuangan BA 015	100.00	120.00	120.00
7b-CP	Indeks Kualitas Pengelolaan BMN dan Pengadaan	100	120	120
Pengelolaan data, informasi, dan teknologi yang andal dan berkualitas, serta komunikasi publik yang efektif				119,06
8a-CP	Tingkat keandalan sistem informasi Kementerian Keuangan	100.00	118,11	118,11
8b-CP	Indeks efektivitas komunikasi	100	120	120
Nilai Kinerja Organisasi				117,66

A.4 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2025 *Audited* ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI), yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga. Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2025 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang meliputi wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang

diberikan. Jumlah entitas akuntansi di lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah 218 entitas.

A.5 Basis Akuntansi

*Basis
Akuntansi*

Direktorat Jenderal Perbendaharaan menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasi dan Laporan Perubahan Ekuitas. Basis akrual merupakan basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan Laporan Realisasi Anggaran basis kas untuk disusun dan disajikan dengan basis kas. Basis kas merupakan basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.6 Dasar Pengukuran

*Dasar
Pengukuran*

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.7 Kebijakan Akuntansi

*Kebijakan
Akuntansi*

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan yang merupakan entitas pelaporan dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

A.7.1 Pendapatan – LRA

Pendapatan – LRA

1. Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali

oleh pemerintah.

2. Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
3. Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
4. Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

A.7.2 Pendapatan- LO

Pendapatan – LO

1. Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
2. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah sebagai berikut:
 - a. Pendapatan Pengelolaan BMN
 - b. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - c. Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
3. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
4. Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

A.7.3 Belanja

Belanja

1. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
2. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
3. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
4. Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

A.7.4 Beban

Beban

1. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
2. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
3. Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan

atas Laporan Keuangan.

A.7.5 Aset

Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

A.7.5.1 Aset Lancar

Aset Lancar

1. Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
2. Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihan atau yang dipersamakan, yang diharapkan diterima pengembaliannya dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan
3. Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal
4. Piutang disajikan di neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan Penyisihan Piutang adalah sebagai berikut:

Tabel A. 2 Perhitungan Penyisihan Piutang

KUALITAS PIUTANG	URAIAN	PENYISIHAN
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	Satu bulan terhitung sejak 100% tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan	100%

5. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
6. Persediaan dinilai dengan menggunakan metode First In First Out (FIFO) dimana barang yang masuk terlebih dahulu dianggap sebagai barang pertama yang keluar. Saldo Persediaan dicatat sebagai hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan :
 - a. harga perolehan masing-masing, apabila diperoleh dengan pembelian

- b. harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri
- c. harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

A.7.5.2 Aset Tetap

Aset Tetap

1. Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun.
2. Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
3. Pada tahun 2018 perubahan nilai minimum kapitalisasi aset tetap mengalami perubahan sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara. Perubahan pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) menjadi nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk per satuan aset tetap renovasi (ATR) peralatan dan mesin pada peraturan sebelumnya tidak diatur menjadi nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - c. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) menjadi nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - d. Pengeluaran untuk per satuan aset tetap renovasi (ATR) gedung dan bangunan pada peraturan sebelumnya tidak diatur menjadi nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - e. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
4. Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset lainnya.
5. Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

A.7.5.3 Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset Tetap

1. Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
2. Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan

- c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
3. Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
4. Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat.
5. Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 295/KMK.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

A.7.5.4 Piutang Jangka Panjang

1. Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.
2. Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

A.7.5.5 Aset Lainnya

1. Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
2. Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual.
3. ATB disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
4. Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil, sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
5. Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2021 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel A. 3 Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

KELOMPOK ASET TETAP	MASA MANFAAT
Software	4 tahun
Franchise	5 tahun
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu	10 tahun

Piutang Jangka Panjang

Aset Lainnya

KELOMPOK ASET TETAP	MASA MANFAAT
Hak Ekonomi, Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim	20 tahun
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50 tahun
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70 tahun

Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan operasional entitas, disajikan sebesar harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

A.7.6 Kewajiban

Kewajiban

1. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
2. Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
3. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.
4. Kewajiban pada satuan kerja BPDP diatur kebijakan sebagai berikut:
 - a. Utang atas permintaan kelebihan bayar pungutan oleh eksportir (lebih pungut) diakui apabila telah ada surat ketetapan lebih bayar dari BPDP atas permohonan pengembalian kelebihan bayar dari eksportir.
 - b. Utang atas penyaluran biodiesel diakui pada saat Badan Usaha Bahan Bakar Nabati (BU BBN) menyampaikan tagihan kepada BPDP yang nilainya telah diverifikasi oleh Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE).
 - c. Utang terhadap biaya riset diakui pada saat perjanjian riset ditandatangani oleh BPDP dan Lembaga riset sebesar pencairan Tahap I. Pengakuan utang atas biaya riset tahap II dan III diakui sebesar hasil monitoring tahap sebelumnya.
 - d. Utang terhadap biaya surveyor dicatat apabila telah ada tagihan dari surveyor yang dilengkapi dengan Laporan Surveyor (LS) dan telah diverifikasi oleh PPK.

A.7.7 Ekuitas

Ekuitas

Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama Tahun Anggaran 2025, pagu anggaran lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan mengalami kenaikan dibanding Tahun Anggaran 2024. Direktorat Jenderal perbendaharaan memperoleh alokasi awal APBN Tahun Anggaran 2024 yaitu pagu belanja sebesar Rp7.707.192.134.000,- lalu mengalami peningkatan menjadi Rp58.107.597.813.000,-.

Berikut merupakan pagu berdasarkan sumber pendapatan dan jenis belanja pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah sebagai berikut.

Tabel B. 1 Pagu Berdasarkan Sumber Pendapatan dan Jenis Belanja Tahun 2025 (Rupiah)

URAIAN	TAHUN 2025	
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN REVISI
Pendapatan		
Pendapatan Negara Bukan Pajak	26.032.135.072.000	26.032.135.072.000
Total Jumlah Pendapatan	26.032.135.072.000	26.032.135.072.000
Belanja		
Belanja Pegawai	78.646.146.000	84.438.378.000
Belanja Barang	943.919.519.000	996.792.947.000
Belanja Modal	463.246.852.000	523.257.132.000
Jumlah Belanja	1.485.812.517.000	1.604.488.457.000
Belanja BLU		
Belanja Barang-BLU	6.212.006.341.000	56.354.371.393.000
Belanja Modal-BLU	9.373.276.000	148.737.963.000
Jumlah Belanja-BLU	6.221.379.617.000	56.503.109.356.000
Total Jumlah Belanja	7.707.192.134.000	58.107.597.813.000

Sedangkan perubahan pagu estimasi pendapatan anggaran per kelompok pendapatan dan pagu anggaran belanja per jenis belanja adalah sebagai berikut.

a. Pendapatan

Tabel B. 2 Estimasi Pendapatan Tahun 2025 (Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2025		NAIK/TURUN %
	ANGGARAN AWAL	ANGGARAN REVISI	
Pendapatan PNBPN			
Pendapatan Jasa Layanan Umum	23.472.719.774.000	23.472.719.774.000	-
Pendapatan Hibah BLU	-	-	-
Pendapatan BLU Lainnya	2.553.556.074.000	2.553.556.074.000	-
Pendapatan Dari Penjualan Pengelolaan BMN Iuran Badan Usaha	4.057.894.000	4.057.894.000	-
Pendapatan Bunga Pengelolaan Rekening Perbankan	28.500.000	28.500.000	-
Pendapatan Denda	202.000.000	202.000.000	-
Pendapatan Lain-Lain	1.570.830.000	1.570.830.000	-
Pendapatan	26.032.135.072.000	26.032.135.072.000	-

b. Belanja

Tabel B. 3 Pagu Belanja Menurut Jenis Belanja Tahun 2025 (Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2025		Naik/Turun
	Anggaran Awal	Anggaran Revisi	
Belanja			
Belanja Pegawai			
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS			
Belanja Uang Makan PNS	51.698.304.000	47.052.499.000	(4.645.805.000)
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	3.789.719.000	3.707.632.000	(82.087.000)
Belanja Lembur	22.814.719.000	33.334.843.000	10.520.124.000
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan)	343.404.000	343.404.000	-
Jumlah Belanja Pegawai	78.646.146.000	84.438.378.000	5.792.232.000
Belanja Barang Non BLU			
Belanja Barang Operasional	225.242.778.000	224.441.370.000	(801.408.000)
Belanja Barang Non Operasional	56.033.129.000	58.653.215.000	2.620.086.000
Belanja Barang Persediaan	17.271.471.000	17.439.712.000	168.241.000
Belanja Jasa	106.091.699.000	117.403.799.000	11.312.100.000
Belanja Pemeliharaan	387.691.253.000	428.502.141.000	40.810.888.000
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	150.385.386.000	148.796.037.000	(1.589.349.000)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	1.203.803.000	1.556.673.000	352.870.000
Jumlah Belanja Barang Non BLU	943.919.519.000	996.792.947.000	52.873.428.000
Belanja Modal Non BLU			
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	173.738.534.000	216.325.466.000	42.586.932.000
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	175.660.368.000	220.911.229.000	45.250.861.000
Belanja Modal Lainnya	113.847.950.000	86.020.437.000	(27.827.513.000)
Jumlah Belanja Modal Non BLU	463.246.852.000	523.257.132.000	60.010.280.000
Jumlah Belanja Non BLU	1.485.812.517.000	1.604.488.457.000	118.675.940.000
Belanja BLU			
Belanja Barang-BLU	6.212.006.341.000	56.354.371.393.000	50.142.365.052.000
Belanja Modal-BLU	9.373.276.000	148.737.963.000	139.364.687.000
Jumlah Belanja BLU	6.221.379.617.000	56.503.109.356.000	50.281.729.739.000
Total Jumlah Belanja	7.707.192.134.000	58.107.597.813.000	50.400.405.679.000

Sedangkan apabila dilihat dari **Kegiatan** Direktorat Jenderal Perbendaharaan maka perubahannya adalah sebagai berikut.

Tabel B. 4 Pagu Belanja Berdasarkan Kegiatan Tahun 2025 (Rupiah)

KODE	KEGIATAN	31 DESEMBER 2025	
		Anggaran Awal	Anggaran Revisi
CD	Program Pengelolaan Perbendaharaan Kekayaan Negara dan Risiko		
6212	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	43.139.971.000	43.743.596.000
6213	Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	26.658.895.000	25.843.694.000
6214	Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara	5.091.480.000	5.485.984.000
6215	Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara	3.651.221.000	3.702.636.000
6216	Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif	9.856.026.000	9.572.903.000

KODE	KEGIATAN	31 DESEMBER 2025	
		Anggaran Awal	Anggaran Revisi
	Jumlah Belanja Program CD	88.397.593.000	88.348.813.000
WA	Program Dukungan Manajemen		
4711	Legislasi dan Litigasi	193.790.000	176.126.000
4715	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	663.346.602.000	859.753.852.000
4718	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	6.130.310.000	6.507.858.000
4719	Pengelolaan Organisasi dan SDM	144.983.746.000	153.546.511.000
4722	Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal	1.234.319.000	1.292.004.000
4725	Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi	523.651.077.000	449.716.874.000
6990	Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission) Dukungan Penyelenggaraan Kegiatan Badan Pengarah Papua	57.875.080.000	45.146.419.000
	Jumlah Belanja Program WA	1.397.414.924.000	1.516.139.644.000
	Jumlah Rupiah Murni	1.485.812.517.000	1.604.488.457.000
WA	Program Dukungan Manajemen		
4712	Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission)	6.056.135.600.000	25.148.875.328.000
4713	Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission)	95.640.778.000	119.278.406.000
4714	Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission)	69.603.239.000	991.727.637.000
	Jumlah Belanja Program WA - BLU	6.221.379.617.000	26.259.881.371.000
WA	Program Dukungan Manajemen (Saldo Awal BLU)		
4712	Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission)	-	30.243.227.985.000
	Jumlah Belanja Program WA (Saldo Awal BLU)	-	30.243.227.985.000
	Jumlah Belanja BLU	6.221.379.617.000	56.503.109.356.000
	Jumlah	7.707.192.134.000	58.107.597.813.000

B.1 PENDAPATAN

Realisasi Pendapatan
Rp35.682.387.502.566,-

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp35.682.387.502.566,-** atau mencapai **137,07** persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar **Rp26.032.135.072.000,-**. Pendapatan lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan terdiri atas Pendapatan Badan Layanan Umum, Pendapatan Pengelolaan BMN, Pendapatan Jasa, Pendapatan Denda dan Pendapatan Lain-lain. Rincian estimasi pendapatan dan realisasinya adalah sebagai berikut.

Tabel B. 5 Realisasi Pendapatan Menurut Akun Tahun 2025 (Rupiah)

URAIAN	TAHUN 2025		
	ESTIMASI PENDAPATAN	REALISASI PENDAPATAN	%
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha	4.057.894.000	6.340.404.636	156,25
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan.	28.500.000	30.000.000	105,26
Pendapatan Denda	202.000.000	1.515.422.733	750,21
Pendapatan Lain-lain	1.570.830.000	7.526.416.379	479,14
JUMLAH PNPB LAINNYA	5.859.224.000	15.412.243.748	263,04
Pendapatan Jasa Layanan Umum	23.472.719.774.000	34.010.918.148.674	144,90
Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum	-	891.676.822.377	
Pendapatan BLU Lainnya	2.553.556.074.000	764.380.287.767	29,93
JUMLAH PNPB BLU	26.026.275.848.000	35.666.975.258.818	137,04
JUMLAH PNPB NETTO	26.032.135.072.000	35.682.387.502.566	137,07

Realisasi Pendapatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 mengalami

peningkatan sebesar **15,21 persen** dibandingkan realisasi pendapatan per 31 Desember 2024. Kenaikan ini berasal dari peningkatan penerimaan dari pungutan ekspor komoditas Perkebunan (terutama sawit dan turunannya).

Tabel B. 6 Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 (Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	KENAIKAN/ PENURUNAN	NAIK/ (TURUN) %
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha	6.340.404.636	4.079.958.184	2.260.446.452	55,40
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, Dan. Pengelolaan Keuangan.	30.000.000	107.760.000	-77.760.000	-72,16
Pendapatan Denda	1.515.422.733	2.361.363.145	-845.940.412	-35,82
Pendapatan Lain-lain	7.526.416.379	2.327.646.965	5.198.769.414	223,35
JUMLAH PNBP LAINNYA	15.412.243.748	8.876.728.294	6.535.515.454	73,63
Pendapatan Jasa Layanan Umum	34.010.918.148.674	26.668.720.082.102	7.342.198.066.572	27,53
Pendapatan Hibah Badan Layanan Umum	891.676.822.377	691.646.713.137	200.030.109.240	28,92
Pendapatan BLU Lainnya	764.380.287.767	3.601.858.840.127	-2.837.478.552.360	-78,78
JUMLAH PNBP BLU	35.666.975.258.818	30.962.225.635.366	4.704.749.623.452	15,20
JUMLAH PNBP NETTO	35.682.387.502.566	30.971.102.363.660	4.711.285.138.906	15,21

B.1.1 Pendapatan PNBP Lainnya

Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya
Rp15.412.243.748,-

Realisasi Pendapatan PNBP Lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp15.412.243.748,-** atau **263,04 persen** dari estimasi. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2024, realisasi PNBP Lainnya mengalami peningkatan sebesar Rp6.535.515.454,- atau 73,63 persen. Berikut merupakan perbandingan realisasi Pendapatan PNBP Lainnya dibanding Tahun Anggaran 2024.

Tabel B. 7 Realisasi PNBP Lainnya Tahun 2025 dan 2024 (Rupiah)

KODE	URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	NAIK/ TURUN (%)
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha				
425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	-	138.659.080	(100,00)
425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	26.273.000	70.352.900	(62,66)
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	3.962.694.494	1.885.034.251	110,22
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	488.053.884	846.639.703	(42,35)

KODE	URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	NAIK/ TURUN (%)
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1.769.386.600	1.139.272.250	55,31
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	92.396.658	-	0,00
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Penglolaan				
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain	30.000.000	107.760.000	(72,16)
Pendapatan Denda				
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	1.515.422.733	2.361.363.145	(35,82)
Pendapatan lain-lain				
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	103.560.000	312.529.050	(66,86)
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	1.390.436.745	1.805.456.661	(22,99)
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	5.955.794.331	148.461.310	3911,68
425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	-	4.000.000	(100,00)
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	-	57.197.160	(100,00)
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	76.625.303	2.784	(100,00)
Jumlah		15.412.243.748	8.876.728.294	73,63

Berikut penjelasan dari sumber realisasi terbesar PNBPN Lainnya di Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

a. Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin

Realisasi pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin pada 2025 adalah sebesar Rp3.962.694.494,- meningkat sebesar 110,22 persen dibandingkan TA 2024. Peningkatan ini disebabkan karena peningkatan penjualan lelang pada satuan kerja lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Kenaikan tersebut selaras dengan ND-3338/PB.1/2025 tentang tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI atas pengelolaan BMN pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang mengintruksikan satker agar melakukan Pemindahtanganan, Pemusnahan, atau Penghapusan atas BMN yang telah dihentikan penggunaannya sesuai ketentuan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak dihentikan yang dilanjutkan dengan transaksi penjualan lelang.

b. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan

Realisasi Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan pada 2025 adalah sebesar Rp1.769.386.600,- meningkat sebesar 55,31 persen dibandingkan TA 2024. Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan pada 2025 terbesar berasal dari Satker Kampus DJPb yang menyewakan bangunannya ke Bank Mandiri KC KPPN Jakarta II, PD Sanggara Textile, dan Yayasan Anggraini Bhakti.

c. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah

Realisasi Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah pada 2025 adalah sebesar Rp1.515.422.733,- menurun sebesar 35,82 persen dibandingkan TA 2024. Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah berasal dari realisasi jaminan pelaksanaan dari penyelesaian pekerjaan revitalisasi kompleks rumah dinas kemang manis pada Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan sebesar Rp248.806.370,-, rehabilitasi komplek rumah negara pada KPPN Timika sebesar Rp443.418.968,-, rehabilitasi mess perbendaharaan, *landscape* mess perbendaharaan dan rumah jabatan Kanwil DJPb Provinsi D.I Yogyakarta, pembangunan rumah negara di kompleks Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah serta 13 satker lain pada lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

d. Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu

Realisasi Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu pada 2025 adalah sebesar Rp1.390.436.745,- atau turun sebesar 22,99 persen dari TA 2024. Pendapatan ini menurun karena penurunan setoran sisa dana dari rekening penampungan (RPATA) ke Kas Negara yang dicatat menggunakan akun pendapatan 425912.

e. Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu

Realisasi Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu pada 2025 adalah sebesar Rp5.955.794.331,- atau naik sebesar 3.911,68 persen dari TA 2024. Pendapatan ini berasal dari hasil tindak lanjut rekomendasi BPK RI atas pemeriksaan renovasi kantor dan rumah negara yang kurang dikerjakan serta hasil tindak lanjut atas rekomendasi Itjen Kemenkeu.

Tabel B. 8 Realisasi Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu (425913) Tahun 2025 (Rupiah)

SATUAN KERJA	REALISASI PER 31 DESEMBER 2025
Kantor Pusat DJPb	29.785.654
Kanwil DJPb Jawa Barat	3.300.661
Kanwil DJPb Jawa Tengah	1.359.785.068
KPPN Palu	61.185.000
Kanwil DJPb Kalimantan Timur	800.560
Kanwil DJPb Sulawesi Tengah	13.950.000
KPPN Tobelo	7.940.070
KPPN Timika	4.477.580.418
Kanwil DJPb Kalimantan Utara	1.466.900
Jumlah	5.955.794.331

Realisasi PNBPN Lainnya per Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah sebagai berikut.

Tabel B. 9 Realisasi PNBPN Lainnya per Kantor Wilayah Tahun 2025 (Rupiah)

KWL	NAMA KANWIL	2025	2024	NAIK/TURUN	NAIK/TURUN (%)
000	Kantor Pusat DJPb	2.891.737.955	2.978.830.002	(87.092.047)	(3,01)
001	Kanwil DJPb Prov. Aceh	106.523.000	323.116.000	(216.593.000)	(203,33)
002	Kanwil DJPb Prov. Sumatera Utara	413.790.943	243.281.320	170.509.623	41,21
003	Kanwil DJPb Prov. Sumatera Barat	258.756.520	126.367.664	132.388.856	51,16
004	Kanwil DJPb Prov. Riau	115.026.500	18.054.050	96.972.450	84,30

KWL	NAMA KANWIL	2025	2024	NAIK/TURUN	NAIK/ TURUN (%)
005	Kanwil DJPb Prov. Jambi	56.386.634	4.448.000	51.938.634	92,11
006	Kanwil DJPb Prov. Sumatera Selatan	470.093.259	20.988.000	449.105.259	95,54
007	Kanwil DJPb Prov. Lampung	217.574.500	86.149.841	131.424.659	60,40
008	Kanwil DJPb Prov. Bengkulu	105.712.000	158.602.000	(52.890.000)	(50,03)
009	Kanwil DJPb Prov. Bangka Belitung	16.545.500	51.192.108	(34.646.608)	(209,40)
010	Kanwil DJPb Prov. Banten	15.379.500	24.835.000	(9.455.500)	(61,48)
011	Kanwil DJPb Prov. Dki Jakarta	175.942.650	230.903.121	(54.960.471)	(31,24)
012	Kanwil DJPb Prov. Jawa Barat	767.534.486	296.503.571	471.030.915	61,37
013	Kanwil DJPb Prov. Jawa Tengah	2.108.049.393	509.905.065	1.598.144.328	75,81
014	Kanwil DJPb Prov. Diy Yogyakarta	222.345.949	214.559.812	7.786.137	3,50
015	Kanwil DJPb Prov. Jawa Timur	362.918.150	306.012.633	56.905.517	15,68
016	Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Barat	183.216.139	234.090.850	(50.874.711)	(27,77)
017	Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Tengah	239.026.700	50.336.950	188.689.750	78,94
018	Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Selatan	53.815.190	84.921.099	(31.105.909)	(57,80)
019	Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Timur	65.249.126	141.781.336	(76.532.210)	(117,29)
020	Kanwil DJPb Prov. Bali	66.083.050	34.528.600	31.554.450	47,75
021	Kanwil DJPb Prov. Nusa Tenggara Barat	108.235.400	579.386.845	(471.151.445)	(435,30)
022	Kanwil DJPb Prov. Nusa Tenggara Timur	116.210.574	72.475.000	43.735.574	37,63
023	Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Selatan	87.256.759	197.559.075	(110.302.316)	(126,41)
024	Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Tengah	208.065.980	264.946.688	(56.880.708)	(27,34)
025	Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Tenggara	150.355.022	5.752.140	144.602.882	96,17
026	Kanwil DJPb Prov. Gorontalo	14.469.116	1.288.000	13.181.116	91,10
027	Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Utara	106.779.050	87.025.820	19.753.230	18,50
028	Kanwil DJPb Prov. Maluku Utara	25.480.529	7.899.000	17.581.529	69,00
029	Kanwil DJPb Prov. Maluku	75.821.500	64.990.577	10.830.923	14,28
030	Kanwil DJPb Prov. Papua	5.063.444.880	84.155.000	4.979.289.880	98,34
031	Kanwil DJPb Prov. Kepulauan Riau	93.635.250	9.098.000	84.537.250	90,28
032	Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Barat	108.484.241	5.317.733	103.166.508	95,10
033	Kanwil DJPb Prov. Papua Barat	18.781.025	40.755.494	(21.974.469)	(117,00)
034	Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Utara	323.517.278	1.316.671.900	(993.154.622)	(306,99)
Jumlah		15.412.243.748	8.876.728.294	6.535.515.454	42,40

B.1.2 Pendapatan Badan Layanan Umum

Realisasi Pendapatan Badan Layanan Umum pada Tahun Anggaran 2025 adalah **Rp35.669.975.258.818,-** atau **137,04 persen** dari pagu. Jika

Realisasi Pendapatan
BLU
Rp35.666.975.258.818,-

dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2025, realisasi Pendapatan Badan Layanan umum mengalami peningkatan sebesar **Rp4.704.749.623.452,-** atau **15,20 persen** dari estimasi. Terdapat tiga unit satuan Badan Layanan Umum pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yaitu Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP), Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH), dan Pusat Investasi Pemerintah (PIP). Realisasi Pendapatan BLU Netto berdasarkan satuan kerja sebagai berikut:

Tabel B. 10 Realisasi Pendapatan Badan Layanan Umum (Rupiah)

NAMA BLU	2025	2024	NAIK/TURUN	NAIK/ TURUN (%)
BPDP	33.237.094.153.758	28.829.598.792.918	4.407.495.360.840	15,29%
BPD LH	1.866.326.531.986	1.597.654.048.098	268.672.483.888	16,82%
PIP	563.554.573.074	534.972.794.350	28.581.778.724	5,34%
Jumlah	35.666.975.258.818	30.962.225.635.366	4.704.749.623.452	15,20%

Penjelasan singkat mengenai BLU lingkup DJPb sebagai berikut.

a. Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPD LH)

Realisasi pendapatan BPD LH Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp1.866.326.531.986,- atau 369,28 persen dari estimasi. Peningkatan tersebut peningkatan tersebut berasal dari bertambahnya penerimaan hibah dari mitra pembangunan serta meningkatnya imbal hasil atas penempatan dana kelolaan. Pendapatan BPD LH bersumber dari Pendapatan ini terdiri dari Pendapatan Jasa Layanan Umum sebesar Rp669.384.091.294, Pendapatan Hibah Terikat - Uang sebesar Rp891.676.822.377,-, dan Pendapatan BLU Lainnya sebesar Rp305.265.618.315,-.

b. Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP)

Realisasi Pendapatan BPDP Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp33.237.094.153.758,- atau 132,16 persen dari estimasi. Pendapatan BPDP terdiri dari Pendapatan Jasa Layanan Umum seperti Pendapatan Dana Perkebunan Kelapa Sawit, Pendapatan Dana Perkebunan – Komoditas Perkebunan Strategis Lainnya, dan Pendapatan Investasi. Selain itu, terdapat Pendapatan BLU Lainnya seperti Pendapatan Jasa Layanan Perbankan Badan Layanan Umum, Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu, dan Pendapatan Lain-lain BLU. Pada TA 2025, realisasi Pendapatan Jasa Layanan Umum pada BPDP mengalami peningkatan sebesar 28,35 persen dari tahun sebelumnya. Salah satu komponen pendapatan yang mengalami peningkatan signifikan adalah Pendapatan Dana Perkebunan Kelapa Sawit (424138). yang terealisasi sebesar Rp31.504.908.924.225,-, naik 22,33 persen dari capaian tahun 2024. Hal ini disebabkan oleh perubahan tarif pungutan dana perkebunan atas ekspor kelapa sawit, Crude Palm Oil (CPO), dan produk turunannya sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 30 Tahun 2025 yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 69 Tahun 2025 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan pada Kementerian Keuangan. Penyesuaian tarif layanan ini berdampak langsung terhadap besaran pungutan yang diterima BPDP dari setiap ekspor komoditas sawit dan turunannya. Dengan tarif yang diperbarui, penerimaan per satuan ekspor meningkat sehingga secara agregat mendorong kenaikan

realisasi pendapatan tahun 2025.

c. Pusat Investasi Pemerintah (PIP)

Realisasi Pendapatan PIP Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp563.554.573.074,- atau 151,49 persen dari estimasi. Pendapatan PIP terdiri dari Pendapatan Jasa Layanan Umum dan Pendapatan BLU Lainnya. Pendapatan BLU Lainnya berasal dari optimalisasi saldo dana kelolaan dan surplus kas BLU pada instrumen deposito dan giro sebesar Rp277.410.884.019,-.

Tabel B. 11 Realisasi Pendapatan Per Akun per 31 Desember 2025 (Rupiah)

KODE	URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	NAIK/ TURUN (%)
424136	Pendapatan Investasi	1.852.987.112.238	312.082.653.573	493,75
424138	Pendapatan Dana Perkebunan - Kelapa Sawit	31.504.908.924.225	25.755.025.778.000	22,33
424139	Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus Lainnya	652.765.991.211	601.611.650.529	8,50
424151	Pendapatan Dana Perkebunan Komoditas Perkebunan Strategis Lainnya	256.121.000	-	
424215	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Uang	418.464.221.176	691.646.713.137	(39,50)
424216	Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri-Negara - Uang	473.212.601.201	-	
424911	Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	651.632.267.337	3.470.940.756.224	(1,23)
424915	Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	94.542.835.049	124.985.493.778	(24,36)
424916	Penerimaan Kembali Belanja Modal BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	82.584.400	243.979.720	(66,15)
424919	Pendapatan Lain-lain BLU	18.122.600.981	5.688.610.405	218,58
	TOTAL PNPB BLU	35.666.975.258.818	30.962.225.635.366	15,20%
425119	Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	-	138.659.080	(100,00)
425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	26.273.000	70.352.900	(62,66)
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	3.962.694.494	1.885.034.251	110,22
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	488.053.884	846.639.703	(42,35)
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1.769.386.600	1.139.272.250	55,31
425151	Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	93.996.658	-	0,00

KODE	URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	NAIK/ TURUN (%)
425791	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai	30.000.000	107.760.000	(72,16)
425811	Pendapatan Denda Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	1.515.422.733	2.361.363.145	(35,82)
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	103.560.000	312.529.050	(66,86)
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	1.390.436.745	1.805.456.661	(22,99)
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	5.955.794.331	148.461.310	3911,68
425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	-	4.000.000	(100,00)
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	-	57.197.160	(100,00)
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	76.625.303	2.784	2.752.245,65
TOTAL PNPB LAINNYA		15.412.243.748	8.876.728.294	73,63
TOTAL PNPB		35.682.387.502.566	30.971.102.363.660	15,19

B.2 REALISASI BELANJA

Realisasi Belanja
Rp51.949.822.849.115,-

Realisasi Belanja sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp51.949.822.849.115,- atau 89,40 persen** (termasuk realisasi belanja satker BLU) dari anggaran belanja sebesar **Rp58.107.597.813.000,-** Pada periode sampai dengan 31 Desember 2025 jumlah pengembalian belanja Direktorat Jenderal Perbendaharaan adalah sebesar **Rp206.032.711,-**. Pada Tahun Anggaran 2025 terjadi perubahan tren belanja baik barang maupun modal karena adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Dimana terdapat pemblokiran anggaran dalam rangka efisiensi untuk memenuhi belanja prioritas nasional.

1. Belanja menurut Jenis Program dan Kegiatan

Belanja pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan menurut program terdiri dari 2 (dua) Program, yaitu Program Pengelolaan Perbendaharaan Kekayaan Negara dan Resiko serta Program Dukungan Manajemen. Adapun rincian dari Belanja Menurut Program dan Kegiatan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel B. 12 Realisasi Belanja Menurut Program dan Kegiatan Tahun 2025 (Rupiah)

KODE	KEGIATAN	30 DESEMBER 2025	
		ANGGARAN REVISI	REALISASI
01	RUPIAH MURNI		
CD	Program Pengelolaan Perbendaharaan Kekayaan Negara dan Risiko		
6212	Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi	43.743.596.000	12.390.467.910
6213	Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko	25.843.694.000	11.648.888.981
6214	Pengelolaan Kas dan Pembiayaan Negara	5.485.984.000	1.964.801.457
6215	Penyelenggaraan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Negara	3.702.636.000	1.359.656.530
6216	Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif	9.572.903.000	5.896.351.239
	Jumlah Belanja Program CD	88.348.813.000	33.260.166.117
WA	Program Dukungan Manajemen		
4711	Legislasi dan Litigasi	176.126.000	57.027.885
4715	Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum	859.735.852.000	503.285.256.415
4718	Pengelolaan komunikasi dan informasi publik	6.507.858.000	2.688.333.287
4719	Pengelolaan Organisasi dan SDM	153.546.511.000	128.688.169.790
4722	Pengelolaan Risiko, Pegendalian, dan Pengawasan Internal	1.292.004.000	555.579.992
4725	Pengelolaan Sistem informasi dan teknologi	449.716.874.000	388.167.788.672
6990	Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission) Dukungan Penyelenggaraan Kegiatan Badan Pengarah Papua	45.146.419.000	25.777.950.901
	Jumlah Belanja Program WA	1.516.139.644.000	1.049.220.106.942
	Jumlah Rupiah Murni	1.604.488.457.000	1.082.480.273.059
02	BADAN LAYANAN UMUM		
WA	Program Dukungan Manajemen		
4712	Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission)	25.148.875.328.000	22.282.861.183.635
4713	Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission)	119.278.406.000	88.627.856.740
4714	Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission)	991.727.637.000	956.150.314.226
	Jumlah Belanja BLU	26.259.881.371.000	23.327.639.354.601
19	SALDO AWAL BLU		
WA	Program Dukungan Manajemen		
4712	Pelaksanaan Tugas Khusus (Special Mission)	30.243.227.985.000	27.539.703.221.455
	Jumlah Saldo Awal BLU	30.243.227.985.000	27.539.703.221.455
	Jumlah	58.107.597.813.000	51.949.822.849.115

2. Belanja menurut Jenis Fungsi

Belanja Direktorat Jenderal Perbendaharaan menurut Fungsi terdiri dari 2 (dua) Fungsi, yaitu Pelayanan Umum dan Ekonomi. Adapun rincian dari Belanja Menurut Fungsi sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel B. 13 Realisasi Belanja Menurut Fungsi Tahun 2025 (Rupiah)

FUNGSI	ANGGARAN	REALISASI BRUTO
Pelayanan Umum	56.996.591.770.000	50.905.044.678.149
Ekonomi	1.111.006.043.000	1.044.778.170.966
Jumlah	58.107.597.813.000	51.949.822.849.115

3. Belanja menurut Jenis Belanja

Realisasi Belanja Direktorat Jenderal Perbendaharaan menurut Jenis Belanja terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Belanja Modal.

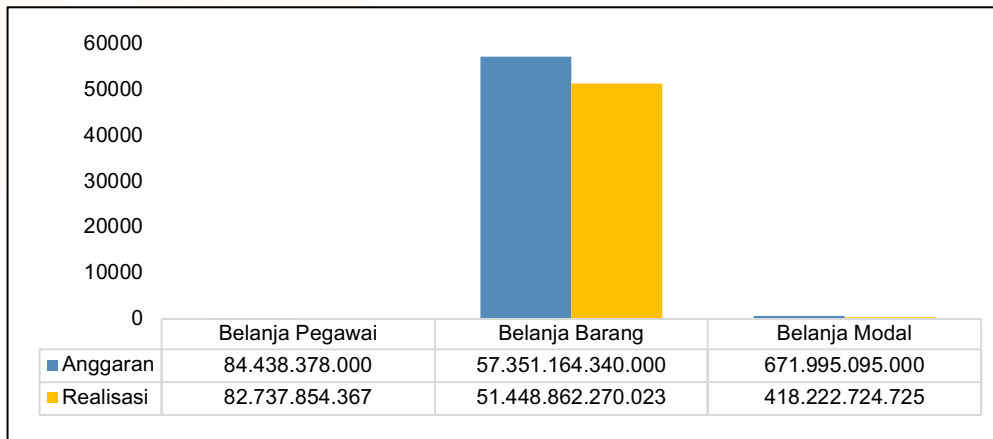
Rincian anggaran dan realisasi belanja pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan per tanggal 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel B. 14 Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja Tahun 2025 (Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2025		NAIK/ TURUN %
	ANGGARAN	REALISASI	
Belanja Pegawai	84.438.378.000	82.750.045.517	98,00
Belanja Barang	996.792.949.997	684.779.860.556	68,70
Belanja Modal	523.257.132.000	315.094.027.297	60,22
Jumlah	1.604.488.459.997	1.082.623.933.370	67,47
Belanja Barang-BLU	56.354.371.393.00	50.764.276.251.028	90,08
Belanja Modal-BLU	148.737.963.000	103.128.697.428	69,34
Jumlah BLU	56.503.109.353.003	50.867.404.948.456	90,03
Pengembalian Belanja	-	206.032.711	100,00
Total Belanja	58.107.597.813.000	51.949.822.849.115	89,40

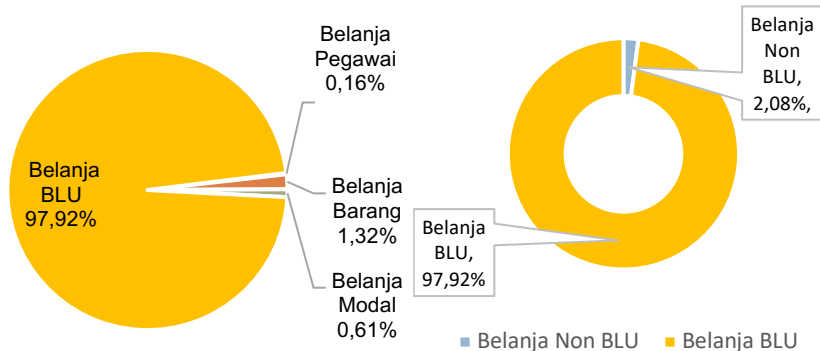
Perbandingan Pagu dan Realisasi Belanja berdasarkan Jenis Belanja untuk Tahun Anggaran 2025 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik B. 1 Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja (BLU dan Non BLU) Tahun 2025 (Rupiah)



Komposisi Realisasi Belanja berdasarkan Jenis Belanja tahun 2025 dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik B. 2 Komposisi Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja Tahun 2025 (persen)



Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terdapat peningkatan realisasi sebesar 54,13 persen. Kenaikan yang signifikan ini terjadi pada Belanja Barang BLU dan Belanja Modal BLU. Perbandingan realisasi belanja Direktorat Jenderal Perbendaharaan sampai dengan 31 Desember 2025 dengan 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel B. 15 Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja Tahun 2025 dan 2024 (Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	NAIK/ TURUN %
Belanja Pegawai	82.750.045.517	84.959.854.493	-2,60%
Belanja Barang	684.779.860.556	795.073.592.876	-13,87%
Belanja Modal	315.094.027.297	482.897.569.371	-34,75%
Jumlah	1.082.623.933.370	1.362.931.016.740	-20,57%
Belanja Barang BLU	50.764.276.251.028	33.705.647.231.950	50,61%
Belanja Modal BLU	103.128.697.428	27.859.484.633	270,17%
Jumlah BLU	50.867.404.948.456	32.343.0885.805.906	-84,27%
Pengembalian Belanja	206.032.711	369.590.696	-44,25%
Jumlah Netto	51.949.822.849.115	33.705.647.231.950	54,13%

B.2.1 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja
Pegawai
Rp82.737.854.367,-

Realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar **Rp82.737.854.367,-** atau **97,99** persen dari pagu. Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah menerapkan kebijakan sentralisasi pembayaran gaji dan tunjangan kinerja pegawai yang dilaksanakan melalui satker Sekretariat Jenderal sebagai unit pelaksana. Kebijakan sentralisasi pembayaran Belanja Pegawai berupa gaji tersebut dilaksanakan berdasarkan KMK Nomor 107/KMK.01/2022 tentang Pelaksanaan Sentralisasi Pembayaran Gaji Pegawai di Lingkungan Kementerian Keuangan, sebagaimana telah diubah dengan KMK Nomor 249/KMK.01/2022 tentang Perubahan atas KMK Nomor 107/KMK.01/2022. Berikut merupakan realisasi Tahun Anggaran 2025.

Tabel B. 16 Realisasi Belanja Pegawai Menurut Akun Tahun 2025 (Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2025		NAIK/ TURUN %
	ANGGARAN	REALISASI	
Belanja Gaji Pokok PPPK	2.601.323.000	2.556.472.800	98,28
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	98.000	40.862	41,70
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	103.155.000	98.670.880	95,65
Belanja Tunjangan Anak PPPK	20.632.000	18.580.880	90,06
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	438.480.000	430.920.000	98,28
Belanja Tunjangan Beras PPPK	101.808.000	101.098.320	99,30
Belanja Uang Makan PPPK	430.236.000	388.389.000	90,27
Belanja Tunjangan Khusus Papua PPPK	11.900.000	5.100.000	42,86
Belanja Uang Makan PNS	47.050.320.000	46.000.259.025	97,77
Belanja Uang Lembur PPPK	370.128.000	370.113.000	100,00
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	343.404.000	227.521.000	66,25
Belanja Uang Lembur	32.964.715.000	32.552.289.300	98,75
Belanja Tunj. PPh PNS	2.179.000	590.450	27,10
Jumlah Belanja Pegawai (Bruto)	84.438.378.000	82.750.045.517	98,00
Pengembalian Belanja Pegawai		12.191.150	
Total Belanja Pegawai	84.438.378.000	82.737.854.367	97,99

Realisasi belanja pegawai sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dan per tanggal 31 Desember 2024 masing-masing sebesar **Rp82.737.854.367,-** dan **Rp84.954.829.673,-**. Realisasi belanja pegawai sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 2,61 persen dari realisasi belanja sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Penurunan tersebut terjadi

pada Belanja Tunjangan Khusus Papua PPPK karena adanya pergeseran pegawai PPPK dari Papua Barat ke Wilayah Non Papua, kemudian ada Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) menurun karena pembayaran Sekretaris Eksekutif BPP yang tidak terserap sebab restrukturisasi BPP pada Tahun 2025, dan Belanja Uang Lembur menurun karena penurunan jumlah pegawai dibanding TA 2024.

Berikut merupakan perbandingan antara realisasi Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2025 dengan Tahun Anggaran 2024.

Tabel B. 17 Realisasi Belanja Pegawai Menurut Akun Tahun 2025 - 2024 (Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	NAIK/ TURUN %
Belanja Gaji Pokok PPPK	2.556.472.800	2.396.292.800	6,68
Belanja Pembulatan Gaji PPPK	40.862	36.321	12,50
Belanja Tunjangan Suami/Istri PPPK	98.670.880	89.380.440	10,39
Belanja Tunjangan Anak PPPK	18.580.880	16.082.072	15,54
Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	430.920.000	403.920.000	6,68
Belanja Tunjangan Beras PPPK	101.098.320	92.552.760	9,23
Belanja Uang Makan PPPK	388.389.000	373.885.000	3,88
Belanja Tunjangan Khusus Papua PPPK	5.100.000	6.375.000	(20,00)
Belanja Uang Makan PNS	46.000.259.025	45.370.221.850	1,39
Belanja Uang Lembur PPPK	370.113.000	225.612.000	64,05
Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	227.521.000	488.348.000	(53,41)
Belanja Uang Lembur	32.552.289.300	35.497.148.250	(8,30)
Belanja Tunj. PPh PNS	590.450	-	0
Jumlah Belanja Kotor	82.750.045.517	84.959.854.493	(2,60)
Pengembalian Belanja Pegawai	12.191.150	5.024.820	142,62
Jumlah Belanja	82.737.854.367	84.954.829.673	(2,61)

Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) sebesar Rp227.521.000,- merupakan Pembayaran Tunjangan Kinerja untuk Sekretaris Eksekutif dan Kepala Sekretariat Badan Pengarah Papua. Sedangkan Belanja Tunjangan PPh PNS sebesar Rp590.450,- merupakan tunjangan PPh untuk PPPK di Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Berikut merupakan realisasi Belanja Pegawai per Kanwil Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Tabel B. 18 Realisasi Belanja Pegawai Menurut Kantor Wilayah Tahun 2025 (Rupiah)

KWL	NAMA KANWIL	2025	2024	NAIK/TURUN	NAIK/ TURUN %
000	Kantor Pusat	20.558.775.492	20.144.355.273	414.420.219	2,06
001	Kanwil DJPb Prov. Aceh	2.049.170.000	2.171.481.000	(122.311.000)	(5,63)
002	Kanwil DJPb Prov. Sumatera Utara	3.276.634.000	3.338.414.000	(61.780.000)	(1,85)
003	Kanwil DJPb Prov. Sumatera Barat	1.853.922.300	1.914.690.000	(60.767.700)	(3,17)
004	Kanwil DJPb Prov. Riau	1.219.339.000	1.267.790.000	(48.451.000)	(3,82)
005	Kanwil DJPb Prov. Jambi	1.482.178.000	1.552.033.000	(69.855.000)	(4,50)
006	Kanwil DJPb Prov. Sumatera Selatan	1.705.896.400	1.815.036.000	(109.139.600)	(6,01)
007	Kanwil DJPb Prov. Lampung	1.464.285.150	1.529.139.000	(64.853.850)	(4,24)

KWL	NAMA KANWIL	2025	2024	NAIK/TURUN	NAIK/ TURUN %
008	Kanwil DJPb Prov. Bengkulu	1.268.034.000	1.379.317.850	(111.283.850)	(8,07)
009	Kanwil DJPb Prov. Bangka Belitung	910.027.000	968.081.000	(58.054.000)	(6,00)
010	Kanwil DJPb Prov. Banten	1.282.769.000	1.278.414.000	4.355.000	0,34
011	Kanwil DJPb Prov. Dki Jakarta	5.611.682.000	5.746.156.000	(134.474.000)	(2,34)
012	Kanwil DJPb Prov. Jawa Barat	3.625.356.000	3.671.804.000	(46.448.000)	(1,26)
013	Kanwil DJPb Prov. Jawa Tengah	4.625.102.000	4.624.650.000	452.000	0,01
014	Kanwil DJPb Prov. Diy Yogyakarta	1.488.023.000	1.517.956.300	(29.933.300)	(1,97)
015	Kanwil DJPb Prov. Jawa Timur	4.318.497.000	4.288.118.000	30.379.000	0,71
016	Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Barat	1.688.474.000	1.794.822.000	(106.348.000)	(5,93)
017	Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Tengah	1.261.847.000	1.278.123.200	(16.276.200)	(1,27)
018	Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Selatan	1.562.341.000	1.743.576.000	(181.235.000)	(10,39)
019	Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Timur	1.285.745.000	1.368.746.000	(83.001.000)	(6,06)
020	Kanwil DJPb Prov. Bali	1.285.761.000	1.378.025.000	(92.264.000)	(6,70)
021	Kanwil DJPb Prov. Nusa Tenggara Barat	1.378.343.000	1.385.839.000	(7.496.000)	(0,54)
022	Kanwil DJPb Prov. Nusa Tenggara Timur	1.582.763.000	1.677.275.000	(94.512.000)	(5,63)
023	Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Selatan	2.626.790.000	2.838.824.000	(212.034.000)	(7,47)
024	Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Tengah	1.228.514.000	1.253.664.000	(25.150.000)	(2,01)
025	Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Tenggara	1.256.272.000	1.373.481.000	(117.209.000)	(8,53)
026	Kanwil DJPb Prov. Gorontalo	921.655.000	956.564.000	(34.909.000)	(3,65)
027	Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Utara	1.408.987.000	1.501.333.000	(92.346.000)	(6,15)
028	Kanwil DJPb Prov. Maluku Utara	908.908.000	984.579.000	(75.671.000)	(7,69)
029	Kanwil DJPb Prov. Maluku	1.174.179.000	1.198.435.000	(24.256.000)	(2,02)
030	Kanwil DJPb Prov. Papua	2.267.994.025	2.557.743.050	(289.749.025)	(11,33)
031	Kanwil DJPb Prov. Kepulauan Riau	1.136.912.000	1.286.227.000	(149.315.000)	(11,61)
032	Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Barat	876.168.000	905.623.000	(29.455.000)	(3,25)
033	Kanwil DJPb Prov. Papua Barat	1.143.184.000	1.194.359.000	(51.175.000)	(4,28)
034	Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Utara	1.003.327.000	1.070.156.000	(66.829.000)	(6,24)
Jumlah Bruto		82.750.045.517	84.959.854.493	(2.216.975.305)	(2,60)
Pengembalian Belanja		12.191.150	5.024.820	7.166.330	142,62
Jumlah Netto		82.737.854.367	84.954.829.673	(2.206.975.306)	(2,60)

B.2.2 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp51.448.862.270.023,- atau 89,71 persen dari pagu. Pada Tahun Anggaran

Belanja Barang
Rp 51.448.862.270.023

2025 terjadi perubahan tren belanja barang karena adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Dimana terdapat pemblokiran anggaran dalam rangka efisiensi untuk memenuhi belanja prioritas nasional.

Tabel B. 19 Realisasi Belanja Barang Menurut Akun Tahun 2025 (Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2025		NAIK/ TURUN %
	ANGGARAN	REALISASI	
Belanja Barang Operasional	224.441.370.000	181.846.244.843	81,02
Belanja Barang Non Operasional	58.653.215.000	22.654.890.007	38,63
Belanja Persediaan	17.439.712.000	9.047.290.262	51,88
Belanja Jasa	117.403.799.000	56.366.126.106	48,01
Belanja Pemeliharaan	428.502.141.000	338.893.980.564	79,09
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	148.796.037.000	75.319.881.774	50,62
Belanja Perjalanan Luar Negeri	1.556.673.000	651.447.000	41,85
Jumlah Belanja Non BLU	996.792.947.000	684.779.860.556	68,70
Belanja Barang BLU	56.354.371.393.000	50.764.276.251.028	90,08
Jumlah Belanja BLU	56.354.371.393.000	50.764.276.251.028	90,08
Pengembalian Belanja		193.841.561	
Jumlah Belanja	57.351.164.340.000	51.448.862.270.023	89,71

Realisasi belanja barang sampai dengan 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp51.448.862.270.023,- dan Rp33.109.966.963.553,-. Realisasi belanja barang sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 mengalami kenaikan sebesar 55,39 persen sebesar dibandingkan realisasi Belanja Barang sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Secara umum beberapa belanja barang mengalami penurunan akibat dari Efisiensi Belanja pada Tahun Anggaran 2025. Namun demikian, terdapat peningkatan realisasi yang pada Belanja Barang BLU sebesar 57,09 persen atau Rp18.449.049.929.755,-

Tabel B. 20 Realisasi Belanja Barang Menurut Akun Tahun 2025 - 2024 (Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	NAIK/ TURUN %
Belanja Barang Operasional	181.846.244.843	183.230.255.333	(0,76%)
Belanja Barang Non Operasional	22.654.890.007	53.633.076.162	(57,76%)
Belanja Persediaan	9.047.290.262	14.112.737.796	(35,89%)
Belanja Jasa	56.366.126.106	104.722.234.589	(46,18%)
Belanja Pemeliharaan	338.893.980.564	323.328.061.997	4,81%
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	75.319.881.774	114.364.977.399	(34,14%)
Belanja Perjalanan Luar Negeri	651.447.000	1.682.249.600	(61,28%)
Jumlah Belanja Barang Non BLU	684.779.860.556	795.073.592.876	(13,87%)
Belanja Barang BLU	50.764.276.251.028	32.315.226.321.273	57,09%
Jumlah Belanja BLU	50.764.276.251.028	32.315.226.321.273	57,09%
Pengembalian Belanja	193.841.561	332.950.596	(41,78%)
Jumlah Belanja	51.448.862.270.023	33.109.966.963.553	55,39%

Berikut merupakan Belanja Barang per Kanwil Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Tabel B. 21 Realisasi Belanja Barang Per Kanwil Tahun 2025 - 2024 (Rupiah)

KANWIL	NAMA KANWIL	2025	2024	NAIK/TURUN	NAIK/TURUN %
000	Instansi Pusat	51.188.451.764.219	32.743.963.820.025	18.444.483.634.994	56.33%
001	Kanwil DJPb Prov. Aceh	9.684.947.539	13.494.691.327	(3.809.743.788)	(28.23%)
002	Kanwil DJPb Prov. Sumatera Utara	10.884.130.363	16.138.669.184	(5.254.538.821)	(32.56%)
003	Kanwil DJPb Prov. Sumatera Barat	7.199.471.351	10.434.667.673	(3.235.196.322)	(31.00%)
004	Kanwil DJPb Prov. Riau	4.675.003.778	7.246.693.892	(2.571.690.114)	(35.49%)
005	Kanwil DJPb Prov. Jambi	6.050.588.704	8.508.227.584	(2.457.638.880)	(28.89%)
006	Kanwil DJPb Prov. Sumatera Selatan	5.970.686.433	8.730.531.953	(2.759.845.520)	(31.61%)
007	Kanwil DJPb Prov. Lampung	5.216.313.656	8.113.665.301	(2.897.351.645)	(35.71%)
008	Kanwil DJPb Prov. Bengkulu	5.049.021.325	6.772.644.688	(1.723.623.363)	(25.45%)
009	Kanwil DJPb Prov. Bangka Belitung	3.637.315.468	5.001.234.662	(1.363.919.194)	(27.27%)
010	Kanwil DJPb Prov. Banten	4.905.541.631	6.551.105.455	(1.645.563.824)	(25.12%)
011	Kanwil DJPb Prov. Dki Jakarta	13.997.922.263	24.580.648.250	(10.582.725.987)	(43.05%)
012	Kanwil DJPb Prov. Jawa Barat	15.321.061.629	22.312.920.905	(6.991.859.276)	(31.34%)
013	Kanwil DJPb Prov. Jawa Tengah	15.741.975.564	23.699.392.661	(7.957.417.097)	(33.58%)
014	Kanwil DJPb Prov. Diy Yogyakarta	4.007.725.357	6.148.238.872	(2.140.513.515)	(34.82%)
015	Kanwil DJPb Prov. Jawa Timur	16.342.630.444	24.046.855.842	(7.704.225.398)	(32.04%)
016	Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Barat	6.268.457.587	9.617.364.264	(3.348.906.677)	(34.82%)
017	Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Tengah	5.474.518.763	7.968.101.506	(2.493.582.743)	(31.29%)
018	Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Selatan	6.161.259.049	9.516.017.630	(3.354.758.581)	(35.25%)
019	Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Timur	4.986.199.865	6.944.500.278	(1.958.300.413)	(28.20%)
020	Kanwil DJPb Prov. Bali	3.363.978.305	5.064.337.865	(1.700.359.560)	(33.58%)
021	Kanwil DJPb Prov. Nusa Tenggara Barat	5.853.411.028	8.570.469.317	(2.717.058.289)	(31.70%)
022	Kanwil DJPb Prov. Nusa Tenggara Timur	6.393.583.979	9.557.918.708	(3.164.334.729)	(33.11%)
023	Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Selatan	10.138.863.164	14.516.401.517	(4.377.538.353)	(30.16%)
024	Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Tengah	4.870.585.238	7.915.420.101	(3.044.834.863)	(38.47%)

KANWIL	NAMA KANWIL	2025	2024	NAIK/TURUN	NAIK/TURUN %
025	Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Tenggara	5.627.151.164	8.235.119.753	(2.607.968.589)	(31.67%)
026	Kanwil DJPb Prov. Gorontalo	3.540.777.372	5.168.142.468	(1.627.365.096)	(31.49%)
027	Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Utara	5.188.388.712	7.442.251.518	(2.253.862.806)	(30.28%)
028	Kanwil DJPb Prov. Maluku Utara	3.942.291.026	5.830.863.653	(1.888.572.627)	(32.39%)
029	Kanwil DJPb Prov. Maluku	6.095.342.849	8.565.178.692	(2.469.835.843)	(28.84%)
030	Kanwil DJPb Prov. Papua	36.295.827.228	33.539.263.462	2.756.563.766	8.22%
031	Kanwil DJPb Prov. Kepulauan Riau	4.444.751.840	6.806.664.855	(2.361.913.015)	(34.70%)
032	Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Barat	2.827.820.602	4.178.112.851	(1.350.292.249)	(32.32%)
033	Kanwil DJPb Prov. Papua Barat	5.964.798.947	8.309.355.692	(2.344.556.745)	(28.22%)
034	Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Utara	4.288.163.581	6.477.471.149	(2.189.307.568)	(33.80%)
Jumlah Belanja Barang Bruto		51.449.056.111.584	33.110.295.604.949	18.338.760.506.635	55.39%
Pengembalian Belanja		193.841.561	332.950.596	(139.109.035)	(28,23)
Jumlah Belanja Barang Netto		51.448.862.270.023	33.109.966.963.553	18.338.895.306.407	55.39%

B.2.2.1 Belanja Barang BLU

Realisasi belanja barang BLU sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dan per tanggal 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp50.764.213.878.628,-** dan **Rp32.315.226.321.273,-**. Realisasi belanja barang BLU sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 mengalami peningkatan sebesar **57,09 persen** dibandingkan realisasi belanja barang sampai dengan tanggal 31 Desember 2024. Peningkatan yang signifikan pada Belanja Barang BLU pada Badan Pengelola Dana Perkebunan, dimana hal tersebut disebabkan antara lain oleh.

a. Lonjakan Pembayaran Insentif Biodiesel dan Penerapan mandatori biodiesel B40 mulai 1 Januari 2025

Meningkatnya pembayaran insentif biodiesel seiring dengan kenaikan selisih Harga Indeks Pasar (HIP) biodiesel terhadap HIP minyak solar, serta implementasi kebijakan mandatori biodiesel B40 yang efektif berlaku mulai 1 Januari 2025. Penerapan B40 mendorong peningkatan volume penyaluran biodiesel yang dibayarkan insentifnya, sehingga berdampak langsung pada kenaikan belanja insentif yang dicatat sebagai Belanja Barang.

b. Peningkatan penyaluran PSR dan sarana prasarana sawit

Pada TA 2025, BPDP melakukan peningkatan penyaluran dana untuk program strategis lainnya, antara lain peremajaan perkebunan sawit rakyat, dukungan sarana dan prasarana perkebunan, serta pengembangan sumber daya manusia, yang seluruhnya berkontribusi terhadap kenaikan Belanja Barang. BPDP juga meningkatkan penyaluran dana untuk program strategis lainnya,

Belanja Barang BLU
Rp50.764.213.878.628

antara lain peremajaan perkebunan sawit rakyat, dukungan sarana dan prasarana perkebunan, serta pengembangan sumber daya manusia, yang seluruhnya berkontribusi terhadap kenaikan Belanja Barang.

Tabel B. 22 Realisasi Belanja Barang-BLU Tahun 2025 - 2024 (Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	NAIK/ TURUN %
Belanja Gaji dan Tunjangan	179.128.350.598	166.135.774.270	7,82
Belanja Barang	15.092.438.926	13.298.571.765	13,49
Belanja Jasa	50.107.403.396	57.769.568.825	(13,26)
Belanja Pemeliharaan	2.740.196.668	1.945.454.637	40,85
Belanja Perjalanan	25.942.272.776	31.493.137.085	(17,63)
Belanja Pengelolaan Dana Perkebunan	49.669.014.319.743	31.385.000.472.368	58,26
Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi - BLU	604.939.788	486.266.692	24,40
Belanja Barang Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada	652.331.203	659.092.766.431	(99,90)
Belanja Pengelolaan Dana Program Lingkungan Hidup	820.931.625.530	-	
Jumlah Belanja	50.764.213.878.628	32.315.222.012.073	57,09

Terdapat 3 (tiga) Badan Layanan Umum pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan, berikut merupakan rincian realisasi Belanja Barang BLU per Satuan Kerja.

Tabel B. 23 Realisasi Belanja Barang-BLU Menurut Satuan Kerja BLU Tahun 2025 (Rupiah)

SATUAN KERJA	PAGU	REALISASI 31 DESEMBER 2025	REALISASI (%)
Badan Pengelolaan Dana Perkebunan (BPDP)	55.285.306.313.000	49.757.823.256.051	90,00
Pusat Investasi Pemerintah (PIP)	117.833.406.000	87.190.538.216	73,99
Baadan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH)	951.231.674.000	919.200.084.361	96,63
Jumlah Belanja Barang BLU	56.354.371.393.000	50.764.213.878.628	90,08

B.2.3 Belanja Modal

Belanja Modal Rp
418.222.724.725

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar **Rp418.222.724.725** atau **62,24 persen** dari pagu belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pada Tahun Anggaran 2025 dengan adanya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tanggal 22 Januari 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dimana terdapat pemblokiran anggaran dalam rangka efisiensi untuk memenuhi belanja prioritas nasional, realisasi belanja modal mengalami penurunan dibanding Tahun Anggaran 2024. Berikut merupakan realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025.

Tabel B. 24 Realisasi Belanja Modal Tahun 2025 (Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2025		NAIK/ TURUN %
	ANGGARAN	REALISASI	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	216.325.466.000	169.688.933.689	78,44
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	46.621.455.000	15.758.908.814	33,80
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	174.289.774.000	43.672.602.032	25,06
Belanja Modal Lainnya	85.621.237.000	85.576.635.762	99,95

Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	399.200.000	396.947.000	99,44
Jumlah Belanja Modal Non BLU	523.257.132.000	315.094.027.297	60,22
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU	38.855.982.000	36.682.246.263	94,41
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - BLU	19.344.276.000		0,00
Belanja Modal Lainnya - BLU	90.537.705.000	66.446.451.165	73,39
Jumlah Belanja Modal BLU	148.737.963.000	103.128.697.428	69,34
Pengembalian Belanja	0	0	0
Jumlah Belanja Total	671.995.095.000	418.222.724.725	62,24

Realisasi Belanja Modal sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dan per tanggal 31 Desember 2024 masing-masing sebesar **Rp418.222.724.725,-** dan **Rp510.725.438.724,-** Berikut merupakan Perbandingan Realisasi Belanja Modal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.

Tabel B. 25 Realisasi Belanja Modal Menurut Akun Tahun 2025 - 2024 (Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	NAIK/ TURUN %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	169.688.933.689	230.963.514.698	(26,53)
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin		4.600.000	(100,00)
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	15.758.908.814	53.795.983.266	(70,71)
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	43.672.602.032	134.615.014.861	(67,56)
Belanja Modal Lainnya	85.576.635.762	61.876.527.600	38,30
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	396.947.000	1.641.928.946	(75,82)
Jumlah Belanja	315.094.027.297	482.897.569.371	(34,75)
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU	36.682.246.263	13.407.822.426	173,59
Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLU		7.580.158.577	(100,00)
Belanja Modal Lainnya - BLU	66.446.451.165	6.871.503.630	866,99
Jumlah Belanja BLU	103.128.697.428	27.859.484.633	270,17
Pengembalian Belanja	-	31.615.280	
Jumlah Belanja Total	418.222.724.725	510.725.438.724	(18,11)

Realisasi Belanja Modal Tahun Anggaran 2025 dengan nilai besar, antara lain Penambahan Lisensi Perangkat Lunak Server Database OLAP SAKTI sebesar Rp53.649.823.000,-, Peremajaan Server App SAKTI sebesar Rp33.690.368.000,-, Pengadaan *Scale Up* Perangkat Server Database OLAP SAKTI Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp28.728.615.252,-, dan Pengadaan Peremajaan Server Database dan Server Pengembangan MPN G3 sebesar Rp18.277.999.999,-.

Berikut merupakan Belanja Modal per Kanwil Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

Tabel B. 26 Realisasi Belanja Modal Menurut Akun Tahun 2025 (Rupiah)

KANWIL	NAMA KANWIL	2025	2024	NAIK/TURUN	NAIK/ TURUN %
000	Kantor Pusat	329.049.790.075	284.932.939.555	44.116.850.520	15,48
001	Kanwil DJPb Prov. Aceh	2.446.602.148	7.022.837.507	(4.576.235.359)	(65,16)
002	Kanwil DJPb Prov. Sumatera Utara	2.930.690.377	9.248.738.273	(6.318.047.896)	(68,31)
003	Kanwil DJPb Prov. Sumatera Barat	2.264.272.234	4.507.864.152	(2.243.591.918)	(49,77)

KANWIL	NAMA KANWIL	2025	2024	NAIK/TURUN	NAIK/ TURUN %
004	Kanwil DJPb Prov. Riau	773.669.990	640.276.150	133.393.840	20,83
005	Kanwil DJPb Prov. Jambi	938.016.114	3.648.268.877	(2.710.252.763)	(74,29)
006	Kanwil DJPb Prov. Sumatera Selatan	1.258.862.050	10.208.010.219	(8.949.148.169)	(87,67)
007	Kanwil DJPb Prov. Lampung	406.812.977	620.233.240	(213.420.263)	(34,41)
008	Kanwil DJPb Prov. Bengkulu	1.264.080.134	2.039.715.469	(775.635.335)	(38,03)
009	Kanwil DJPb Prov. Bangka Belitung	416.056.182	1.414.227.344	(998.171.162)	(70,58)
010	Kanwil DJPb Prov. Banten	597.624.669	2.245.740.280	(1.648.115.611)	(73,39)
011	Kanwil DJPb Prov. Dki Jakarta	856.237.346	3.973.879.784	(3.117.642.438)	(78,45)
012	Kanwil DJPb Prov. Jawa Barat	8.538.534.780	9.052.354.352	(513.819.572)	(5,68)
013	Kanwil DJPb Prov. Jawa Tengah	7.546.447.708	12.571.868.994	(5.025.421.286)	(39,97)
014	Kanwil DJPb Prov. Diy Yogyakarta	2.747.635.090	6.146.935.929	(3.399.300.839)	(55,30)
015	Kanwil DJPb Prov. Jawa Timur	4.875.986.201	7.054.002.741	(2.178.016.540)	(30,88)
016	Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Barat	1.877.149.899	3.042.057.612	(1.164.907.713)	(38,29)
017	Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Tengah	510.671.797	3.026.906.286	(2.516.234.489)	(83,13)
018	Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Selatan	2.121.505.563	6.325.185.032	(4.203.679.469)	(66,46)
019	Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Timur	2.696.243.203	5.845.873.377	(3.149.630.174)	(53,88)
020	Kanwil DJPb Prov. Bali	1.596.982.931	2.173.342.672	(576.359.741)	(26,52)
021	Kanwil DJPb Prov. Nusa Tenggara Barat	1.832.662.411	5.557.453.373	(3.724.790.962)	(67,02)
022	Kanwil DJPb Prov. Nusa Tenggara Timur	1.821.221.414	2.043.848.341	(222.626.927)	(10,89)
023	Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Selatan	2.873.943.747	7.445.598.923	(4.571.655.176)	(61,40)
024	Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Tengah	1.549.568.526	29.914.887.406	(28.365.318.880)	(94,82)
025	Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Tenggara	1.319.174.815	4.293.374.112	(2.974.199.297)	(69,27)
026	Kanwil DJPb Prov. Gorontalo	1.046.444.010	196.751.400	849.692.610	431,86
027	Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Utara	1.236.137.132	1.835.180.891	(599.043.759)	(32,64)
028	Kanwil DJPb Prov. Maluku Utara	964.312.121	4.123.762.379	(3.159.450.258)	(76,62)
029	Kanwil DJPb Prov. Maluku	3.659.057.931	1.668.040.888	1.991.017.043	119,36
030	Kanwil DJPb Prov. Papua	13.551.048.155	32.590.174.939	(19.039.126.784)	(58,42)
031	Kanwil DJPb Prov. Kepulauan Riau	1.041.251.221	2.216.751.342	(1.175.500.121)	(53,03)
032	Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Barat	915.472.000	3.446.729.608	(2.531.257.608)	(73,44)
033	Kanwil DJPb Prov. Papua Barat	3.388.143.450	3.896.308.792	(508.165.342)	(13,04)
034	Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Utara	7.310.416.324	25.755.318.485	(18.444.902.161)	(71,62)
Jumlah		418.222.724.725	510.725.438.724	(92.502.713.999)	(18,11)

B.2.3.1 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dan per tanggal 31 Desember 2024 masing-masing sebesar

Belanja Modal Gedung dan
Bangunan Rp
59.431.510.846

Rp59.431.510.846,- dan Rp188.389.834.197,-. Realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 mengalami **penurunan** sebesar **68,45 persen** dibandingkan realisasi per tanggal 31 Desember 2024 karena penerapan kebijakan efisiensi anggaran pada TA 2025.

Tabel B. 27 Realisasi Belanja Modal dan Bangunan Tahun 2025 - 2024 (Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	NAIK/ TURUN %
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	15.758.908.814	53.795.983.266	(70,71)
Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	43.672.602.032	134.615.014.861	(67,56)
Jumlah Belanja Bruto	59.431.510.846	188.410.998.127	(68,46)
Pengembalian Belanja		21.163.930	(100,00)
Jumlah Belanja Netto	59.431.510.846	188.389.834.197	(68,45)

Realisasi Belanja Modal Gedung dan bangunan Tahun Anggaran 2025 dengan nilai besar antara lain, untuk Biaya Pekerjaan Fisik Konstruksi pada Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Utara sebesar Rp6.535.257.000,-, Biaya Konstruksi Fisik pada KPPN Wamena Rp3.435.940.379,-, Biaya Konstruksi Fisik Rehabilitasi Rumah Negara Komplek Anggaran Margaluyu I pada Kanwil DJPb Prov. Jawa Barat sebesar Rp2.606.385.815,-, dan Biaya Kontruksi Fisik pada KPPN Kediri sebesar Rp1.138.214.400,-.

Berikut merupakan rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan (termasuk Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan) per Kantor Wilayah DJPb.

Tabel B. 28 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025 - 2024 (Rupiah)

KANWIL	NAMA KANWIL	2025	2024	NAIK/TURUN	%
000	Instansi Pusat	4.149.954.643	18.591.210.689	(14.441.256.046)	(77,68)
001	Kanwil DJPb Prov. Aceh	1.356.793.360	4.844.709.166	(3.487.915.806)	(71,99)
002	Kanwil DJPb Prov. Sumatera Utara	1.545.816.508	5.501.928.582	(3.956.112.074)	(71,90)
003	Kanwil DJPb Prov. Sumatera Barat	1.502.784.001	2.471.170.400	(968.386.399)	(39,19)
004	Kanwil DJPb Prov. Riau	-	148.800.000	(148.800.000)	(100)
005	Kanwil DJPb Prov. Jambi	452.666.000	1.471.825.160	(1.019.159.160)	(69,24)
006	Kanwil DJPb Prov. Sumatera Selatan	194.500.000	8.644.252.186	(8.449.752.186)	(97,75)
008	Kanwil DJPb Prov. Bengkulu	516.223.000	1.045.776.551	(529.553.551)	(50,64)
009	Kanwil DJPb Prov. Bangka Belitung	-	1.035.777.591	(1.035.777.591)	(100)
010	Kanwil DJPb Prov. Banten	213.600.000	1.572.992.704	(1.359.392.704)	(86,42)
011	Kanwil DJPb Prov. Dki Jakarta	498.800.400	1.459.299.077	(960.498.677)	(65,82)
012	Kanwil DJPb Prov. Jawa Barat	7.068.715.003	4.698.810.494	2.369.904.509	50,44
013	Kanwil DJPb Prov. Jawa Tengah	4.531.873.394	9.761.636.831	(5.229.763.437)	(53,57)
014	Kanwil DJPb Prov. Diy Yogyakarta	1.288.948.740	5.653.830.076	(4.364.881.336)	(77,20)
015	Kanwil DJPb Prov. Jawa Timur	3.805.539.520	5.343.011.286	(1.537.471.766)	(28,78)
016	Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Barat	903.725.255	1.437.035.506	(533.310.251)	(37,11)
017	Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Tengah	-	2.104.310.999	(2.104.310.999)	(100)
018	Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Selatan	973.188.060	3.921.792.283	(2.948.604.223)	(75,19)

KANWIL	NAMA KANWIL	2025	2024	NAIK/TURUN	%
019	Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Timur	1.708.148.294	3.390.389.269	(1.682.240.975)	(49,62)
020	Kanwil DJPb Prov. Bali	695.935.600	850.456.500	(154.520.900)	(18,17)
021	Kanwil DJPb Prov. Nusa Tenggara Barat	419.394.946	4.438.495.318	(4.019.100.372)	(90,55)
022	Kanwil DJPb Prov. Nusa Tenggara Timur	1.310.614.760	1.302.616.520	7.998.240	0,61
023	Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Selatan	1.207.314.346	5.281.043.293	(4.073.728.947)	(77,14)
024	Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Tengah	753.978.000	26.226.737.889	(25.472.759.889)	(97,13)
025	Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Tenggara	638.362.557	3.297.286.012	(2.658.923.455)	(80,64)
026	Kanwil DJPb Prov. Gorontalo	79.939.000	-	79.939.000	
027	Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Utara	559.448.000	601.819.955	(42.371.955)	(7,04)
028	Kanwil DJPb Prov. Maluku Utara	-	3.331.163.292	(3.331.163.292)	(100)
029	Kanwil DJPb Prov. Maluku	1.622.220.761	823.039.000	799.181.761	97,10
030	Kanwil DJPb Prov. Papua	11.156.195.416	26.676.866.160	(15.520.670.744)	(58,18)
031	Kanwil DJPb Prov. Kepulauan Riau	199.938.750	1.868.308.522	(1.668.369.772)	(89,30)
032	Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Barat	232.000.000	2.771.986.697	(2.539.986.697)	(91,63)
033	Kanwil DJPb Prov. Papua Barat	2.882.480.000	2.330.276.992	552.203.008	23,70
034	Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Utara	6.962.412.532	25.491.179.197	(18.528.766.665)	(72,69)
Jumlah		59.431.510.846	188.389.834.197	(128.958.323.351)	(68,45)

B.2.3.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Rp169.688.933.689

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dan per tanggal 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp169.688.933.689 dan Rp230.953.663.348,-. Realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 mengalami **penurunan** sebesar **26,53 persen** dibandingkan realisasi per tanggal 31 Desember 2024 karena penerapan kebijakan efisiensi anggaran pada TA 2025.

Tabel B. 29 Realisasi Belanja Modal dan Bangunan Tahun 2025 - 2024 (Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	NAIK/ TURUN %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	169.688.933.689	230.963.514.698	(26,53%)
Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	0	4.600.000	(100,00%)
Jumlah Belanja Bruto	169.688.933.689	230.967.514.698	(26,53%)
Pengembalian Belanja		10.451.350	(100,00%)
Jumlah Belanja Netto	169.688.933.689	230.957.663.348	(26,53%)

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2025 dengan nilai besar antara lain, untuk Peremajaan Server App SAKTI sebesar Rp33.690.367.577,-, Biaya Scaleup Perangkat Server Database OLAP SAKTI Rp28.728.615.252,-, dan Biaya Peremajaan Server App MPN sebesar Rp18.277.999.999,-.

Berikut merupakan rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin (termasuk Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin) per Kantor Wilayah DJPb.

Tabel B. 30 Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2025 - 2024 (Rupiah)

KANWIL	NAMA KANWIL	2025	2024	NAIK/TURUN	%
000	Instansi Pusat	136.194.502.242	176.939.506.233	(40.745.003.991)	(23,03%)
001	Provinsi Aceh	1.089.808.788	1.964.174.341	(874.365.553)	(44,52%)
002	Provinsi Sumatera Utara	1.384.873.869	3.746.809.691	(2.361.935.822)	(63,04%)
003	Provinsi Sumatera Barat	761.488.233	2.036.693.752	(1.275.205.519)	(62,61%)
004	Provinsi Riau	773.669.990	491.476.150	282.193.840	57,42%
005	Provinsi Jambi	485.350.114	2.176.443.717	(1.691.093.603)	(77,70%)
006	Provinsi Sumatera Selatan	1.064.362.050	1.563.758.033	(499.395.983)	(31,94%)
007	Provinsi Lampung	406.812.977	620.233.240	(213.420.263)	(34,41%)
008	Provinsi Bengkulu	747.857.134	993.938.918	(246.081.784)	(24,76%)
009	Provinsi Bangka Belitung	416.056.182	378.449.753	37.606.429	9,94%
010	Provinsi Banten	384.024.669	672.747.576	(288.722.907)	(42,92%)
011	Provinsi Dki Jakarta	357.436.946	2.116.868.707	(1.759.431.761)	(83,11%)
012	Provinsi Jawa Barat	1.469.819.777	4.353.543.858	(2.883.724.081)	(66,24%)
013	Provinsi Jawa Tengah	3.014.574.314	2.810.232.163	204.342.151	7,27%
014	Provinsi Diy Yogyakarta	1.458.686.350	493.105.853	965.580.497	195,82%
015	Provinsi Jawa Timur	1.070.446.681	1.624.455.855	(554.009.174)	(34,10%)
016	Provinsi Kalimantan Barat	973.424.644	1.605.022.106	(631.597.462)	(39,35%)
017	Provinsi Kalimantan Tengah	510.671.797	922.595.287	(411.923.490)	(44,65%)
018	Provinsi Kalimantan Selatan	1.148.317.503	2.403.392.749	(1.255.075.246)	(52,22%)
019	Provinsi Kalimantan Timur	988.094.909	1.211.267.162	(223.172.253)	(18,42%)
020	Provinsi Bali	504.100.331	1.322.886.172	(818.785.841)	(61,89%)
021	Provinsi Nusa Tenggara Barat	1.413.267.465	1.118.958.055	294.309.410	26,30%
022	Provinsi Nusa Tenggara Timur	510.606.654	741.231.821	(230.625.167)	(31,11%)
023	Provinsi Sulawesi Selatan	1.666.629.401	2.164.555.630	(497.926.229)	(23,00%)
024	Provinsi Sulawesi Tengah	795.590.526	3.688.149.517	(2.892.558.991)	(78,43%)
025	Provinsi Sulawesi Tenggara	680.812.258	996.088.100	(315.275.842)	(31,65%)
026	Provinsi Gorontalo	966.505.010	196.751.400	769.753.610	391,23%
027	Provinsi Sulawesi Utara	676.689.132	1.233.360.936	(556.671.804)	(45,13%)
028	Provinsi Maluku Utara	964.312.121	792.599.087	171.713.034	21,66%
029	Provinsi Maluku	2.036.837.170	845.001.888	1.191.835.282	141,05%
030	Provinsi Papua	2.394.852.739	5.880.008.779	(3.485.156.040)	(59,27%)
031	Provinsi Kepulauan Riau	841.312.471	348.442.820	492.869.651	141,45%
032	Provinsi Sulawesi Barat	683.472.000	674.742.911	8.729.089	1,29%
033	Provinsi Papua Barat	505.663.450	1.566.031.800	(1.060.368.350)	(67,71%)
034	Provinsi Kalimantan Utara	348.003.792	264.139.288	83.864.504	31,75%
TOTAL		169.688.933.689	230.957.663.348	(61.268.729.659)	(26,53%)

B.2.3.3 Belanja Modal Lainnya

Belanja Modal Lainnya
Rp85.973.582.762

Realisasi Belanja Modal Lainnya sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dan per tanggal 31 Desember 2024 masing-masing sebesar **Rp85.973.582.762,-** dan **Rp63.518.456.546,-**. Realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 mengalami peningkatan sebesar **26,12 persen** dibandingkan realisasi per tanggal 31 Desember 2024.

Tabel B. 31 Realisasi Belanja Modal Lainnya Tahun 2025 - 2024 (Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Lainnya	85.576.635.762	61.876.527.600	38,30
Belanja Penambahan Nilai Aset Tetap Lainnya dan/atau Aset Lainnya	396.947.000	1.641.928.946	(75,82)
Belanja Modal Lainnya Bruto	85.576.635.762	63.518.456.546	26,12
Pengembalian Belanja	0	0	
Jumlah Belanja Modal Lainnya	85.973.582.762	63.518.456.546	26,12

Belanja Modal Lainnya pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan berupa pembelian Penambahan Lisensi Perangkat Lunak Server Database OLAP SAKTI sebesar Rp53.649.822.552,- dan Lisensi DB Security SAKTI sebesar Rp31.926.813.210,- pada satker Kantor Pusat DJPb serta renovasi pada satker kantor vertikal lingkup DJPb.

Berikut merupakan rincian Belanja Modal Lainnya per Kantor Wilayah DJPb:

Tabel B. 32 Realisasi Belanja Modal Lainnya Menurut Kantor Wilayah Tahun 2025 – 2024 (Rupiah)

KANWIL	NAMA KANWIL	2025	2024	NAIK/TURUN	NAIK/ TURUN%
000	Instansi Pusat	85.576.635.762	61.542.738.000	24.033.897.762	28,08
001	Kanwil DJPb Prov. Aceh	-	213.954.000	(213.954.000)	
011	Kanwil DJPb Prov. Dki Jakarta	-	397.712.000	(397.712.000)	
015	Kanwil DJPb Prov. Jawa Timur	-	86.535.600	(86.535.600)	
019	Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Timur	-	1.244.216.946	(1.244.216.946)	
020	Kanwil DJPb Prov. Bali	396.947.000	-	396.947.000	100
030	Kanwil DJPb Prov. Papua	-	33.300.000	(33.300.000)	
Jumlah Belanja Netto		85.973.582.762	63.518.456.546	22.455.126.216	26,12

B.2.3.4 Belanja Modal Peralatan dan Mesin – BLU

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU
36.682.246.263

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dan per tanggal 31 Desember 2024 masing-masing sebesar **Rp36.682.246.263,-** dan **Rp13.407.822.426,-**. Realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 mengalami peningkatan sebesar **173,59 persen** dibandingkan realisasi per tanggal 31 Desember 2024.

Tabel B. 33 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin-BLU Tahun 2025 - 2024 (Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	NAIK/ TURUN %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLU	36.682.246.263	13.407.822.426	173,59
Jumlah Belanja	36.682.246.263	13.407.822.426	173,59
Pengembalian Belanja	0	0	
Jumlah Belanja	36.682.246.263	13.407.822.426	173,59

Peningkatan tersebut berasal dari pengadaan meja kerja dan laptop dalam rangka penambahan dan penggantian barang yang telah rusak, serta untuk menunjang produktivitas kerja dan fleksibilitas lokasi kerja pada BLU BPDP. Pada BLU BPDH terdapat peningkatan pembelian Pompa Portable, Selang, Mesin Potong dan *Backpack Pump*.

Berikut merupakan rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin - BLU per Badan Layanan Umum.

Tabel B. 34 Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin-BLU menurut Satuan Kerja Tahun 2025-2024 (Rupiah)

KANWIL	SATKER	2025	2024	NAIK/TURUN	NAIK/TURUN %
000	BPDH	33.555.528.365	10.391.381.875	23.164.146.490	222,92
000	BPDP	1.984.163.634	1.244.360.000	739.803.634	59,45
000	PUSAT INVESTASI PEMERINTAH	1.142.554.264	1.772.080.551	(629.526.287)	(35,52)
	JUMLAH	36.682.246.263	13.407.822.426	23.274.423.837	173,59

B.2.3.4 Belanja Modal Lainnya - BLU

Belanja Modal Lainnya - BLU Rp66.446.451.165

Realisasi Belanja Modal Lainnya - BLU sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 dan per tanggal 31 Desember 2024 masing-masing sebesar **Rp66.446.451.165,-** dan **Rp6.871.503.630,-**. Realisasi sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 mengalami peningkatan sebesar **866,99** persen dibandingkan realisasi per tanggal 31 Desember 2024.

Tabel B. 35 Realisasi Belanja Modal Lainnya-BLU Tahun 2025-2024 (Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	NAIK (TURUN) %
Belanja Modal Lainnya - BLU	66.446.451.165	6.871.503.630	866,99
Jumlah Belanja	66.446.451.165	6.871.503.630	866,99
Pengembalian Belanja	0	0	
Jumlah Belanja	66.446.451.165	6.871.503.630	866,99

Peningkatan tersebut berasal dari pengadaan Biaya Konstruksi Fisik Gedung Surachman pada BPDP serta pengembangan aplikasi pada BPDH, BPDP dan Pusat Investasi Pemerintah.

Berikut merupakan rincian Belanja Modal Lainnya BLU per Badan Layanan Umum.

Tabel B. 36 Realisasi Belanja Modal Lainnya-BLU menurut Satuan Kerja Tahun 2025-2024 (Rupiah)

KANWIL	SATKER	2025	2024	NAIK/TURUN	NAIK/TURUN %
000	BPDH	3.394.701.500	2.484.435.530	910.265.970	36,64
000	BPDP	62.756.985.405	4.099.563.000	58.657.422.405	1.430,82
000	PUSAT INVESTASI PEMERINTAH	294.764.260	287.505.100	7.259.160	2,52
	Jumlah	66.446.451.165	6.871.503.630	59.574.947.535	866,99

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Aset Lancar
Rp24.922.562.298.329,-

ASET LANCAR

Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu dua belas (12) bulan sejak tanggal pelaporan. Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2025 dan 2024 masing-masing sebesar **Rp24.922.562.298.329,-** dan **Rp43.061.951.784.858,-**, turun sebesar **Rp18.139.389.486.529,-** atau 42 persen dari tahun sebelumnya. Penurunan ini didominasi oleh menurunnya saldo belanja dibayar dimuka (prepaid) BLU, berupa saldo dana peremajaan perkebunan serta sarana dan prasarana Perkebunan yang belum disalurkan, semula diakui sebagai prepaid, pada tahun 2025 diakui sebagai dana yang dibatasi penggunaannya.

Kas Lainnya dan Setara
Kas Rp2.328.244.088,-

C.1 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar **Rp2.328.244.088,-** dan **Rp2.053.484.598,-**, naik sebesar Rp274.759.490,- atau sebesar 13,38 persen dari saldo tahun sebelumnya. Kenaikan ini di dominasi oleh perubahan saldo kas lainnya dan setara kas di BLU.

Kas Lainnya dan Setara Kas merupakan kas yang berada di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran yang bukan berasal dari UP/TUP, baik saldo rekening di bank maupun uang tunai. Setara Kas, yaitu investasi jangka pendek yang siap dicairkan menjadi kas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal pelaporan. Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran berasal dari pajak bendahara pengeluaran yang belum disetor dan GUP-Kartu Kredit Pemerintah yang belum dibayarkan ke Bank Penerbit KKP.

Tabel C. 1 Rekapitulasi rincian Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2025-2024 (Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	46.957.966	28.703.248
Kas Lainnya di BLU	2.281.286.122	2.024.781.350
Jumlah	2.328.244.088	2.053.484.598

Rincian saldo masing-masing satuan kerja adalah sebagai berikut.

Tabel C. 2 Rincian Saldo Kas Lainnya dan Setaran Kas Menurut Kantor Wilayah Tahun 2025-2024 (Rupiah)

NAMA KANWIL	2025	2024	NAIK/TURUN	NAIK/TURUN%
Instansi Pusat	2.281.286.122	2.024.781.350	256.504.772	12,67
Kanwil Djpb Prov Sumatera Barat	17.600.000	-	17.600.000	100
Kanwil Djpb Prov Bengkulu	-	600	(600)	(100)
Kanwil Djpb Prov Kalimantan Tengah	-	14.242.248	(14.242.248)	(100)
Kanwil DJPb Prov Sulawesi Selatan	28.880.000	-	28.880.000	100
Kanwil DJPb Prov Sulawesi Tengah	477.966	-	477.966	100
Kanwil DJPb Prov Papua	-	14.460.400	(14.460.400)	(100)
Jumlah	2.328.244.088	2.053.484.598	274.759.490	13,38

Kas Pada BLU
Rp12.043.877.697.341,-

C.2 Kas Pada Badan Layanan Umum

Kas pada Badan Layanan Umum per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp12.043.877.697.341,-** dan **Rp26.288.295.885.004,-**, turun signifikan 54,19 persen yaitu sebesar (Rp14.244.418.187.663),- Penurunan ini disebabkan menurunnya retur pembayaran pada BLU. Kas pada Badan Layanan Umum merupakan kas tunai (yang sudah disahkan BUN maupun yang belum disahkan) dan kas pada rekening Bank yang berada pada Badan Layanan Umum BPD Perkebunan, Pusat Investasi Pemerintah dan BPD Lingkungan Hidup.

Tabel C. 3 Rincian Kas pada Badan Layanan Umum per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

SATKER	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
Badan Pengelola Dana Perkebunan	8.745.437.386.662	23.943.119.153.956
Pusat Investasi Pemerintah	107.386.692.893	48.959.976.559
Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup	3.191.053.617.786	2.296.216.754.489
Jumlah	12.043.877.697.341	26.288.295.885.004

Tabel C. 4 Rincian Kas setiap Badan Layanan Umum per 31 Desember 2025

KETERANGAN	31 DESEMBER 2025
Kas dan Bank - BLU	
Badan Pengelola Dana Perkebunan	1.025.437.386.662
Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup	104,653,617,786
Pusat Investasi Pemerintah	107.386.692.893
Jumlah	1.237.477.697.341
Kas dan Bank BLU Belum Disahkan	
Badan Pengelola Dana Perkebunan	
Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup	
Pusat Investasi Pemerintah	
Jumlah	
Setara kas Lainnya - BLU	
Badan Pengelola Dana Perkebunan	7.720.000.000.000
Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup	3.086.400.000.000
Pusat Investasi Pemerintah	
Jumlah	10.806.400.000.000
Jumlah Total	12.043.877.697.341

Saldo Awal Kas BLU Tahun 2025

Tabel C. 5 Rincian Saldo Awal Kas Badan Layanan Umum

No	Daftar BLU Lingkup Eselon I	Saldo Awal	Kas BLU Yang Digunakan			Ket
			Belanja Barang	Belanja Modal	Pembiayaan	
1.	BPDP	27.539.703.221.445	27.539.703.221.445			
2.	PIP	0	0	0	0	
3.	BPDLH	0	0	0	0	
	Jumlah	27.539.703.221.445	27.539.703.221.445			

Investasi Jangka Pendek-BLU
Rp12.210.494.086.649,-

C.3 Investasi Jangka Pendek – Badan Layanan Umum

Saldo Investasi Jangka Pendek Badan Layanan Umum per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar **Rp12.210.494.086.649,-** dan **Rp14.213.310.755.807,-**. Investasi Jangka Pendek-BLU merupakan pengelolaan kelebihan kas yang belum digunakan dalam kegiatan operasional BLU dengan tujuan memperoleh manfaat ekonomi berupa bunga maupun bagi hasil dan mempunyai karakteristik sebagai berikut:

- a. Investasi dapat dicairkan/dikonversi dalam bentuk uang dalam jangka waktu lebih dari 3 (tiga) sampai dengan 12 bulan;
- b. Investasi memiliki tingkat risiko rendah; dan
- c. Investasi ditujukan dalam rangka manajemen kas.

Saldo Investasi Jangka Pendek pada Badan Layanan Umum terdiri dari:

- a. Saldo Investasi Jangka Pendek pada Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Dana Perkebunan mencakup seluruh Kas dan Bank BLU (yang sudah disahkan BUN) berupa deposito dengan jangka waktu jatuh tempo lebih dari 3 (tiga) bulan s.d. 6 (enam) bulan dan Surat Berharga Negara (SBN) kategori *Available for Sale* (AFS).

Saldo deposito dengan jangka waktu jatuh tempo lebih dari 3 bulan s.d. 6 bulan pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp4.266.000.000.000,- dengan rincian sebagai berikut:

1. KB Bank sebesar Rp3.695.000.000.000,-
2. Bank DKI sebesar Rp571.000.000.000,-.

Sehubungan dengan surat Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor S-469/MK.05/2017 tanggal 5 Juni 2017 hal Persetujuan bagi BLU BPDPKS untuk Melakukan Pengelolaan Dana Dalam Bentuk Investasi Jangka Panjang, BPDPKS melakukan pembelian SBN mulai tahun 2019. Selanjutnya, dengan ditetapkannya BPDPKS menjadi Operator Investasi Pemerintah (OIP) dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 166/KMK.05/2022 tanggal 18 Mei 2022, dimana Pernyataan Kebijakan Investasi Pemerintah (PKIP) untuk BPDPKS selaku OIP dituangkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 167/KMK.05/2022 tanggal 18 Mei 2022, penempatan dana pada SBN terus mengalami peningkatan.

Dalam rangka penempatan dana pada instrument Dalam rangka penempatan dana pada instrument investasi berupa obligasi, Bank Rakyat Indonesia dan Bank Mandiri ditunjuk sebagai bank kustodian. Saldo SBN pada tanggal 31 Desember 2025 adalah senilai Rp5.499.810.755.807,-. Rincian pembelian dan penjualan SUN Pada tahun 2025 adalah sebagai berikut.

- Pembelian SBN AFS seri FR0107 dengan nilai SBN AFS seri FR0107 dengan nilai Rp150M.
 - Pembelian SBN AFS seri FR0056 dengan nilai SBN AFS seri FR0056 dengan nilai Rp240M
 - Pembelian Obligasi Korporasi Bank Mandiri Obligasi Korporasi Bank Mandiri BMRI01BGNCN2 dengan nilai Rp30M
 - Pembelian Pembelian SBN AFS seri FR0107 dengan nilai 29,601M
 - Pembelian Pembelian SBSN seri PBS039 dengan nilai Rp97M
 - Penjualan Penjualan SBN AFS seri FR0082 dengan nilai SBN Rp24M
 - Penjualan Penjualan SBN AFS seri FR0095 dengan nilai SBN Rp203,181M
 - Penjualan Penjualan SBN AFS seri FR0097 dengan nilai Rp50,625M
 - Penjualan Penjualan SBN AFS seri FR0097 dengan nilai Rp203,559M
 - PenjualanPenjualan SBN AFS seri FR0097 dengan nilai Rp35,641M
 - PenjualanPenjualan SBN AFS seri FR0098 dengan nilai Rp141,50M
- b. Nilai Investasi Jangka Pendek-BLU PIP per 31 Desember 2025 sebesar Rp2.445.000.000.000,- berbentuk deposito dengan jangka waktu 12 bulan.

Tabel C. 6 Rincian Investasi Jangka Pendek-BLU per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 (Rupiah)

SATKER	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
Badan Pengelola Dana Perkebunan	9.765.494.086.649	12.184.810.755.807
Pusat Investasi Pemerintah	2.445.000.000.000	2.028.500.000.000
Jumlah	12.210.494.086.649	14.213.310.755.807

C.4 Belanja Dibayar Dimuka (*prepaid*)

Belanja Dibayar Dimuka
Rp28.959.108.007,-

Saldo Belanja Dibayar Di Muka per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar **Rp28.959.108.007,-** dan **Rp2.106.664.901.835,-**. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang/jasa belum diterima seluruhnya.

Nilai saldo belanja dibayar dimuka (*prepaid*) per 31 Desember 2025 **turun Rp2.077.705.793.828,-** atau sebesar **98,63** persen dibandingkan dengan saldo pada 31 Desember 2024. Penurunan secara signifikan ini terjadi karena adanya perpindahan saldo dana peremajaan perkebunan serta sarana dan prasarana perkebunan dalam bentuk uang yang telah disalurkan oleh BPDP tapi belum digunakan oleh pekebun milik Satker BPDP yang semula diakui sebagai belanja dibayar dimuka, menjadi Dana Yang Dibatasi Penggunaannya.

Saldo belanja dibayar dimuka (*prepaid*) per tanggal 31 Desember 2025 semuanya adalah saldo Belanja barang yang dibayar di muka (*prepaid*).

Rekapitulasi Belanja Dibayar Dimuka (*prepaid*) menurut wilayah adalah sebagai berikut.

Tabel C. 7 Saldo Realisasi Belanja Dibayar Dimuka Menurut Kantor Wilayah Tahun 2025 (Rupiah)

NAMA KANWIL	2025	2024	NAIK/TURUN	NAIK/ TURUN %
Badan Pengelola Dana Perkebunan	28.661.689.513	2.106.589.997.838	(2.077.928.308.325)	(98,64)
Pusat Investasi Pemerintah	52.939.583	-	52.939.583	100
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan	192.592.593	-	192.592.593	100
Provinsi Aceh	2.019.749	2.529.635	(509.886)	(20,16)
Kanwil DJPb Prov. Sumatera Utara	-	3.085.000	(3.085.000)	(100,00)
Kanwil DJPb Prov. Sumatera Barat	-	1.150.975	(1.150.975)	(100,00)
Kanwil DJPb Prov. Jawa Tengah	961.250	1.402.987	(441.737)	(31,49)
Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Selatan	2.117.069	3.746.554	(1.629.485)	(43,49)
Kanwil DJPb Prov. Bali	-	5.700.000	(5.700.000)	(100,00)
Kanwil DJPb Prov. Gorontalo	-	1.425.000	(1.425.000)	(100,00)
Kanwil DJPb Prov. Maluku	46.083.333	49.000.000	(2.916.667)	(5,95)
Kanwil DJPb Prov. Kepulauan Riau	-	6.158.929	(6.158.929)	(100,00)
Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Barat	704.917	704.917	-	0,00
Jumlah	28.959.108.007	2.106.664.901.835	(2.077.705.793.828)	(98,63)

Transaksi Saldo Belanja Dibayar Di Muka paling signifikan terdapat pada satker BPDP dengan rincian sebagai berikut:

1. Pengadaan dan perpanjangan/*renewal* lisensi User Sistem Sistem Aplikasi ERP Odoo periode bulan Maret 2025 s.d Februari 2026 dengan nilai Rp340.792.200,-, sehingga sehingga saldo belanja dibayar di muka adalah Rp56.798.700,-.
2. Pengadaan dan perpanjangan/*renewal* lisensi lisensi Zoom periode bulan Maret 2025 s.d Februari 2026 dengan nilai Rp67.932.000,- , sehingga saldo belanja dibayar di muka adalah Rp11.322.000,-.
3. Pengadaan lisensi antivirus BPDP untuk periode 1 tahun / 12 bulan (perpanjangan/*renewal*) Agustus 2025 s.d. Juli 2026 dengan nilai 2025 s.d. jull 2026 dengan nilai Rp59.940.000,-, sehingga saldo belanja dibayar di muka adalah Rp34.965.000,-.
4. Pembayaran Pembayaran pengadaan lisensi Microsoft untuk periode 1 tahun (bulan Februari 2025 s.d. Januari 2026) dengan nilai Rp31.302.000,0-, sehingga saldo belanja dibayar di muka adalah Rp2.608.500,-.
5. Pembayaran atas pengadaan lisensi Chat GPT untuk kebutuhan Kantor Badan Pengelola Dana Perkebunan (bulan juli 2025 s.d. juni 2026) dengan nilai Rp138.000.000,00, sehingga dibayar di muka adalah Rp69.000.000,-.
6. Pembayaran jasa berlangganan data harga (membership KPBN periode bulan Maret 2025 s.d. Februari 2026) dengan nilai Rp25.030.500,-, sehingga nilai belanja dibayar di muka adalah Rp4.171.750,-.
7. Saldo Belanja dibayar di Muka atas Penyaluran dana beasiswa pendidikan periode 2025 yang manfaatnya belum diterima/dinikmati manfaatnya belum diterima/dinikmati seluruhnya/sebagian oleh penerima beasiswa BPDP sebesar Rp28.482.823.563,-.

Pendapatan yang masih harus diterima
Rp116.710.996.014,-

C.5 Pendapatan Yang Masih Harus Diterima

Pendapatan yang masih harus diterima per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp116.710.996.014,-** dan **Rp166.786.059.598,-** Pendapatan yang masih harus diterima merupakan hak pemerintah atas pelayanan yang telah diberikan, namun belum diserahkan tagihannya kepada penerima jasa. Pendapatan Yang Masih Harus Diterima merupakan pendapatan investasi dan pendapatan jasa layanan perbankan yang belum diterima karena belum jatuh tempo.

Tabel C. 8 Rekapitulasi Saldo Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 (Rupiah)

SATKER	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
Badan Pengelola Dana Perkebunan	83.021.381.800	119.130.079.200
Badan Pengelola Dana Bergulir Lingkungan Hidup	16.925.128.356	26.153.553.275
Pusat Investasi Pemerintah	16.762.932.858	21.496.321.123
Kanwil DJPb Jawa Tengah	1.553.000	3.106.000
Kanwil DJPb Prov. Jambi		3.000.000
Jumlah	116.710.996.014	166.786.059.598

Saldo akun tersebut secara signifikan terdapat pada BPDP dengan rincian sebagai berikut:

1. Bunga deposito sebesar Rp27.997.045.662,-
2. Kupon obligasi sebesar Rp54.831.491.135,-

3. Pendapatan Jasa Perbankan sebesar Rp192.845.003,-

Piutang Bukan Pajak
Rp607.365.352,-

C.6 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp607.365.352,-** dan **Rp434.752.276,-**. Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan, namun belum diselesaikan pembayarannya. Saldo Piutang Bukan Pajak berasal dari Piutang PNPB sebesar **Rp252.118.506,-** dan Piutang Lainnya sebesar **Rp355.246.846,-**. Saldo piutang bukan pajak per 31 Desember 2025 **naik** sebesar **39,70** persen dibandingkan saldo pada periode yang sama pada tahun sebelumnya yang seluruhnya dipengaruhi oleh kenaikan dari saldo piutang lainnya.

Tabel C. 9 Rekapitulasi Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 (Rupiah)

NAMA AKUN	2025	2024	NAIK/TURUN	NAIK/ TURUN %
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	252.118.506	252.118.506	-	0,00
Piutang Lainnya	355.246.846	182.633.770	(172.613.076)	(94,51)
Jumlah	607.365.352	434.752.276	(39.133.105)	(39,70)

Rincian saldo piutang penerimaan negara bukan pajak per 31 Desember 2025 menurut **wilayah** adalah sebagai berikut.

Tabel C. 10 Rincian Saldo Piutang PNPB per Wilayah per 31 Desember 2025 (Rupiah)

NAMA KANWIL	2025	2024	NAIK/TURUN	NAIK/ TURUN %
Provinsi Banten	134,577,911	134,577,911		0.00%
Provinsi Kepulauan Riau	117,540,595	117,540,595		0.00%
Jumlah	252.118.506	252.118.506	-	0,00

Rincian saldo piutang lainnya per 31 Desember 2025 menurut **wilayah** adalah sebagai berikut.

Tabel C. 11 Saldo Piutang Bulan Pajak per 31 Desember 2025 menurut Kantor Wilayah (Rupiah)

NAMA KANWIL	2025	2024	NAIK/TURUN	NAIK/ TURUN%
Kantor Pusat	77,658,758	97,466,800	(19,808,042)	(20,32)
Kanwil DJPb Prov. Aceh	37,000	-	37,000	100
Kanwil DJPb Prov. Sumatera Utara	74,000	338,000	(264,000)	(78,11)
Kanwil DJPb Prov. Riau	35,000	-	35,000	100
Kanwil DJPb Prov. Jambi	-	109,000	(109,000)	(100)
Kanwil DJPb Prov. Bangka Belitung	-	226,000	(226,000)	(100)
Kanwil DJPb Prov. Banten	131,123,065	-	131,123,065	100
Kanwil DJPb Prov. DKI Jakarta	372,150	-	372,150	100
Kanwil DJPb Prov. Jawa Barat	3,439,573	37,000	3,402,573	91,96
Kanwil DJPb Prov. Jawa Tengah	113,000	185,000	(72,000)	(38,92)
Kanwil DJPb Prov. DIY Yogyakarta	156,000	37,000	119,000	321,62
Kanwil DJPb Prov. Jawa Timur	143,000	667,300	(524,300)	(75,37)
Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Timur	74,000	37,000	37,000	99,9
Kanwil DJPb Prov. Nusa Tenggara Barat	530,000	-	530,000	100
Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Selatan	70,300	-	70,300	100
Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Tengah	72,000	75,135,000	(75,063,000)	(100)
Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Tenggara	-	385,600	(385,600)	(100)
Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Utara	-	70,000	(70,000)	(100)

NAMA KANWIL	2025	2024	NAIK/TURUN	NAIK/ TURUN%
Kanwil DJPb Prov. Maluku Utara	-	7,940,070	(7,940,070)	(100)
Kanwil DJPb Prov. Kepulauan Riau	35,000	-	35,000	0,1
Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Utara	141,314,000	-	141,314,000	0
Jumlah	355,246,846	182,633,770	172,613,076	94.51%

Penyisihan Piutang Tak Tertagih –Piutang Bukan Pajak Rp384.362.189,-

C.7 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Piutang Bukan Pajak

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih–Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp384.362.189,-** dan **Rp253.031.675,-**. Penyisihan piutang tak tertagih-piutang bukan pajak adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur. adalah sebagai berikut.

Tabel C. 12 Rekapitulasi Kualitas Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2025 (Rupiah)

KUALITAS PIUTANG	NILAI PIUTANG JK PENDEK	% PENYISIHAN	NILAI PENYISIHAN
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Piutang Bukan Pajak			
Lancar	-	0.5%	-
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	384.362.189	100%	384.362.189
Jumlah	384.362.189		384.362.189

Bagian Lancar TP/TGR Rp5.000.000,-

C.8 Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp5.000.000,-** dan **Rp12.000.000,-**. Bagian Lancar Tagihan TP/TGR merupakan Tagihan TP/TGR yang belum diselesaikan pada tanggal neraca yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan atau kurang.

Tabel C. 13 Rekapitulasi Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 (Rupiah)

SATKER	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
KPPN Cirebon	5.000.000	12.000.000
Jumlah	5.000.000	12.000.000

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar TP/TGR Rp25.000,-

C.9 Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih – Bagian Lancar TP/TGR per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp25.000,-** dan **Rp60.000,-**. Penyisihan piutang tak tertagih–Bagian Lancar TP/TGR adalah merupakan estimasi atas ketidaktertagihan piutang jangka pendek yang ditentukan oleh kualitas piutang masing-masing debitur.

Tabel C. 14 Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 (Rupiah)

URAIAN AKUN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2023
Penyisihan Piutang Tak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	25.000	60.000
Jumlah	25.000	60.000

Berikut merupakan informasi saldo penyisihan piutang tak tertagih per satuan kerja.

Tabel C. 15 Rekapitulasi Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih per Wilayah 31 Desember 2025 (Rupiah)

SATKER	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
Provinsi Banten	134.577.911	134.577.911
Provinsi Kepulauan Riau	117.540.595	117.540.595
Jumlah	252.118.506	252.118.506

Piutang dari kegiatan operasional Badan Layanan Umum
Rp931.001.742.106,-

C.10 Piutang dari Kegiatan Operasional Badan Layanan Umum

Saldo Piutang dari kegiatan operasional badan layanan umum per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp931.001.742.106,-** dan **Rp458.136.218.063,-**. Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan namun belum diselesaikan pembayarannya.

Tabel C. 16 Rekapitulasi Saldo Piutang dari kegiatan Operasional Badan Layanan Umum per 30 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 (Rupiah)

SATKER	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
Piutang BLU Pengelola Dana Bergulir	495.075.102.076	443.626.692.738
Piutang BLU Pengelola Dana Lainnya	435.926.640.030	14.509.525.325
Piutang BLU Lainnya atas Bunga Dibayar Dimuka	1.327.154.000	
Jumlah	931.001.742.106	458.136.218.063

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang dari Kegiatan Operasional BLU
Rp427.428.946.870,-

C.11 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari kegiatan Operasional BLU

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang dari kegiatan Operasional BLU per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp427.428.946.870,-** dan **Rp190.632.471.678,-**. Piutang bukan pajak merupakan hak atau pengakuan pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan, namun belum diselesaikan pembayarannya.

Tabel C. 17 Rekapitulasi Saldo Piutang Bukan Pajak per 30 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 (Rupiah)

AKUN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pengelola Dana Bergulir	276.540.614.410	190.513.422.726
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Piutang BLU Pengelola Dana Lainnya	150.888.332.460	119.048.952
Jumlah	427.428.946.870	190.632.471.678

Piutang dari Kegiatan Operasional Non Badan Layanan Umum
Rp1.327.154.000,-

C.12 Piutang dari Kegiatan Non Operasional Badan Layanan Umum

Saldo Piutang dari kegiatan operasional badan layanan umum per tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp1.327.154.000,-** dan **Rp0,-**. Saldo tersebut berasal saldo Bunga Dibayar di Muka milik Satker Badan Pengelola Dana Perkebunan.

C.13 Persediaan

Saldo Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar **Rp15.064.238.831,-** dan **Rp17.143.291.030,-**.

Persediaan
Rp15.064.238.831,-

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan/atau untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada Masyarakat.

Persediaan pada DJPb merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud mendukung kegiatan operasional serta aset lain yang dimaksudkan untuk diserahkan kepada Masyarakat. Keseluruhan nilai persediaan yang disajikan per 31 Desember 2025 dalam kondisi baik dengan menggunakan akun 117111 (Barang Konsumsi), 117113 (Bahan Untuk Pemeliharaan), dan 117127 (Aset Lain-Lain Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat)

Tabel C. 18 Rincian Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 (Rupiah)

PERSEDIAAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
Barang Konsumsi	14.527.356.370	16.644.062.846
Barang untuk Persediaan	471.792.461	499.228.184
Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	65.090.000	-
Jumlah	15.064.238.831	17.143.291.030

Adapun rincian saldo barang konsumsi per kantor wilayah dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel C. 19 rincian saldo barang konsumsi per kantor wilayah per 30 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 (Rupiah)

Kanwil	2025	2024	Naik/Turun	%
Kantor Pusat	3.338.901.010	3.030.120.765	308,780,245	10.19
Provinsi Aceh	589.610.993	720.524.241	(130,913,248)	(18.17)
Provinsi Sumatera Utara	939.454.169	998.676.894	(59,222,725)	(5.93)
Provinsi Sumatera Barat	325.229.685	426.683.526	(101,453,841)	(23.78)
Provinsi Riau	157.022.021	187.244.284	(30,222,263)	(16.14)
Provinsi Jambi	221.106.477	242.426.481	(21,320,004)	(8.79)
Provinsi Sumatera Selatan	285.892.288	399.473.781	(113,581,493)	(28.43)
Provinsi Lampung	359.911.715	370.850.664	(10,938,949)	(2.95)
Provinsi Bengkulu	221.547.631	384.697.672	(163,150,041)	(42.41)
Provinsi Bangka Belitung	214.301.158	234.043.138	(19,741,980)	(8.44)
Provinsi Banten	175.292.530	249.026.603	(73,734,073)	(29.61)
Provinsi DKI Jakarta	1.210.997.376	1.260.421.984	(49,424,608)	(3.92)
Provinsi Jawa Barat	667.970.436	1.037.098.399	(369,127,963)	(35.59)
Provinsi Jawa Tengah	703.584.596	879.593.639	(176,009,043)	(20.01)
Provinsi DIY Yogyakarta	152.726.182	177.337.018	(24,610,836)	(13.88)
Provinsi Jawa Timur	877.526.038	890.209.196	(12,683,158)	(1.42)
Provinsi Kalimantan Barat	261.281.883	370.785.736	(109,503,853)	(29.53)
Provinsi Kalimantan Tengah	223.657.281	260.393.639	(36,736,358)	(14.11)
Provinsi Kalimantan Selatan	309.888.467	355.718.744	(45,830,277)	(12.88)
Provinsi Kalimantan Timur	121.403.843	207.576.191	(86,172,348)	(41.51)
Provinsi Bali	186.166.633	208.457.045	(22,290,412)	(10.69)
Provinsi Nusa Tenggara Barat	296.989.382	400.746.092	(103,756,710)	(25.9)
Provinsi Nusa Tenggara Timur	461.583.291	537.473.693	(75,890,402)	(14.12)
Provinsi Sulawesi Selatan	581.894.384	684.321.801	(102,427,417)	(14.97)
Provinsi Sulawesi Tengah	302.793.303	407.557.221	(104,763,918)	(25.71)
Provinsi Sulawesi Tenggara	192.230.550	262.710.424	(70,479,874)	(26.83)
Provinsi Gorontalo	229.449.812	251.902.023	(22,452,211)	(8.91)
Provinsi Sulawesi Utara	81.529.462	93.457.635	(11,928,173)	(12.76)
Provinsi Maluku Utara	89.084.411	100.593.276	(11,508,865)	(11.44)
Provinsi Maluku	179.727.653	202.642.748	(22,915,095)	(11.31)
Provinsi Papua	150.030.457	287.430.623	(137,400,166)	(47.80)
Provinsi Kepulauan Riau	85.478.330	86.034.046	(555,716)	(0.65)

Kanwil	2025	2024	Naik/Turun	%
Provinsi Sulawesi Barat	90.557.886	123.487.513	(32,929,627)	(26.67)
Provinsi Papua Barat	106.437.344	143.883.467	(37,446,123)	(26.03)
Provinsi Kalimantan Utara	136.097.693	170.462.644	(34,364,951)	(20.16)
JUMLAH	14.527.356.370	16.644.062.846	(2,116,706,476)	(12.72)

Adapun rincian saldo barang untuk pemeliharaan per kantor wilayah dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel C. 20 Rincian saldo barang untuk pemeliharaan per kantor wilayah per 30 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 (Rupiah)

Nama Kanwil	2025	2024	Naik/Turun	%
Kantor Pusat	42.878.395	13.749.940	29,128,455	211.84
Provinsi Aceh	16.815.371	18.894.725	(2,079,354)	(11.00)
Provinsi Sumatera Utara	34.452.960	42.106.040	(7,653,080)	(18.18)
Provinsi Sumatera Barat	6.072.000	6.964.047	(892,047)	(12.81)
Provinsi Riau	2.279.675	3.676.550	(1,396,875)	(37.99)
Provinsi Jambi	37.304.520	35.807.949	1,496,571	4.18
Provinsi Sumatera Selatan	6.729.123	14.987.050	(8,257,927)	(55.10)
Provinsi Lampung	5.393.200	4.477.970	915,230	20.44
Provinsi Bengkulu	14.993.033	39.172.826	(24,179,793)	(61.73)
Provinsi Bangka Belitung	18.653.367	23.394.898	(4,741,531)	(20.27)
Provinsi Banten	5.981.481	3.191.947	2,789,534	87.39
Provinsi DKI Jakarta	46.331.388	51.137.291	(4,805,903)	(9.40)
Provinsi Jawa Barat	24.406.909	18.154.945	6,251,964	34.44
Provinsi Jawa Tengah	16.859.125	24.158.889	(7,299,764)	(30.22)
Provinsi DIY Yogyakarta	3.338.695	3.316.498	22,197	0.67
Provinsi Jawa Timur	45.801.864	30.329.717	15,472,147	51.01
Provinsi Kalimantan Barat	7.188.100	3.918.750	3,269,350	83.43
Provinsi Kalimantan Tengah	172.000	114.000	58,000	50.88
Provinsi Kalimantan Selatan	1.114.500	411.000	703,500	171.17
Provinsi Kalimantan Timur	4.286.474	5.457.760	(1,171,286)	(21.46)
Provinsi Bali	5.804.539	3.345.349	2,459,190	73.51
Provinsi Nusa Tenggara Barat	11.366.249	22.366.901	(11,000,652)	(49.18)
Provinsi Nusa Tenggara Timur	27.988.565	31.032.375	(3,043,810)	(9.81)
Provinsi Sulawesi Selatan	25.737.364	26.074.050	(336,686)	(1.29)
Provinsi Sulawesi Tengah	22.445.066	32.245.750	(9,800,684)	(30.39)
Provinsi Sulawesi Tenggara	8.866.648	9.870.128	(1,003,480)	(10.17)
Provinsi Gorontalo	4.699.500	3.839.500	860,000	22.40
Provinsi Sulawesi Utara	3.105.670	-	3,105,670	0
Provinsi Maluku Utara	883.200	3.805.024	(2,921,824)	(76.79)
Provinsi Maluku	5.691.000	2.240.000	3,451,000	154.06
Provinsi Kepulauan Riau	947.470	2.148.280	(1,200,810)	(55.90)
Provinsi Sulawesi Barat	2.658.060	2.304.925	353,135	15.32
Provinsi Papua Barat	5.775.000	6.288.500	(513,500)	(8.17)
Provinsi Kalimantan Utara	4.771.950	10.244.610	(5,472,660)	(53.42)
Jumlah	471.792.461	499.228.184	(27,435,723)	(5.50)

INVESTASI JANGKA PANJANG

Saldo Investasi jangka panjang Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp9,106,002,603,133,- dan Rp9,198,083,561,069,-. Investasi Jangka Panjang adalah investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 bulan, pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Investasi Jangka Panjang berasal dari saldo investasi milik BLU.

C.14 Dana Bergulir

Dana Bergulir
Rp1.377.619.421.093,-

Saldo Dana Bergulir Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp1.377.619.421.093,-** dan **Rp1.324.501.615.055,-**. Dana Bergulir adalah dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya. Saldo Dana Bergulir ini merupakan milik satuan kerja BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup yang berasal dari Dana Reboisasi sektor Kehutanan dan dana *Debt For Nature Swap* (DNS) eks Kementerian Lingkungan hidup yang masih berada di debitur dan belum dikembalikan.

Tabel C. 21 Rincian Saldo Dana Bergulir per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 (Rupiah)

No	Satker	Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	BPD LH	Dana Reboisasi Sektor Kehutanan	1.361.176.113.976	1.324.501.615.055
		Dana DNS KLH	16.443.307.117	
Jumlah			1.377.619.421.093	1.324.501.615.055

Investasi Non Permanen
BLU
Rp8.349.005.709.284,-

C.15 Investasi Non Permanen Badan Layanan Umum

Saldo Investasi Jangka Panjang Non Permanen Lainnya Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp8.349.005.709.284,-** dan **Rp8.399.546.659.356,-**. Investasi jangka panjang non permanen lainnya adalah penanaman dana untuk jangka waktu lebih dari satu tahun yang dimaksudkan untuk dimiliki tidak secara berkelanjutan. dengan tujuan untuk memberikan penghasilan tetap. Saldo Investasi Jangka Panjang ini merupakan milik satuan kerja Pusat Investasi Pemerintah yang berupa penyaluran dana bergulir kepada Lembaga Penyalur/*Linkage* untuk pembiayaan ultra mikro yang dijamin dengan piutang secara fidusia.

Tabel C. 22 Rincian Investasi Non Permanen Lainnya pada Satker Pusat Investasi Pemerintah Per 31 Desember 2025 (Rupiah)

NO	LKBB/LINKAGE	31 DESEMBER 2025
1	PT. Pegadaian	125.000.000.000
2	PT. PNM	7.283.333.333.320
3	Koperasi Syariah Annisa	266.666.670
4	KSP Karya Baitul Mandiri	34.075.983.507
5	PT. Usaha Pembiayaan Reliance Indonesia	2.013.793.103
6	LKMA Mojo Agung	336.666.670
7	LKMA Tani Makmur	569.999.996
8	PT LKMS Mahirah Muamalah	792.000.000
9	KSPPS BMT Al Amanah Sinjai	1.000.000.000
10	Kopdit Pelangi Kasih	2.770.620.493
11	Koperasi Al Manar	2.420.000.000
12	KSPPS Raya Banda Madani	19.289.417.992
13	KSPPS Artha Bahana Syariah	4.000.000.008
14	KSP Jujur Utama Mandiri	1.952.380.951
15	KSP Sila Mukti	2.269.264.072
16	KSP Sari Sedana Bali	2.198.373.972
17	KSP KUD Mintoogo	5.960.450.988
18	KSPPS Abdi Kerta Raharja	1.474.871.790
19	KSP Guna Prima Dana	466.666.658
20	PT LKM Genthia Persada	617.777.779
21	KSPPS BMT Mitra Umat Pekalongan	3.804.249.349
22	KSU Gapoktan Al Basiko II	280.000.000
23	KSPPS BMT Jati	20.833.341
24	PT LKM Batang	7.789.743.586

NO	LKBB/LINKAGE	31 DESEMBER 2025
25	KSPPS Benteng Mikro Indonesia	40.275.862.061
26	KSPPS Mitra Dhuafa Syariah	12.266.666.665
27	Koperasi Jasa Karya Abadi	7.000.000.000
28	KSPPS BMT Ummat Sejahtera Abadi	7.579.999.995
29	KSP Permata Siaga	333.333.340
30	KSPPS BMT Al Ishlah	100.000.000
31	KSPPS BMT Ibaadurrahman	1.667.111.103
32	Koperasi Konsumen Central Hutama Mandiri	724.444.452
33	KSPPS BMT Bina Auladi Mandiri	1.015.999.996
34	KSPPS BMT Ayyasi	348.333.327
35	BMT Niaga Utama	2.300.000.000
36	BMT Al Hidayah Ummat Sejahtera	3.518.750.000
37	KSP Karya Mandiri	1.000.000.006
38	KSP Permata Utama	1.300.000.000
39	KSU Krama Bali	520.000.000
40	KSPPS BMT El Itqan	411.666.661
41	KSPPS MuhammaDIyah Surya Mandiri	2.555.555.561
42	KSPPS BMT Al Fataya	999.999.995
43	KSPPS Nusa Ummat Sejahtera	98.333.333.331
44	KSP Mitra Dhuafa	161.103.448.279
45	Koperasi Dana Raharja	1.737.777.780
46	KSPPS BMT Ampek Jurai	637.701.154
47	KSP Citra Mandiri	666.666.670
48	LKM Sedasa	1.198.125.000
49	Koperasi BTM Sumbar	3.640.000.002
50	KSPPS BMT Harapan Bersama Kalingga	3.499.999.997
51	KSPPS BMT Huwaiza	1.479.310.347
52	KSPPS BMT Alhikmah Semesta	22.000.000.000
53	PT LKM BKD Pekalongan	5.866.666.664
54	PT Bahana Artha Ventura - langsung	98.000.000.000
55	DIRECT LENDING	0
56	Bahana Artha Ventura (BAV)	137.214.564.708
57	KJP Cipta Prima Sejahtera	678.571.429
58	KSPPS BMT Korong Gadang	736.666.668
59	KSP Kopdit Karya Jasa	3.195.000.001
60	Kopdit SAE	765.000.001
61	Kop Sarana Makmur Bersama Sama-sama	193.333.333
62	LKM Kalijaga	483.333.333
63	BMT NU Jatim	207.027.393.180
64	BMT Al Roudloh	4.500.000.000
65	KSPPS BMT Bahtera	3.000.000.000
66	KSPPS Suciati Saliman Sejahtera	900.000.000
67	KSPPS Prima Artha	1.760.000.000
68	PT Delapan Pilar Tanggul Jaya	108.000.000
69	Koperasi Jasa LKM PPUMI	2.160.000.000
70	BMT BISMA	1.500.000.000
Jumlah		8.349.005.709.284

Dana Bergulir Diragukan
Tertagih Rp
531.424.203.269,-

C.16 Dana Bergulir Diragukan Tertagih

Saldo Dana Bergulir Diragukan Tertagih Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp531.424.203.269,-** dan **Rp438.310.115.578,-**. Saldo Dana Bergulir Diragukan Tertagih ini merupakan milik satuan kerja BLU Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup yang meliputi penyisihan untuk piutang pembiayaan FDB Sektor Kehutanan dan dana DNS Kementerian Lingkungan Hidup.

Tabel C. 23 Rincian Saldo Dana Bergulir Diragukan Tertagih Tahun 2025 (Rupiah)

NO	RINCIAN	NILAI
1	Dana Bergulir Diragukan Tertagih – Kementerian Negara/Lembaga	(515.429.582.967)
2	Dana Bergulir Diragukan tertagih lainnya- DNS	(15.994.620.302)
	Jumlah	(531.424.203.269)

Atas beberapa piutang macet tersebut telah dilakukan pengajuan penyelesaian melalui Panitia Usaha Piutang Negara (PUPN) dengan jumlah nilai penyerahan Rp87.648.720.528.73 dengan 1.914 Debitur.

C.17 Investasi Non Permanen BLU Bentuk Tagihan Diragukan Tertagih

Saldo Investasi Non Permanen BLU Bentuk Tagihan Diragukan Tertagih Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp89.198.323.975,-** dan **87.654.597.764,-**. Investasi Non Permanen Badan Layanan Umum diragukan tertagih merupakan estimasi penyisihan tidak tertagih atas penyaluran pembiayaan Ultra Mikro kepada penyalur maupun *linkage*. Saldo ini merupakan milik satuan kerja BLU PIP dengan rincian penyisihan dilakukan merujuk pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.06/2021 sebagai berikut.

Tabel C. 24 Rincian Saldo Penyisihan Piutang Tak Tertagih PIP per 31 Desember 2025 (Rupiah)

NO	KUALITAS PIUTANG	NILAI OUTSTANDING	NILAI PENYISIHAN(%)	JUMLAH
1	Lancar	8.297.334.018.699	0.5	41.486.670.093
2	Kurang Lancar	111.333.334	10	11.133.333
3	Diragukan	7.719.673.407	50	3.859.836.704
4	Macet	43.840.683.844	100	43.840.683.844
	Jumlah	8.349.005.709.284		89.198.323.975

Perhitungan Investasi Non-permanen Badan Layanan Umum diragukan tertagih pada per 31 Desember 2025 mengalami peningkatan sebesar 1,76 persen dibandingkan dengan pada akhir Tahun 2024 sebesar Rp87.654.597.764,-.

ASET TETAP

Saldo aset tetap tanah yang dimiliki Direktorat Jenderal Perbendaharaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp11,406,547,380,477,- dan Rp 11,352,287,078,562,-

Aset tetap adalah aset berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset ini dinilai berdasarkan biaya perolehan dan tidak untuk dijual dalam operasi normal.

C.18 Tanah

Saldo aset tetap tanah yang dimiliki Direktorat Jenderal Perbendaharaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp9.181.203.085.559,-** dengan kuantitas **1.723.793 m²** dan

Investasi Non Permanen
BLU Bentuk Tagihan
Diragukan Tertagih
89.198.323.975,-

Tanah
Rp9.181.203.085.559,-

Rp9.177.179.647.830,- dengan kuantitas 1.723.614 m². Rincian Mutasi Aset Tetap Tanah disajikan dalam Laporan Barang Milik Negara dengan rekapitulasi mutasi adalah sebagai berikut.

Tabel C. 25 Rincian Saldo Tanah per 31 Desember 2025 (Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2024	9.177.179.647.830
Mutasi tambah:	
Transfer Masuk	402.368.689.000
Reklasifikasi Masuk	62.552.925.000
Hibah Masuk	483.059.729
Koreksi Susulan	1.904.736.000
Mutasi Kurang:	
Transfer Keluar	400.733.047.000
Reklasifikasi Keluar	62.552.925.000
Saldo Per 31 Desember 2025	9.181.203.085.559
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	0
Nilai Buku Per 31 Desember 2025	9.181.203.085.559

Rincian Tanah Per Wilayah

Tabel C. 26 Rincian Tanah per Wilayah (Rupiah)

Nama Kanwil	2025	2024	Naik/Turun	%
Kantor Pusat	2.244.196.867.351	2.244.196.867.351	-	0.00
Provinsi Aceh	86.488.768.130	86.488.768.130	-	0.00
Provinsi Sumatera Utara	280.254.549.000	280.254.549.000	-	0.00
Provinsi Sumatera Barat	178.047.822.000	178.047.822.000	-	0.00
Provinsi Riau	162.977.472.000	162.977.472.000	-	0.00
Provinsi Jambi	72.762.782.198	72.279.722.469	483,059,729	0.67
Provinsi Sumatera Selatan	289.341.908.000	289.341.908.000	-	0.00
Provinsi Lampung	75.638.729.000	75.638.729.000	-	0.00
Provinsi Bengkulu	41.637.949.000	41.637.949.000	-	0.00
Provinsi Bangka Belitung	39.706.574.000	39.706.574.000	-	0.00
Provinsi Banten	175.360.115.000	175.360.115.000	-	0.00
Provinsi DKI Jakarta	872.416.640.000	872.416.640.000	-	0.00
Provinsi Jawa Barat	1.132.842.372.000	1.132.842.372.000	-	0.00
Provinsi Jawa Tengah	839.985.457.000	839.985.457.000	-	0.00
Provinsi DIY Yogyakarta	201.123.238.000	201.123.238.000	-	0.00
Provinsi Jawa Timur	575.876.745.000	575.876.745.000	-	0.00
Provinsi Kalimantan Barat	173.600.150.000	173.600.150.000	-	0.00
Provinsi Kalimantan Tengah	111.660.647.000	111.660.647.000	-	0.00
Provinsi Kalimantan Selatan	153.196.853.000	153.196.853.000	-	0.00
Provinsi Kalimantan Timur	105.515.206.000	105.515.206.000	-	0.00
Provinsi Bali	61.999.478.000	61.999.478.000	-	0.00
Provinsi Nusa Tenggara Barat	125.034.853.000	125.034.853.000	-	0.00
Provinsi Nusa Tenggara Timur	113.623.979.000	113.623.979.000	-	0.00
Provinsi Sulawesi Selatan	269.635.815.000	267.731.079.000	1,904,736,000	0.71
Provinsi Sulawesi Tengah	165.579.660.000	165.579.660.000	-	0.00
Provinsi Sulawesi Tenggara	92.929.688.000	91.294.046.000	1,635,642,000	1.79
Provinsi Gorontalo	44.424.724.000	44.424.724.000	-	0.00
Provinsi Sulawesi Utara	109.940.217.994	109.940.217.994	-	0.00
Provinsi Maluku Utara	92.321.101.000	92.321.101.000	-	0.00
Provinsi Maluku	38.616.474.000	38.616.474.000	-	0.00
Provinsi Papua	102.572.595.000	102.572.595.000	-	0.00
Provinsi Kepulauan Riau	11.051.132.000	11.051.132.000	-	0.00

Nama Kanwil	2025	2024	Naik/Turun	%
Provinsi Sulawesi Barat	37.191.611.825	37.191.611.825	-	0.00
Provinsi Papua Barat	32.544.718.000	32.544.718.000	-	0.00
Provinsi Kalimantan Utara	71.106.195.061	71.106.195.061	-	0.00
Jumlah	9.181.203.085.559	9.177.179.647.830	4,023,437,729	0.04

Peralatan dan Mesin
Rp2.077.948.116.906,-

C.19 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp2.077.948.116.906,-** dan **Rp1.904.038.313.381,-**. Rincian Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin disajikan dalam Laporan Barang Milik Negara dengan rekapitulasi mutasi adalah sebagai berikut.

Tabel C. 27 Rincian Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025

SALDO NILAI PEROLEHAN 31 DESEMBER 2024	1.904.038.313.381
Mutasi tambah:	
Pembelian	205.826.091.632
Transfer Masuk	163.284.874.939
Saldo Awal	24.340.072.377
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	15.385.696.736
Reklasifikasi Masuk	11.272.295.215
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	11.173.026.251
Batal Transfer Keluar	472.573.000
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	356.281.336
Pembatalan Penghapusan	308.585.403
Perolehan Lainnya	288.856.060
Internal Transfer Masuk	14.735.600
Koreksi Susulan	4.940.000
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	1.750.000
Mutasi Kurang:	
Internal Transfer Keluar	(14.735.600)
Penghapusan	(572.916.354)
Koreksi Pencatatan	(833.817.143)
Hibah Keluar	(2.327.384.166)
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(4.060.383.060)
Reklasifikasi Keluar	(11.307.538.343)
Penghentian Aset Dari Penggunaan	(78.654.727.205)
Transfer Keluar	(161.048.473.153)
Saldo Per 31 Desember 2025	2.077.948.116.906
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	1,571,104,675,277
Nilai Buku Per 31 Desember 2025	506.843.441.629

Rincian Peralatan dan mesin Per Wilayah

Tabel C. 28 Rincian Peralatan dan Mesin per Wilayah (Rupiah)

Kanwil	2025	2024	Naik/Turun	%
Kantor Pusat	1.031.216.148.506	892.656.803.369	138.559.345.137	15.52
Provinsi Aceh	34.813.519.394	34.897.210.167	(83.690.773)	(0.24)
Provinsi Sumatera Utara	53.873.683.993	53.066.963.343	806.720.650	1.52
Provinsi Sumatera Barat	32.605.430.868	32.660.568.934	(55.138.066)	(0.17)
Provinsi Riau	19.665.182.319	16.551.244.727	3.113.937.592	18.81
Provinsi Jambi	23.811.171.540	22.525.686.897	1.285.484.643	5.71
Provinsi Sumatera Selatan	26.636.313.235	25.924.324.484	711.988.751	2.75
Provinsi Lampung	22.206.957.817	22.676.825.990	(469.868.173)	(2.07)
Provinsi Bengkulu	23.119.608.789	22.714.123.257	405.485.532	1.79
Provinsi Bangka Belitung	14.341.191.978	14.520.979.794	(179.787.816)	(1.24)

Kanwil	2025	2024	Naik/Turun	%
Provinsi Banten	19.315.698.939	18.944.781.211	370.917.728	1.96
Provinsi DKI Jakarta	91.274.723.141	89.817.020.759	1.457.702.382	1.62
Provinsi Jawa Barat	67.789.213.129	64.312.655.667	3.476.557.462	5.41
Provinsi Jawa Tengah	71.697.094.457	68.186.113.025	3.510.981.432	5.15
Provinsi DIY Yogyakarta	26.126.641.657	25.053.184.852	1.073.456.805	4.28
Provinsi Jawa Timur	69.633.907.828	69.827.403.955	(193.496.127)	(0.28)
Provinsi Kalimantan Barat	31.214.072.097	29.063.901.847	2.150.170.250	7.40
Provinsi Kalimantan Tengah	23.102.912.974	23.460.294.464	(357.381.490)	(1.52)
Provinsi Kalimantan Selatan	30.260.806.154	28.553.848.755	1.706.957.399	5.98
Provinsi Kalimantan Timur	19.108.500.935	18.603.649.593	504.851.342	2.71
Provinsi Bali	17.186.247.239	19.139.607.395	(1.953.360.156)	(10.21)
Provinsi Nusa Tenggara Barat	23.553.647.595	23.338.288.841	215.358.754	0.92
Provinsi Nusa Tenggara Timur	29.197.910.938	28.232.219.054	965.691.884	3.42
Provinsi Sulawesi Selatan	40.078.503.493	37.365.078.634	2.713.424.859	7.26
Provinsi Sulawesi Tengah	25.773.333.357	22.821.690.510	2.951.642.847	12.93
Provinsi Sulawesi Tenggara	19.987.378.204	19.598.028.953	389.349.251	1.99
Provinsi Gorontalo	15.415.216.345	14.215.410.544	1.199.805.801	8.44
Provinsi Sulawesi Utara	20.368.310.300	20.496.554.357	(128.244.057)	(0.63)
Provinsi Maluku Utara	14.664.823.149	13.568.295.893	1.096.527.256	8.08
Provinsi Maluku	20.179.681.519	17.205.041.049	2.974.640.470	17.29
Provinsi Papua	37.280.046.085	35.589.254.884	1.690.791.201	4.75
Provinsi Kepulauan Riau	26.021.618.781	25.065.076.341	956.542.440	3.82
Provinsi Sulawesi Barat	14.074.287.015	13.938.729.772	135.557.243	0.97
Provinsi Papua Barat	21.239.392.339	19.318.374.357	1.921.017.982	9.94
Provinsi Kalimantan Utara	21.114.940.797	20.129.077.707	985.863.090	4.90
JUMLAH	2.077.948.116.906	1.904.038.313.381	173.909.803.525	9.13

Aset tetap Peralatan dan Mesin yang tidak sesuai tugas dan fungsi Kementerian Keuangan, khususnya Ditjen Perbendaharaan telah direklasifikasi ke kode barang yang sesuai. Rincian aset tetap Peralatan dan Mesin disajikan pada Laporan Barang Milik Negara.

C.20 Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan
Rp2.440.737.773.157,-

Saldo Aset Tetap berupa gedung dan bangunan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah **Rp2.440.737.773.157,-** dan **Rp2.308.842.190.683,-**. Rincian Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan disajikan dalam Laporan Barang Milik Negara dengan rekapitulasi mutasi adalah sebagai berikut:

Tabel C. 29 Rincian Saldo Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 (Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2024	2.308.842.190.683
Mutasi tambah:	
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	89.655.007.261
Transfer Masuk	62.327.172.398
Pengembangan Melalui KDP	48.924.536.028
Reklasifikasi Masuk	26.950.240.865
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	5.697.989.891
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	1.701.873.500
Perolehan Lainnya	588.123.806
Pembelian	586.139.048
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	353.902.889
Penerimaan Aset Tetap Renovasi	338.693.845
Koreksi Manual	88.251.010
Saldo Awal	333.024.948
Penyelesaian Pembangunan Langsung	199.400.000
Perolehan Reklasifikasi Dari Ekstra ke Intra	514.000
Mutasi Kurang:	

Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(579.032.976)
Koreksi Pencatatan	(955.596.048)
Koreksi Susulan	(4.458.080.407)
Penghentian Aset Dari Penggunaan	(9.604.035.321)
Reklasifikasi Keluar	(26.950.240.865)
Transfer Keluar	(63.302.301.398)
Saldo Per 31 Desember 2025	2.440.737.773.157
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	800.525.684.847
Nilai Buku Per 31 Desember 2025	1.640.212.088.310

Daftar Gedung dan Bangunan Per Wilayah

Tabel C. 30 Rincian Gedung dan Bangunan per Wilayah (Rupiah)

Nama Kanwil	2025	2024	Naik/Turun	%
Kantor Pusat	446.184.918.363	446.277.543.795	(92.625.432)	(0.02)
Provinsi Aceh	61.663.078.228	60.306.284.868	1.356.793.360	2.25
Provinsi Sumatera Utara	68.426.697.822	66.936.511.218	1.490.186.604	2.23
Provinsi Sumatera Barat	61.152.027.259	59.649.243.258	1.502.784.001	2.52
Provinsi Riau	30.029.607.349	30.029.607.349		0.00
Provinsi Jambi	37.223.561.276	36.770.895.276	452.666.000	1.23
Provinsi Sumatera Selatan	39.754.153.281	32.651.433.095	7.102.720.186	21.75
Provinsi Lampung	35.914.767.670	37.259.838.050	(1.345.070.380)	(3.61)
Provinsi Bengkulu	36.295.067.262	35.778.844.262	516.223.000	1.44
Provinsi Bangka Belitung	17.710.725.091	17.710.725.091		0.00
Provinsi Banten	33.894.884.772	33.681.284.772	213.600.000	0.63
Provinsi DKI Jakarta	169.366.713.425	168.867.913.025	498.800.400	0.30
Provinsi Jawa Barat	141.319.223.293	135.552.778.821	5.766.444.472	4.25
Provinsi Jawa Tengah	157.108.608.653	154.236.031.750	2.872.576.903	1.86
Provinsi DIY Yogyakarta	46.682.002.722	41.797.454.751	4.884.547.971	11.69
Provinsi Jawa Timur	126.042.508.660	122.291.248.240	3.751.260.420	3.07
Provinsi Kalimantan Barat	41.136.492.687	40.232.767.432	903.725.255	2.25
Provinsi Kalimantan Tengah	35.873.812.768	35.873.812.768		0.00
Provinsi Kalimantan Selatan	50.024.595.761	49.051.407.701	973.188.060	1.98
Provinsi Kalimantan Timur	40.712.441.325	39.883.340.619	829.100.706	2.08
Provinsi Bali	15.791.081.896	15.095.146.296	695.935.600	4.61
Provinsi Nusa Tenggara Barat	66.558.173.383	66.118.767.912	439.405.471	0.66
Provinsi Nusa Tenggara Timur	39.663.870.139	38.501.118.359	1.162.751.780	3.02
Provinsi Sulawesi Selatan	69.292.066.472	69.232.970.551	59.095.921	0.09
Provinsi Sulawesi Tengah	68.225.392.752	56.884.637.282	11.340.755.470	19.94
Provinsi Sulawesi Tenggara	41.388.171.145	40.865.118.588	523.052.557	1.28
Provinsi Gorontalo	23.448.843.615	23.448.843.615		0.00
Provinsi Sulawesi Utara	33.043.221.103	32.630.158.103	413.063.000	1.27
Provinsi Maluku Utara	49.618.983.419	50.561.772.419	(942.789.000)	(1.86)
Provinsi Maluku	47.894.350.667	46.272.129.906	1.622.220.761	3.51
Provinsi Papua	114.699.082.043	93.369.892.361	21.329.189.682	22.84
Provinsi Kepulauan Riau	54.515.392.768	54.315.454.018	199.938.750	0.37
Provinsi Sulawesi Barat	20.557.311.778	20.325.311.778	232.000.000	1.14
Provinsi Papua Barat	28.768.989.990	25.266.018.895	3.502.971.095	13.86
Provinsi Kalimantan Utara	90.756.954.320	31.115.884.459	59.641.069.861	191.67
JUMLAH	2.440.737.773.157	2.308.842.190.683	131.895.582.474	5.71

Rincian aset tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025 disajikan pada Laporan Barang Milik Negara.

C.21 Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp1.114.536.000,-** dan **Rp1.114.536.000,-**. Mutasi transaksi terhadap Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Jalan, Irigasi dan Jaringan
Rp1.114.536.000,-

Tabel C. 31 Rincian Saldo Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2025 (Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2024	1.114.536.000
Mutasi tambah:	
-	0
Mutasi Kurang:	
-	0
Saldo Per 31 Desember 2025	1.114.536.000
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	686.933.011
Nilai Buku Per 31 Desember 2025	427.602.989

Daftar Jalan dan Jembatan per Wilayah

Tabel C. 32 Rincian Jalan dan Jembatan per Wilayah (Rupiah)

Nama Kanwil	2025	2024
Kantor Pusat	313.981.000	313.981.000
Provinsi Jawa Barat	62.498.000	62.498.000
Provinsi Jawa Timur	103.400.000	103.400.000
JUMLAH	479.879.000	479.879.000

Daftar Irigasi Per Wilayah

Tabel C. 33 Rincian Irigasi per Wilayah (Rupiah)

Nama Kanwil	2025	2024
Provinsi Sumatera Barat	17.940.000	17.940.000
Provinsi Bengkulu	6.181.000	6.181.000
Provinsi Sulawesi Tenggara	55.071.000	55.071.000
Provinsi Gorontalo	54.627.000	54.627.000
JUMLAH	133.819.000	133.819.000

Daftar Jaringan Per Wilayah

Tabel C. 34 Rincian Jaringan per Wilayah

Nama Kanwil	2025	2024
Provinsi Kalimantan Barat	176.958.000	176.958.000
Provinsi Sulawesi Tengah	88.761.000	88.761.000
Provinsi Sulawesi Tenggara	37.619.000	37.619.000
Provinsi Sulawesi Utara	197.500.000	197.500.000
JUMLAH	500.838.000	500.838.000

Rincian aset tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 31 Desember 2025 disajikan pada Laporan Barang Milik Negara.

C.22 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya
Rp67.020.107.506,-

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah **Rp67.020.107.506,-** dan **Rp13,554,602,492,-**. Rincian Aset Tetap Lainnya terdiri dari:

1. Aset Tetap Renovasi sebesar Rp64.329.424.696,-
2. Aset Tetap Lainnya adalah sebesar Rp2.680.137.810,-.

Aset Tetap Renovasi adalah Aset Tetap Lainnya yang berasal dari pengakuan belanja modal atas biaya renovasi aset yang bukan milik satuan kerja.

Tabel C. 35 Rincian Saldo Aset Tetap Renovasi a per 31 Desember 2025 (Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2024	12.067.858.698
Mutasi tambah:	
Saldo Awal	
Pembelian	754.811.988
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	53.097.967.956
Penyelesaian Pembangunan Langsung	
Mutasi Kurang:	
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	
Transfer Keluar	(1.591.213.946)
Saldo Per 31 Desember 2025	64.329.424.696
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	-
Nilai Buku Per 31 Desember 2025	64.329.424.696

Daftar Aset Tetap Renovasi per Wilayah

Tabel C. 36 Rincian Saldo Aset Tetap Renovasi per Wilayah (Rupiah)

Nama Kanwil	2025	2024	Naik/Turun	%
Kantor Pusat	58.953.251.650	5.497.418.706	53.455.832.944	972.38
Provinsi Aceh	150.000.000	150.000.000		0.00
Provinsi Kalimantan Timur	94.800.000	1.289.066.946	(1.194.266.946)	(92.65)
Provinsi Sulawesi Tengah	84.754.450	84.754.450		0.00
Provinsi Sulawesi Barat	26.667.000	26.667.000		0.00
Provinsi Kalimantan Utara	5.019.951.596	5.019.951.596		0.00
JUMLAH	64.329.424.696	12.067.858.698	52.261.565.998	433.06

Tabel C. 37 Rincian Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 (Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2024	1.486.743.794
Mutasi tambah:	
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	1.208.790.000
Reklasifikasi Masuk	35.243.128
Transfer Masuk	21.780.000
Perolehan Lainnya	10.545.000
Mutasi Kurang:	
Transfer Keluar	(21.780.000)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(50.639.112)
Saldo Per 31 Desember 2025	2.690.682.810
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	(211.359.494)
Nilai Buku Per 31 Desember 2025	2.479.323.316

Daftar Aset Tetap Lainnya Per Wilayah

Tabel C. 38 Rincian Saldo Aset Tetap Lainnya per Wilayah (Rupiah)

Nama Kanwil	2025	2024	Naik/Turun	%
Kantor Pusat	2.051.304.992	853.309.992	1.197.995.000	140.39
Provinsi Aceh	1.975.000	1.975.000		0.00
Provinsi Riau	9.964.299	9.964.299		0.00
Provinsi Sumatera Selatan	8.000.000	8.000.000		0.00
Provinsi Bengkulu	33.272.000	33.272.000		0.00
Provinsi DKI Jakarta	37.743.128	2.500.000	35.243.128	1409.73
Provinsi Jawa Barat	90.618.550	90.618.550		0.00
Provinsi Jawa Tengah	9.141.500	9.141.500		0.00
Provinsi DIY Yogyakarta	2.000.000	2.000.000		0.00

Nama Kanwil	2025	2024	Naik/Turun	%
Provinsi Jawa Timur	256.322.250	237.982.250	18.340.000	7.71
Provinsi Kalimantan Barat	16.040.000	16.040.000		0.00
Provinsi Kalimantan Selatan	2.504.500	2.504.500		0.00
Provinsi Bali	31.110.000	31.460.000	(350.000)	(1.11)
Provinsi Sulawesi Selatan	3.550.000	3.550.000		0.00
Provinsi Sulawesi Tengah	-	28.994.000	(28.994.000)	(100.00)
Provinsi Sulawesi Tenggara	121.618.591	139.913.703	(18.295.112)	(13.08)
Provinsi Kepulauan Riau	7.900.000	7.900.000		0.00
Provinsi Papua Barat	4.208.000	4.208.000		0.00
Provinsi Kalimantan Utara	3.410.000	3.410.000		0.00
JUMLAH	2.690.682.810	1.486.743.794	1.203.939.016	80.98

Rincian Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025 disajikan pada Laporan Barang Milik Negara.

C.23 Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp11.052.413.978,-** dan **Rp97.822.985.061,-**. Saldo konstruksi dalam pengerjaan yang merupakan pembangunan gedung dan bangunan yang proses pengerjaannya belum selesai sampai dengan tanggal neraca.

Tabel C. 39 Rincian Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2025 (Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2024	97.822.985.061
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Masuk KDP	123.877.864.023
Pengembangan KDP	108.746.028.979
Koreksi Nilai KDP Bertambah	58.464.475.836
Perolehan/Penambahan KDP	14.634.733.941
Perolehan Lainnya KDP	465.098.600
Saldo Awal KDP	77.400.000
Mutasi Kurang:	
Koreksi Nilai KDP Berkurang	(6.592.047.851)
Koreksi Pencatatan KDP	(54.294.262.607)
Reklasifikasi Keluar KDP	(123.877.864.023)
Reklasifikasi KDP menjadi Barang Jadi	(208.271.997.981)
Saldo Per 31 Desember 2025	11.052.413.978
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	0
Nilai Buku Per 31 Desember 2025	11.052.413.978

Daftar Konstruksi Dalam Pekerjaan per Wilayah

Tabel C. 40 Rincian Saldo Konstruksi Dalam Pekerjaan per Wilayah (Rupiah)

Nama Kanwil	2025	2024	Naik/Turun	%
Kantor Pusat	77.400.000	6.260.984.888	(6.183.584.888)	(98.76)
Provinsi Sumatera Selatan	-	6.066.839.206	(6.066.839.206)	(100)
Provinsi DKI Jakarta	394.193.149	394.193.149		0
Provinsi Jawa Barat	158.886.400	258.722.685	(99.836.285)	(38.59)
Provinsi Jawa Tengah	1.499.160.240	2.645.964.844	(1.146.804.604)	(43.34)
Provinsi DIY Yogyakarta	-	3.698.261.763	(3.698.261.763)	(100)
Provinsi Jawa Timur	99.335.420	138.130.320	(38.794.900)	(28.09)
Provinsi Kalimantan Selatan	73.482.000	73.482.000	-	0
Provinsi Kalimantan Timur	1.276.111.978	-	1.276.111.978	100
Provinsi Nusa Tenggara Barat	-	20.010.525	(20.010.525)	(100)
Provinsi Nusa Tenggara Timur	-	429.068.689	(429.068.689)	(100)
Provinsi Sulawesi Selatan	99.910.425	-	99.910.425	100

Nama Kanwil	2025	2024	Naik/Turun	%
Provinsi Sulawesi Tengah	-	12.673.834.789	(12.673.834.789)	(100)
Provinsi Gorontalo	79.939.000	-	79.939.000	100
Provinsi Papua	6.185.195.366	14.113.430.632	(7.928.235.266)	(56.18)
Provinsi Papua Barat	1.108.800.000	1.699.526.095	(590.726.095)	(34.76)
Provinsi Kalimantan Utara	-	49.350.535.476	(49.350.535.476)	(100)
JUMLAH	11.052.413.978	97.822.985.061	(86.770.571.083)	(88.70)

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Rp2.372.528.652.629,-

C.24 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing **Rp2.372.528.652.629,-** dan **Rp2.150.265.196.885,-**. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan kontra akun Aset Tetap yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian Saldo sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Tetap selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rekapitulasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel C. 41 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2025 (Rupiah)

ASET TETAP	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
Peralatan dan Mesin	2.077.948.116.906	1571.104.675.277	506.843.441.629
Gedung dan Bangunan	2.440.737.773.157	800.525.684.847	1.640.212.088.310
Jalan Irigasi dan Jaringan	1.114.536.000,000	686.933.011	427.602.989
Aset Tetap Lainnya	67.020.107.506	211.359.494	66.808.748.012
Akumulasi Penyusutan	4.586.820.533.569	2.372.528.652.629	2.214.291.880.940

Daftar Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Per Wilayah

Tabel C. 42 Rincian Saldo Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per Wilayah (Rupiah)

Nama Kanwil	2025	2024
Kantor Pusat	728.607.595.964	645.930.121.480
Provinsi Aceh	29.023.302.190	28.733.479.374
Provinsi Sumatera Utara	43.654.936.747	41.093.427.416
Provinsi Sumatera Barat	26.371.219.512	25.495.920.467
Provinsi Riau	14.752.624.087	12.567.903.919
Provinsi Jambi	18.886.248.356	16.732.099.708
Provinsi Sumatera Selatan	21.483.189.908	20.681.611.390
Provinsi Lampung	18.676.173.891	18.500.033.228
Provinsi Bengkulu	18.671.230.625	17.565.742.201
Provinsi Bangka Belitung	11.880.892.538	11.633.735.595
Provinsi Banten	14.973.025.111	13.847.619.609
Provinsi DKI Jakarta	80.879.259.270	76.475.577.293
Provinsi Jawa Barat	53.490.412.174	50.810.599.851
Provinsi Jawa Tengah	59.615.958.496	56.159.549.055
Provinsi DIY Yogyakarta	20.688.753.074	19.104.319.895
Provinsi Jawa Timur	57.817.987.106	57.069.700.857
Provinsi Kalimantan Barat	24.813.353.616	23.393.848.549
Provinsi Kalimantan Tengah	19.165.339.711	19.337.366.717
Provinsi Kalimantan Selatan	22.835.520.937	20.606.821.100
Provinsi Kalimantan Timur	14.830.315.789	14.062.086.812
Provinsi Bali	13.332.996.863	14.888.929.670
Provinsi Nusa Tenggara Barat	18.230.679.501	19.078.378.654
Provinsi Nusa Tenggara Timur	24.092.153.256	22.851.056.219
Provinsi Sulawesi Selatan	32.095.436.518	29.464.635.477
Provinsi Sulawesi Tengah	18.006.410.147	16.361.996.478
Provinsi Sulawesi Tenggara	15.989.239.919	15.933.875.600

Nama Kanwil	2025	2024
Provinsi Gorontalo	12.540.228.005	11.517.782.876
Provinsi Sulawesi Utara	17.342.502.105	17.214.092.731
Provinsi Maluku Utara	11.044.289.219	10.147.253.242
Provinsi Maluku	15.352.928.588	13.369.328.450
Provinsi Papua	25.718.466.233	24.144.421.983
Provinsi Kepulauan Riau	22.323.909.962	21.148.875.635
Provinsi Sulawesi Barat	10.503.960.125	10.444.774.942
Provinsi Papua Barat	16.356.805.791	14.514.049.678
Provinsi Kalimantan Utara	17.057.329.943	15.624.537.290
JUMLAH	1.571.104.675.277	1.446.505.553.441

Daftar Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Per Wilayah

Tabel C. 43 Rincian Saldo Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per Wilayah (Rupiah)

Nama Kanwil	2025	2024
Kantor Pusat	125.299.778.167	107.187.029.821
Provinsi Aceh	21.833.460.676	19.629.869.882
Provinsi Sumatera Utara	28.984.231.421	25.713.648.978
Provinsi Sumatera Barat	19.491.730.401	17.268.434.917
Provinsi Riau	7.555.554.111	6.550.289.288
Provinsi Jambi	20.582.877.577	19.474.570.251
Provinsi Sumatera Selatan	12.701.834.351	10.775.162.933
Provinsi Lampung	14.561.298.959	14.023.636.022
Provinsi Bengkulu	14.377.694.045	12.908.731.892
Provinsi Bangka Belitung	4.388.230.926	3.784.093.209
Provinsi Banten	10.088.682.344	9.143.128.975
Provinsi DKI Jakarta	58.845.244.321	51.962.828.924
Provinsi Jawa Barat	74.730.464.207	67.536.105.287
Provinsi Jawa Tengah	67.395.339.744	58.622.463.820
Provinsi DIY Yogyakarta	7.963.485.167	6.712.837.591
Provinsi Jawa Timur	53.638.087.552	48.170.103.776
Provinsi Kalimantan Barat	12.329.763.152	10.726.802.927
Provinsi Kalimantan Tengah	11.026.529.295	9.769.354.223
Provinsi Kalimantan Selatan	23.523.856.446	21.312.098.526
Provinsi Kalimantan Timur	9.922.944.481	8.282.236.995
Provinsi Bali	5.666.080.953	4.825.356.741
Provinsi Nusa Tenggara Barat	13.855.779.729	11.864.818.481
Provinsi Nusa Tenggara Timur	7.624.071.554	6.666.334.939
Provinsi Sulawesi Selatan	36.759.931.401	33.174.489.451
Provinsi Sulawesi Tengah	13.245.898.031	11.004.226.530
Provinsi Sulawesi Tenggara	13.199.212.010	11.440.833.988
Provinsi Gorontalo	5.291.890.405	4.635.686.786
Provinsi Sulawesi Utara	6.921.886.098	5.937.054.490
Provinsi Maluku Utara	9.363.596.347	8.685.532.258
Provinsi Maluku	13.777.988.215	11.851.757.961
Provinsi Papua	34.322.802.469	28.630.317.613
Provinsi Kepulauan Riau	12.386.761.477	9.730.631.587
Provinsi Sulawesi Barat	8.285.157.913	7.276.737.447
Provinsi Papua Barat	11.996.326.279	10.533.728.970
Provinsi Kalimantan Utara	8.587.214.623	6.994.160.750
JUMLAH	800.525.684.847	702.805.096.229

Daftar Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan Per Wilayah

Tabel C. 44 Rincian Saldo Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan per Wilayah (Rupiah)

Nama Kanwil	2025	2024
Kantor Pusat	313.981.000	313.981.000
Provinsi Jawa Barat	62.498.000	62.498.000
Provinsi Jawa Timur	103.400.000	103.400.000
JUMLAH	479.879.000	479.879.000

Daftar Akumulasi Penyusutan Irigasi Per Wilayah

Tabel C. 45 Rincian Saldo Akumulasi Penyusutan Irigasi per Wilayah (Rupiah)

Nama Kanwil	2025	2024
Provinsi Sumatera Barat	5.104.029	4.503.555
Provinsi Bengkulu	1.592.077	1.404.774
Provinsi Sulawesi Tenggara	15.111.147	13.333.365
Provinsi Gorontalo	15.477.650	13.656.750
JUMLAH	37.284.903	32.898.444

Daftar Akumulasi Penyusutan Jaringan Per Wilayah

Tabel C. 46 Rincian Saldo Akumulasi Penyusutan Jaringan per Wilayah (Rupiah)

Nama Kanwil	2025	2024
Provinsi Kalimantan Barat	68.571.225	64.147.275
Provinsi Sulawesi Tengah	29.956.838	27.737.813
Provinsi Sulawesi Tenggara	16.928.545	15.674.578
Provinsi Sulawesi Utara	54.312.500	49.375.000
JUMLAH	169.769.108	156.934.666

Daftar Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya Per Wilayah

Tabel C. 47 Rincian Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya per Wilayah (Rupiah)

Nama Kanwil	2025	2024
Kantor Pusat	93.975.097	83.821.260
Provinsi Riau	7.473.225	4.982.150
Provinsi Bengkulu	27.600.000	27.600.000
Provinsi DKI Jakarta	14.716.172	1.500.000
Provinsi Jawa Barat	15.915.000	15.915.000
Provinsi Jawa Timur	21.340.000	-
Provinsi Kalimantan Barat	13.840.000	13.840.000
Provinsi Kalimantan Timur	-	119.426.695
Provinsi Bali	16.500.000	16.500.000
Provinsi Sulawesi Tengah	-	1.250.000
JUMLAH	211.359.494	284.835.105

Rincian akumulasi penyusutan aset tetap per 31 Desember 2025 disajikan pada Laporan Barang Milik Negara.

C.25 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Piutang Tagihan TP/TGR
Rp1.809.811.088,-

Saldo Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar **Rp1.809.811.088,-** dan **Rp1.832.811.088,-**. Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Rincian per debitur disajikan dalam lampiran Laporan Keuangan sedangkan Rekapitulasi Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi adalah sebagai berikut.

Tabel C. 48 Rincian Saldo Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 (Rupiah)

SATUAN KERJA	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
Kantor Pusat DJPb	1.809.811.088	1.827.811.088
KPPN Cirebon	-	5.000.000
Jumlah	1.809.811.088	1.832.811.088

Penyisihan Piutang Tak Tertagih – TP/TGR
Rp1.809.811.088,-

C.26 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih–Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Penyisihan Piutang tak Tertagih- Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp1.809.811.088,-** dan **Rp1.827.836.088,-**. Penyisihan Piutang tak Tertagih–Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi dan Tagihan Penjualan Angsuran yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang.

Tabel C. 49 Rincian per debitor disajikan dalam lampiran Laporan Keuangan sedangkan Perhitungan Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2025 (Rupiah)

KUALITAS PIUTANG	NILAI PIUTANG JANGKA PANJANG	% PENYISIHAN	NILAI PENYISIHAN
Tagihan TP/TGR			
Lancar		0.5%	
Kurang Lancar	-	10%	-
Diragukan	-	50%	-
Macet	1.809.811.088	100%	1.809.811.088
Jumlah	1.809.811.088		1.809.811.088

Daftar Penyisihan Piutang Tidak Tertagih–Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per Wilayah

Tabel C. 50 Rincian Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi per Wilayah (Rupiah)

Nama Kanwil	2025	2024
Kantor Pusat	1.809.811.088	1.827.811.088
Provinsi Jawa Barat	-	25.000
JUMLAH	1.809.811.088	1.827.836.088

Aset Tak Berwujud
Rp1.021.839.428.066,-

C.27 Aset Tak Berwujud

Saldo perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah **Rp1.021.839.428.066,-** dan **Rp941.109.031.886,-**. Aset Tak Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik. Penyusutan Aset Tak Berwujud berdasarkan PMK Nomor 251/PMK.06/2015 tanggal 29 Desember 2015 berlaku mulai TA 2016. Rekapitulasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel C. 51 Rincian Saldo Aset Berwujud Per 31 Desember 2025 (Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2024	941.109.031.886
Mutasi tambah:	
Koreksi Susulan	609.434.400

Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	7.185.328.137
Transfer Masuk	352.197.306.369
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	1.573.262.260
Pembelian	85.775.476.537
Mutasi Kurang:	
Transfer Keluar	(352.197.306.369)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	(14.413.105.154)
Saldo Per 31 Desember 2025	1,021,839,428,066
Amortisasi s.d. 31 Desember 2025	(695.100.442.340)
Nilai Buku Per 31 Desember 2025	326.738.985.726

Tabel C. 52 Uraian Jenis Aset Berwujud Per 31 Desember 2025 (Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Software	383,659,574,940
2	Lisensi	638,101,664,126
3	Aset Tak Berwujud Lainnya	78.189.000
	Jumlah	1,021,839,428,066

Daftar Aset Tak berwujud per Wilayah

Tabel C. 53 Rincian Saldo Aset Tak Berwujud per Wilayah (Rupiah)

	Nama Kanwil	2025	2024
Software	Kantor Pusat	383.634.806.540	367.893.927.760
	Provinsi Sumatera Barat	-	13.750.000
	Provinsi DKI Jakarta	-	17.913.000
	Provinsi Jawa Barat	9.990.000	9.990.000
	Provinsi Kalimantan Timur	4.500.000	4.500.000
	Provinsi Sulawesi Tenggara	10.278.400	10.278.400
	Total Software	383.659.574.940	367.950.359.160
Lisensi	Kantor Pusat	638.101.664.126	573.080.483.726
	Total Lisensi	638.101.664.126	573.080.483.726
Aset Tak Berwujud Lainnya	Kantor Pusat	44.889.000	44.889.000
	Provinsi Papua	33.300.000	33.300.000
	Total Aset Tak Berwujud Lainnya	78.189.000	78.189.000
	Jumlah	1.021.839.428.066	941.109.031.886

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2025 disajikan dalam Laporan Barang Milik Negara.

C.28 Aset Tak Berwujud dalam Pengerjaan

Saldo perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah **Rp0,-** dan **Rp3.794.326.637,-**. Saldo perolehan Aset Tak Berwujud (ATB) merupakan saldo perolehan dari aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi secara umum tidak mempunyai wujud fisik.

C.29 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Saldo Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar **Rp1.884.889.930.979,-** dan **Rp50.488.840.795,-**.

Dana Yang Dibatasi Penggunaannya adalah uang yang berada dalam penguasaan/rekening berada dalam penguasaan/rekening pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu. Termasuk Dana yang Dibatasi Penggunaannya adalah uang yang berasal dari penyaluran belanja ke rekening pihak ketiga namun masih berada dalam penguasaan/pengendalian pemerintah, yang terikat

Aset Tak Berwujud
Dalam Pengerjaan Rp0

Dana yang dibatasi
penggunaannya
Rp1.884.889.930.979,-

penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu. Dana ini terdiri dari 2 (dua) akun, yaitu Dana Lainnya dan Dana di Rekening Penampungan Kementerian/Lembaga dengan rincian sebagai berikut:

Tabel C. 54 Rincian Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2025 (Rupiah)

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Dana Lainnya	1.880.734.619.157
2	Dana di Rekening Penampungan-Kementerian/Lembaga	4.155.311.822
	Jumlah	1.884.889.930.979

Dana Lainnya timbul dari transaksi penyaluran Dana Peremajaan Perkebunan dan Penyaluran Dana Sarana dan Prasarana Perkebunan. Dimana dana dipindahkan ke rekening escrow atas nama lembaga pekebun. Dana yang berada di rekening tersebut, meskipun atas nama lembaga pekebun, namun penggunaannya harus atas persetujuan dari BLU BPDP agar sesuai peruntukannya, yaitu untuk membiayai peremajaan perkebunan dan sarana prasarana. Dalam kondisi tertentu, dana pada rekening escrow ini dapat ditarik kembali ke rekening BLU.

Dana di Rekening Penampungan Kementerian/Lembaga merupakan rekening giro pemerintah (umumnya dikenal sebagai Rekening Lainnya/RPL) yang dibuka oleh satuan kerja K/L untuk menampung dana khusus yang tidak masuk dalam rekening penerimaan atau pengeluaran rutin. Dana ini digunakan untuk menampung hibah langsung, dana kerja sama/kemitraan, jaminan pihak ketiga, dana titipan kasus hukum, atau penampungan akhir tahun anggaran.

Saldo dana di rekening penampungan pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan merupakan Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (ATA). dengan rincian sebagai berikut.

Tabel C. 55 Saldo RPATA per 31 Desember 2025 menurut satuan kerja (Rupiah)

NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	SALDO RPATA	JUMLAH KONTRAK
1	325237	Kanwil DJPb Prov. Kepulauan Riau	40.450.000	1
2	527010	Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan	3.053.204.339	9
3	527027	Kanwil DJPb Prov. DKI Jakarta	19.980.000	2
4	528682	Kanwil DJPb Prov. Papua	17.802.150	1
5	613832	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Timika	174.789.813	3
6	634277	Kanwil DJPb Prov. D.I. Yogyakarta	16.998.600	1
7	662788	Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Utara	832.086.920	4
		Jumlah	4.155.311.822	21

Dana Kelolaan Badan Layanan Umum
Rp12.717.800.019.673,-

C.30 Dana Kelolaan Badan Layanan Umum

Saldo Dana Kelolaan Badan Layanan Umum per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar **Rp12.717.800.019.673,-** dan **Rp12.870.873.477.257,-**. Dana Kelolaan BLU per 31 Desember 2025 berasal dari Dana Kelolaan BLU yang Belum Digulirkan/Diinvestasikan, yaitu dana yang berasal dari Bendahara Umum Negara yang dikelola dan digunakan BLU dalam rangka penugasan khusus perguliran atau investasi sesuai dengan tujuan utama pembentukan BLU. Adapun saldo per satker dapat dilihat pada rincian sebagai berikut.

Tabel C. 56 Rekapitulasi Dana Kelolaan BLU per 31 Desember 2025 (Rupiah)

NO	SATUAN KERJA	Uraian	31 DESEMBER 2025
1	BPDLH	Dana Kelolaan BLU yang belum digulirkan/diinvestasikan	10.225.910.653.731
	PIP		1.650.994.290.716
2	PIP	Dana Cadangan Pemerintah yang dikelola BLU	840.895.075.226
Jumlah			12.717.800.019.673

Dana Kelolaan BLU terdiri dari Dana Reboisasi, Dana Bersama Penanggulangan Bencana, Dana DNS eks KLH, dan Dana Rehabilitasi Mangrove, serta Dana Cadangan Pemerintah.

Aset Lain-Lain
Rp51.048.186.530,-

C.31 Aset Lain-Lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah **Rp51.048.186.530,-** dan **Rp68.017.778.101,-**. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan serta dalam proses penghapusan dari aplikasi SAKTI Modul Aset Tetap. Mutasi aset lain-lain per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel C. 57 Saldo Aset Lain-Lain per 31 Desember 2025 (Rupiah)

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2024	68.017.778.101
Mutasi tambah:	
Reklasifikasi Dari Aset Tetap ke Aset Lainnya	102.722.506.792
Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	3.241.081.264
Koreksi Manual	33.000.000
Mutasi Kurang:	
Hibah Keluar (BMN Yang Dihentikan)	(1.517.678.158)
Reklasifikasi Dari Aset Lainnya ke Aset Tetap	(16.871.016.142)
Penghapusan	(27.396.307.744)
Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	(77.181.177.583)
Saldo Per 31 Desember 2025	51.048.186.530
Akumulasi Penyusutan s.d. 31 Desember 2025	47.858.069.898
Nilai Buku Per 31 Desember 2025	3.190.116.632

Daftar Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan per Wilayah

Tabel C. 58 Rincian Saldo Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan per Wilayah (Rupiah)

Nama Kanwil	2025	2024	Naik/Turun	%
Kantor Pusat	19.760.104.065	43.041.781.688	(23.281.677.623)	(54.09)
Provinsi Aceh	1.137.436.559	730.671.039	406.765.520	55.67
Provinsi Sumatera Utara	621.464.581	453.715.408	167.749.173	36.97
Provinsi Sumatera Barat	257.205.834	97.130.000	160.075.834	164.81
Provinsi Riau	-	475.998.745	(475.998.745)	(100)
Provinsi Jambi	324.699.331	598.180.730	(273.481.399)	(45.72)
Provinsi Sumatera Selatan	482.249.384	868.253.512	(386.004.128)	(44.46)
Provinsi Lampung	1.385.390.705	59.367.000	1.326.023.705	2.233.60
Provinsi Bengkulu	400.197.103	3.800.000	396.397.103	1.0431.50
Provinsi Bangka Belitung	224.095.196	-	224.095.196	100
Provinsi Banten	773.429.444	171.840.500	601.588.944	350.09
Provinsi DKI Jakarta	527.790.809	2.495.470.122	(1.967.679.313)	(78.85)
Provinsi Jawa Barat	2.354.344.233	112.788.500	2.241.555.733	1.987.40
Provinsi Jawa Tengah	4.874.395.771	2.476.110.375	2.398.285.396	96.86
Provinsi DIY Yogyakarta	616.281.381	-	616.281.381	100

Nama Kanwil	2025	2024	Naik/Turun	%
Provinsi Jawa Timur	5.787.457.520	1.470.339.323	4.317.118.197	293.61
Provinsi Kalimantan Barat	-	429.296.848	(429.296.848)	(100)
Provinsi Kalimantan Tengah	534.775.127	736.811.527	(202.036.400)	(27.42)
Provinsi Kalimantan Timur	-	502.293.787	(502.293.787)	(100)
Provinsi Bali	160.316.958	-	160.316.958	100
Provinsi Nusa Tenggara Barat	452.996.596	-	452.996.596	100
Provinsi Nusa Tenggara Timur	375.197.023	-	375.197.023	100
Provinsi Sulawesi Selatan	1.247.093.742	243.614.970	1.003.478.772	411.91
Provinsi Sulawesi Tengah	433.600.692	6.100.000	427.500.692	7.008.21
Provinsi Sulawesi Tenggara	668.732.018	899.599.772	(230.867.754)	(25.66)
Provinsi Sulawesi Utara	1.104.789.801	-	1.104.789.801	100
Provinsi Maluku Utara	1.068.909.000	-	1.068.909.000	100
Provinsi Maluku	-	844.386.505	(844.386.505)	(100)
Provinsi Papua	4.651.124.305	10.865.733.466	(6.214.609.161)	(57.19)
Provinsi Kepulauan Riau	107.530.132	-	107.530.132	100
Provinsi Papua Barat	330.556.468	-	330.556.468	100
Provinsi Kalimantan Utara	386.022.752	424.215.884	(38.193.132)	(9)
JUMLAH	51.048.186.530	68.007.499.701	(16.959.313.171)	(24.94)

Rincian Aset Lain-lain per 31 Desember 2025 disajikan dalam Laporan Barang Milik Negara.

Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya
Rp742.958.512.238,-

C.32 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp742.958.512.238,-** dan **Rp709.979.706.167,-**. Rekapitulasi akumulasi penyusutan dan amortisasi aset lainnya adalah sebagai berikut.

Tabel C. 59 Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2025 (Rupiah)

ASET LAINNYA	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI PENYUSUTAN	NILAI BUKU
Software	383.659.574.940	368.240.795.784	15.418.779.156
Lisensi	638.101.664.126	326.859.646.556	311.242.017.570
Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	51.048.186.530	47.858.069.898	3.190.116.632
Jumlah	1.072.809.425.596	742.958.512.238	329.850.913.358

Utang kepada Pihak Ketiga
Rp5.301.444.657.107,-

C.33 Utang kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar **Rp5.301.444.657.107,-** dan **Rp7.816.678.114.255,-**. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan belanja yang masih harus dibayar dan merupakan kewajiban yang harus segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 bulan. Rekapitulasi Utang kepada Pihak Ketiga pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut.

Tabel C. 60 Rincian Saldo Utang kepada Pihak Ketiga Tahun 2025-2024 (Rupiah)

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
1	Belanja Pegawai yang masih harus dibayar	292.919.000	335.518.000
2	Belanja Barang yang masih harus dibayar	3.410.560.148.459	7.772.654.534.250
3	Belanja Modal yang masih harus dibayar	-	-
4	Utang kepada Pihak Ketiga -BLU	3.460.394.000	1.342.384.959
6	Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	4.115.290.369	40.320.895.696
7	Dana Pihak Ketiga	-	-

NO	URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
8	Dana Pihak Ketiga Lainnya - BLU	1.883.015.905.279	2.024.781.350
	Jumlah	5.301.444.657.107	7.816.678.114.255

Rincian saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per wilayah dapat dilihat pada rincian berikut.

Tabel C. 61 Rincian Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per Wilayah (Rupiah)

No	Wilayah	Jumlah
1	Kanwil DJPb Prov. Nad	31.610.386
2	Kanwil DJPb Prov. Sumatera Utara	53.921.097
3	Kanwil DJPb Prov. Sumatera Barat	42.802.659
4	Kanwil DJPb Prov. Riau	415.500
5	Kanwil DJPb Prov. Jambi	10.998.200
6	Kanwil DJPb Prov. Sumatera Selatan	2.012.600
7	Kanwil DJPb Prov. Lampung	50.102.200
8	Kanwil DJPb Prov. DKI Jakarta	20.016.365
9	Kanwil DJPb Prov. Jawa Barat	43.814.451
10	Kanwil DJPb Prov. Jawa Tengah	23.971.772
11	Kanwil DJPb Prov. Di Yogyakarta	16.998.600
12	Kanwil Djpb Prov. Provinsi Jawa Timur	7.391.891
13	Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Barat	4.922.375
14	Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Tengah	1.931.855
15	Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Selatan	38.561.138
16	Instansi Pusat	5.299.921.677.025
17	Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Timur	2.343.599
18	Kanwil DJPb Prov. Bali	192.600
19	Kanwil DJPb Prov. Nusa Tenggara Barat	302.250
20	Kanwil DJPb Prov. Nusa Tenggara Timur	1.739.800
21	Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Selatan	37.820.750
22	Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Tengah	409.500
23	Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Tenggara	168.500
24	Kanwil DJPb Prov. Gorontalo	17.560.310
25	Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Utara	690.000
26	Kanwil DJPb Prov. Maluku Utara	13.115.200
27	Kanwil DJPb Prov. Maluku	2.666.000
28	Kanwil DJPb Prov. Papua	192.719.163
29	Kanwil DJPb Prov. Provinsi Kepulauan Riau	56.905.868
30	Kanwil DJPb Prov. Sulawesi Barat	13.784.800
31	Kanwil DJPb Prov. Papua Barat	133.440
32	Kanwil DJPb Prov. Kalimantan Utara	832.957.213
	Jumlah	5.301.444.657.107

Pendapatan Diterima di Muka Rp1.334.357.514,-

C.34 Pendapatan Diterima di Muka

Saldo Pendapatan Diterima di Muka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar **Rp1.334.357.514,-** dan **Rp905.939.300,-**. Pendapatan Diterima di Muka merupakan pendapatan yang sudah disetor ke kas Negara. namun barang/jasa belum diserahkan kepada pihak ketiga dalam rangka PNPB. Rincian Pendapatan diterima dimuka pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan per tanggal pelaporan disajikan dalam lampiran Laporan Keuangan.

Tabel C. 62 Rincian Saldo Pendapatan Diterima di Muka per Wilayah (Rupiah)

Nama Kanwil	2025	2024
Kantor Pusat	844.570.187	332.318.799
Provinsi Sumatera Utara	-	1.121.000
Provinsi Sumatera Barat	8.612.842	25.674.807

Nama Kanwil	2025	2024
Provinsi Riau	5.132.250	5.050.000
Provinsi Jambi	3.000.000	-
Provinsi DKI Jakarta	163.118.666	272.868.500
Provinsi Jawa Barat	60.871.917	33.612.667
Provinsi Jawa Tengah	74.647.527	88.179.472
Provinsi Jawa Timur	105.570	8.064.750
Provinsi Kalimantan Barat	116.588.000	98.062.000
Provinsi Kalimantan Selatan	21.125.333	3.462.333
Provinsi Kalimantan Timur	-	11.509.333
Provinsi Nusa Tenggara Timur	1.059.972	13.779.639
Provinsi Sulawesi Tengah	30.281.250	-
Provinsi Papua	5.244.000	12.236.000
JUMLAH	1.334.357.514	905.939.300

Utang Jangka Pendek Lainnya Rp477.966,-

C.35 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar **Rp477.966,-** dan **Rp600,-**. Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan pajak yang belum disetorkan ke Kas Negara pada tanggal pelaporan. Pajak tersebut yang masih dipegang oleh Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2025. Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan per tanggal pelaporan disajikan dalam lampiran Laporan Keuangan.

Daftar saldo Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor per Wilayah

Tabel C. 63 Rincian Saldo Utang Pajak Bendahara Pengeluaran yang Belum Disetor per Wilayah (Rupiah)

Nama Kanwil	2025	2024
Provinsi Bengkulu	-	600
Provinsi Sulawesi Tengah	477.966	-
Jumlah	477.966	600

Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN Rp22.444.425.150.050

C.36 Utang Jangka Panjang BLU Kepada BUN

Saldo Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar **Rp22.444.425.150.050,-** dan **Rp22.594.921.751.668,-**.

Utang Jangka Panjang BLU kepada BUN merupakan kewajiban atas penerimaan Dana Kelolaan dari BA BUN 999.03 Pengelolaan Investasi Pemerintah. Rincian Utang Jangka Panjang BLU Kepada BUN per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut.

Tabel C. 64 Rincian Utang Jangka Panjang BLU Kepada BUN Per 31 Desember 2025 (Rupiah)

SATKER BLU	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup	12.444.425.150.050	12.594.921.751.668
Pusat Investasi Pemerintah	10.000.000.000.000	10.000.000.000.000
Jumlah	22.444.425.150.050	22.594.921.751.668

Ekuitas Rp32.620.526.692.312,-

C.37 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp32.620.526.692.312,-** dan **Rp46.424.125.342.175,-**. Ekuitas adalah merupakan kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Surplus/(Defisit) Laporan Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar **(Rp11.753.942.607.122,-)** dan **(Rp10.601.869.645.028,-)**. Dibandingkan dengan periode sebelumnya, nilai tersebut mengalami kenaikan sebesar 10,87 persen. Penjelasan atas pos-pos Laporan Operasional diuraikan sebagai berikut.

Pendapatan
Rp35.994.249.127.768,-

Pos Pendapatan

Jumlah Pendapatan-LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar **Rp35.994.249.127.768,-** dan **Rp30.876.073.219.742,-**, atau mengalami kenaikan sebesar 16,58 persen dibandingkan periode sebelumnya. Rincian Pendapatan-LO disajikan pada penjelasan berikut.

**Pendapatan Penerimaan
Negara Bukan Pajak
Lainnya**
Rp3.022.460.080,-

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar **Rp3.022.460.080,-** dan **Rp3.914.446.037,-**. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya (PNBP) merupakan penerimaan yang bersumber dari pengelolaan dana pemerintah, pemanfaatan sumber daya alam, penerimaan dari layanan yang dikendalikan oleh pemerintah, dan dari hasil pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Dibandingkan periode sebelumnya, jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 22,79 persen.

Satker dengan pendapatan penerimaan negara bukan pajak lainnya terbesar adalah Kantor Pusat DJPB sebesar Rp701.660.272,-, KPPN Timika sebesar Rp443.418.968,-, Kanwil DJPB Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp307.678.072,-, yang secara agregat menyumbang 48,07 persen dari total pendapatan penerimaan negara bukan pajak lainnya Kementerian.

Tabel D. 1 Saldo Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya (Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	NAIK / TURUN %
Pendapatan Anggaran Lain-lain	76.625.303	2.784	2.752.245,65
Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	1.515.422.733	2.361.363.145	(35,82)
Pendapatan Penggunaan Sarana dan Prasarana sesuai dengan Tusi	90.843.658	0	100,00
Pendapatan Penjualan Hasil Produksi Non Litbang Lainnya	0	138.659.080	(100,00)
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1.339.568.386	1.414.421.028	(5,29)
Jumlah	3.022.460.080	3.914.446.037	(22,79)

Berdasarkan komposisi akun, kontribusi terbesar pendapatan penerimaan negara bukan pajak lainnya berasal dari pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah (50,14%), pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan (44,32%), pendapatan penggunaan sarana dan prasarana sesuai dengan tusi (3,01%).

Realisasi Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebesar **Rp3.455.431.294,-** sedangkan pada Laporan Operasional (LO) sebesar **Rp3.022.460.080,-**, sehingga terdapat selisih sebesar **Rp432.971.214,-** (12,53 persen) dimana realisasi LRA lebih tinggi. Selisih terbesar terdapat pada akun pendapatan sewa tanah, gedung, dan bangunan sebesar **Rp431.418.214,-**. Hal ini terutama disebabkan oleh pendapatan diterima dimuka yang telah diakui sebagai pendapatan pada LRA karena kas telah diterima, namun secara akrual belum seluruhnya diakui sebagai pendapatan pada LO. Selain itu, terdapat pendapatan yang masih harus diterima yang telah diakui sebagai pendapatan berbasis akrual pada LO namun belum direalisasikan dalam bentuk kas sampai dengan akhir periode pelaporan.

Pendapatan Badan Layanan Umum
Rp35.991.226.667.688,-

D.2 Pendapatan Badan Layanan Umum

Jumlah Pendapatan Badan Layanan Umum per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar **Rp35.991.226.667.688,-** dan **Rp30.872.158.773.705,-**. Pendapatan Badan Layanan Umum (BLU) merupakan penerimaan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BLU sesuai dengan prinsip efisiensi dan produktivitas. Dibandingkan periode sebelumnya, jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 16,58 persen.

Pada TA 2025, PIP membukukan Pendapatan Operasional sebesar **Rp561.087.595.448,-**, meningkat sebesar 5,16 persen dibandingkan periode sebelumnya sebesar **Rp533.555.337.298,-**.

BPDLH mencatat Pendapatan Operasional sebesar **Rp1.905.073.469.620,-**, meningkat sebesar 14,87 persen dibandingkan periode sebelumnya sebesar **Rp1.658.459.529.766,-**.

Sementara itu, BPDP membukukan Pendapatan Operasional sebesar **Rp33.525.065.602.620,-**, meningkat sebesar 16,89 persen dibandingkan periode sebelumnya sebesar **Rp28.680.143.906.641,-**.

Secara agregat, ketiga BLU menunjukkan pertumbuhan pendapatan yang dipengaruhi optimalisasi pengelolaan dana dan peningkatan volume transaksi pada periode 2025.

Tabel D. 2 Saldo Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak BLU (Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	NAIK / TURUN %
Pendapatan Dana Perkebunan = Komoditas Perkebunan Strategis Lainnya	256.121.000	0	100,00
Pendapatan Dana Perkebunan Kelapa Sawit	31.922.865.644.930	25.763.100.829.716	23,91
Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri- Lembaga/Badan Usaha - Uang	418.464.221.176	691.646.713.137	(39,50)
Pendapatan Hibah Terikat Luar Negeri- Negara - Uang	473.212.601.201	0	100,00
Pendapatan Investasi	1.863.355.092.837	374.300.591.757	397,82
Pendapatan Jasa Layanan Perbankan BLU	645.345.084.961	3.441.524.004.702	(81,25)
Pendapatan Lain-lain BLU	18.746.146.224	4.749.778.040	294,67

Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus Lainnya	648.981.755.359	596.836.856.353	8,74
Jumlah	35.991.226.667.688	30.872.158.773.705	16,58

Berdasarkan komposisi akun, kontribusi terbesar pendapatan badan layanan umum berasal dari pendapatan dana perkebunan kelapa sawit (88,70%), pendapatan investasi (5,18%), pendapatan pengelolaan dana khusus lainnya (1,80%).

Realisasi Pendapatan Badan Layanan Umum pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebesar **Rp35.572.349.839.369,-** sedangkan pada Laporan Operasional (LO) sebesar **Rp35.991.226.667.688,-**, sehingga terdapat selisih sebesar **Rp418.876.828.319,-** (1,18 persen) dimana realisasi LO lebih tinggi. Selisih terbesar terdapat pada akun pendapatan dana perkebunan - kelapa sawit sebesar **Rp417.956.720.705,-**. Hal ini terutama disebabkan oleh pengakuan pendapatan yang masih harus diterima pada akhir periode pelaporan yang telah diakui sebagai pendapatan berbasis akrual pada LO namun belum direalisasikan dalam bentuk kas sehingga belum tercermin pada LRA. Di sisi lain, terdapat pendapatan diterima dimuka yang telah diakui sebagai pendapatan pada LRA karena kas telah diterima, namun secara akrual belum seluruhnya diakui sebagai pendapatan pada LO sampai dengan akhir periode pelaporan.

Beban
Rp47.843.393.027.593,-

Pos Beban

Jumlah Beban untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar **Rp47.843.393.027.593,-** dan **Rp41.591.266.795.636,-**, atau mengalami kenaikan sebesar 15,03 persen dibandingkan periode sebelumnya. Rincian Beban disajikan pada penjelasan berikut.

Beban Pegawai
Rp261.811.228.365,-

D.3 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar **Rp261.811.228.365,-** dan **Rp251.069.390.043,-**. Beban Pegawai merupakan beban atas kompensasi yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah, namun

belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan. Dibandingkan periode sebelumnya, jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 4,28 persen.

Satker dengan beban pegawai terbesar adalah BPD LH sebesar Rp68.089.264.680,-, BPDP sebesar Rp66.358.493.287,-, PIP sebesar Rp44.680.592.631,-, yang secara agregat menyumbang 68,42 persen dari total beban pegawai Kementerian.

Tabel D. 3 Saldo Beban Pegawai Tahun 2025-2024 (Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	NAIK / TURUN %
Beban Gaji Pokok PPPK	2.556.472.800	2.396.292.800	6,68
Beban Gaji dan Tunjangan	179.128.350.598	166.135.774.270	7,82
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	227.521.000	488.348.000	(53,41)
Beban Pembulatan Gaji PPPK	40.862	36.321	12,50
Beban Tunj. PPh PNS	590.450	0	100,00
Beban Tunjangan Anak PPPK	18.580.880	16.082.072	15,54
Beban Tunjangan Beras PPPK	101.098.320	92.263.080	9,58
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	430.920.000	403.920.000	6,68
Beban Tunjangan Khusus Papua PPPK	5.100.000	4.675.000	9,09
Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	98.670.880	88.099.000	12,00
Beban Uang Lembur	32.555.026.000	35.353.831.350	(7,92)
Beban Uang Lembur PPPK	370.113.000	225.594.900	64,06
Beban Uang Makan PNS	45.930.600.625	45.490.836.150	0,97
Beban Uang Makan PPPK	388.142.950	373.637.100	3,88
Jumlah	261.811.228.365	251.069.390.043	4,28

Berdasarkan komposisi akun, kontribusi terbesar beban pegawai berasal dari belanja gaji dan tunjangan (68,42%), belanja uang makan pns (17,54%), belanja uang lembur (12,43%).

Realisasi Beban Pegawai pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebesar **Rp261.866.204.965,-** sedangkan pada Laporan Operasional (LO) sebesar **Rp261.811.228.365,-**, sehingga terdapat selisih sebesar **Rp54.976.600,-** (0,02 persen) dimana realisasi LRA lebih tinggi. Selisih terbesar terdapat pada akun beban uang makan pns sebesar **Rp62.082.200,-**. Hal ini terutama disebabkan oleh realisasi pembayaran kas atas utang belanja pegawai tahun sebelumnya yang telah diakui sebagai beban pada LO periode lalu, namun baru direalisasikan secara kas pada tahun berjalan. Di sisi lain, terdapat pengakuan beban akrual baru atas belanja pegawai yang masih harus dibayar per akhir periode pelaporan, menambah beban LO namun belum direalisasikan dalam bentuk kas, yang akan dibayarkan di awal tahun berikutnya.

Secara rinci, terdapat beban yang masih harus dibayar atas beban uang lembur sebesar Rp7.351.650,-, yang akan direalisasikan secara kas pada awal tahun anggaran berikutnya dengan membentuk Utang Belanja pada Neraca.

Beban Persediaan
Rp10.798.252.465,-

D.4 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar **Rp10.798.252.465,-** dan **Rp13.564.000.704,-**. Beban Persediaan merupakan beban yang timbul dari konsumsi barang-barang habis pakai, termasuk barang hasil produksi, baik yang dipasarkan maupun yang tidak dipasarkan. Dibandingkan periode sebelumnya, jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 20,39 persen.

Satker dengan beban persediaan terbesar adalah Kantor Pusat DJPB sebesar Rp2.097.306.507,-, BPDP sebesar Rp301.130.457,-, BPD LH sebesar Rp180.548.303,-, yang secara agregat menyumbang 23,88 persen dari total beban persediaan Kementerian.

Tabel D. 4 Saldo Beban Persediaan Tahun 2025-2024 (Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	NAIK / TURUN %
Beban Persediaan konsumsi	10.729.265.471	13.564.000.704	(20,90)
Beban persediaan lainnya	68.986.994	0	100,00
Jumlah	10.798.252.465	13.564.000.704	(20,39)

Berdasarkan komposisi akun, kontribusi terbesar beban persediaan berasal dari belanja persediaan konsumsi (99,36%), belanja persediaan lainnya (0,64%).

Realisasi Beban Persediaan hanya terdapat pada Laporan Operasional (LO) sebesar **Rp10.798.252.465,-**.

**Beban Barang dan Jasa
Rp46.441.116.145.758,-**

D.5 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar **Rp46.441.116.145.758,-** dan **Rp40.080.337.256.561,-**. Beban Barang dan Jasa merupakan beban yang timbul akibat konsumsi atas jasa-jasa serta penggunaan barang dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas. Dibandingkan periode sebelumnya, jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 15,87 persen.

Satker dengan beban barang dan jasa terbesar adalah BPDP sebesar Rp45.313.465.312.048,-, BPD LH sebesar Rp840.847.816.850,-, Kantor Pusat DJPB sebesar Rp86.578.134.677,-, yang secara agregat menyumbang 99,57 persen dari total beban barang dan jasa Kementerian.

Tabel D. 5 Saldo Beban Barang dan Jasa Tahun 2025-2024 (Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	NAIK / TURUN %
Beban Bahan	15.146.809.261	42.650.777.668	(64,49)
Beban Barang	15.196.839.426	13.017.159.940	16,74
Beban Barang Non Operasional Lainnya	1.349.696.052	4.585.126.238	(70,56)
Beban Barang Operasional Lainnya	6.199.541.613	23.309.877.027	(73,40)

Beban Honor Operasional Satuan Kerja	23.284.506.324	14.717.657.135	58,21
Beban Honor Output Kegiatan	5.936.040.000	5.297.450.000	12,05
Beban Jasa	51.914.299.412	58.983.926.746	(11,99)
Beban Jasa Konsultan	52.500.000	220.950.000	(76,24)
Beban Jasa Lainnya	13.477.627.296	51.036.439.413	(73,59)
Beban Jasa Profesi	2.530.814.000	4.813.755.283	(47,43)
Beban Keperluan Perkantoran	148.429.452.334	136.646.848.797	8,62
Beban Langganan Air	1.877.885.184	2.309.718.648	(18,70)
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	679.807.081	591.454.327	14,94
Beban Langganan Listrik	32.877.260.669	37.645.023.177	(12,67)
Beban Langganan Telepon	3.177.106.549	3.766.102.029	(15,64)
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	1.850.823.901	6.576.456.650	(71,86)
Beban Pengelolaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit	45.292.826.587.809	39.009.345.248.702	16,11
Beban Pengelolaan Dana Program Lingkungan Hidup	820.931.625.530	659.088.543.071	24,56
Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	2.020.673.543	1.914.465.475	5,55
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	208.454.694	983.049.856	(78,80)
Beban Sewa	1.147.795.080	2.837.226.379	(59,55)
Jumlah	46.441.116.145.758	40.080.337.256.561	15,87

Berdasarkan komposisi akun, kontribusi terbesar beban barang dan jasa berasal dari belanja pengelolaan dana perkebunan kelapa sawit (97,53%), belanja pengelolaan dana program lingkungan hidup (1,77%), belanja keperluan perkantoran (0,32%).

Realisasi Beban Barang dan Jasa pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebesar **Rp50.815.937.717.522,-** sedangkan pada Laporan Operasional (LO) sebesar **Rp46.441.116.145.758,-**, sehingga terdapat

selisih sebesar **Rp4.374.821.571.764,-** (8,61 persen) dimana realisasi LRA lebih tinggi. Selisih terbesar terdapat pada akun beban pengelolaan dana perkebunan sebesar **Rp4.376.187.731.934,-**. Hal ini terutama disebabkan oleh belanja dibayar dimuka yang telah diakui sebagai belanja pada LRA karena kas telah dibayarkan, namun secara akrual belum seluruhnya diakui sebagai beban pada LO. Selain itu, terdapat beban yang masih harus dibayar yang telah diakui sebagai beban berbasis akrual pada LO namun belum direalisasikan dalam bentuk kas pada periode pelaporan. Secara rinci, prepayment tersebut mencakup belanja sewa gedung, tanah, dan bangunan, sementara utang belanja meliputi tagihan listrik, air, dan telepon yang pembayarannya tidak melalui Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) untuk common expense.

Secara rinci, penyesuaian tersebut mencakup porsi belanja sewa yang telah dibayarkan secara kas namun masa sewanya belum berakhir per tanggal pelaporan sebesar **Rp188.658.926,-**, yang dicatat sebagai Belanja Dibayar Dimuka (BDDM) pada Neraca.

**Beban Pemeliharaan
Rp341.714.317.887,-**

D.6 Beban Pemeliharaan

Jumlah Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar **Rp341.714.317.887,-** dan **Rp325.894.723.183,-**. Beban Pemeliharaan merupakan pengeluaran yang bertujuan untuk menjaga dan mempertahankan aset tetap atau aset lainnya dalam kondisi operasional yang optimal. Dibandingkan periode sebelumnya, jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 4,85 persen.

Satker dengan beban pemeliharaan terbesar adalah Kantor Pusat DJPB sebesar Rp274.557.322.724,-, Kanwil DJPB PROV DKI sebesar Rp1.877.374.247,-, PIP sebesar Rp1.352.339.346,-, yang secara agregat menyumbang 81,29 persen dari total beban pemeliharaan Kementerian.

Tabel D. 6 Saldo Beban Pemeliharaan Tahun 2025-2024 (Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	NAIK / TURUN %
Beban Pemeliharaan	2.147.077.862	1.945.454.637	10,36

Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	42.685.116.985	58.092.239.600	(26,52)
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	5.641.257.502	2.725.987.964	106,94
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	290.503.971.896	262.381.743.898	10,72
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	736.893.642	749.297.084	(1,66)
Jumlah	341.714.317.887	325.894.723.183	4,85

Berdasarkan komposisi akun, kontribusi terbesar beban pemeliharaan berasal dari belanja pemeliharaan peralatan dan mesin (85,01%), belanja pemeliharaan gedung dan bangunan (12,49%), belanja pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya (1,65%).

Realisasi Beban Pemeliharaan pada Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebesar **Rp341.633.541.632,-** sedangkan pada Laporan Operasional (LO) sebesar **Rp341.714.317.887,-**, sehingga terdapat selisih sebesar **Rp80.776.255,-** (0,02 persen) dimana realisasi LO lebih tinggi. Selisih terbesar terdapat pada akun beban persediaan bahan untuk pemeliharaan sebesar **Rp736.893.642,-**. Hal ini terutama disebabkan oleh pengakuan beban yang masih harus dibayar pada akhir periode pelaporan yang telah diakui sebagai beban berbasis akrual pada LO namun belum direalisasikan dalam bentuk kas sehingga belum tercermin pada LRA. Di sisi lain, terdapat belanja dibayar dimuka yang telah diakui sebagai belanja pada LRA karena kas telah dibayarkan, namun secara akrual belum seluruhnya diakui sebagai beban pada LO.

*Beban Perjalanan Dinas
Rp101.858.099.018,-*

D.7 Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar **Rp101.858.099.018,-** dan **Rp147.398.704.480,-**. Beban Perjalanan Dinas merupakan pengeluaran yang timbul dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan, baik untuk perjalanan dinas dalam negeri maupun luar negeri yang berkaitan dengan kepentingan dinas. Dibandingkan periode sebelumnya, jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 30,90 persen.

Satker dengan beban perjalanan dinas terbesar adalah Kantor Pusat DJPB sebesar Rp54.542.283.714,-, PIP sebesar Rp11.275.873.274,-, BPDH sebesar Rp9.891.007.785,-, yang secara agregat menyumbang 74,33 persen dari total beban perjalanan dinas Kementerian.

Tabel D. 7 Saldo Beban Perjalanan Dinas Tahun 2025-2024 (Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	NAIK / TURUN %
Beban Perjalanan	25.942.272.776	31.483.610.445	(17,60)
Beban Perjalanan Dinas Biasa	67.673.345.509	96.660.229.847	(29,99)
Beban Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	651.447.000	1.682.249.600	(61,28)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.475.738.436	4.672.251.887	(47,01)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.373.414.500	7.570.387.000	(55,44)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	1.741.880.797	5.329.975.701	(67,32)
Jumlah	101.858.099.018	147.398.704.480	(30,90)

Berdasarkan komposisi akun, kontribusi terbesar beban perjalanan dinas berasal dari belanja perjalanan dinas biasa (66,44%), belanja perjalanan (25,47%), belanja perjalanan dinas paket meeting dalam kota (3,31%).

Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda Rp587.241.203,-

D.8 Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda

Jumlah Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar **Rp587.241.203,-** dan **Rp0,-**. Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda merupakan pengakuan beban atas pengeluaran/belanja barang yang sejak awal perencanaan pengadaannya memang diniatkan untuk diserahkan (diberikan/dihibahkan) kepada pihak ketiga, yaitu masyarakat atau Pemerintah Daerah, dan bukan untuk digunakan dalam kegiatan operasional kantor sendiri.

Satker dengan beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda terbesar adalah PIP sebesar Rp587.241.203,-,

yang secara agregat menyumbang 100,00 persen dari total beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda Kementerian.

Tabel D. 8 Saldo Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda Tahun 2025-2024 (Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	NAIK / TURUN %
Beban Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	82.500.000	0	100,00
Beban Persediaan Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	164.910.000	0	100,00
Beban Persediaan Peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat	339.831.203	0	100,00
Jumlah	587.241.203	0	100,00

Berdasarkan komposisi akun, kontribusi terbesar beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda berasal dari belanja persediaan peralatan dan mesin untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat (57,87%), belanja persediaan aset lain-lain untuk diserahkan kepada masyarakat (28,08%), belanja barang persediaan lainnya untuk dijual/diserahkan ke masyarakat (14,05%).

Realisasi Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda hanya terdapat pada Laporan Operasional (LO) sebesar **Rp587.241.203,-**. Beban barang tersebut merupakan beban untuk mencatat penyerahan barang persediaan dalam bentuk peralatan mesin, aset tetap lainnya, maupun aset lain-lain untuk diserahkan kepada Masyarakat dalam rangka pemberdayaan UMKM selama periode pelaporan.

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp354.351.761.573,-

D.9 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar **Rp354.351.761.573,-** dan **Rp347.374.729.201,-**. Beban Penyusutan dan Amortisasi merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset tersebut, serta amortisasi atas aset tak

berwujud. Dibandingkan periode sebelumnya, jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 2,01 persen.

Satker dengan beban penyusutan dan amortisasi terbesar adalah Kantor Pusat DJPB sebesar Rp162.145.641.197,-, BPD LH sebesar Rp10.721.700.867,-, Kanwil DJPB PROV DKI sebesar Rp5.435.620.214,-, yang secara agregat menyumbang 50,32 persen dari total beban penyusutan dan amortisasi Kementerian.

Kenaikan beban penyusutan TA 2025 terutama dipengaruhi oleh meningkatnya beban penyusutan peralatan dan mesin sebesar 5,05 persen menjadi **Rp191.311.571.820,-**. Selain itu, terdapat kenaikan beban amortisasi lisensi sebesar 9,37 persen menjadi Rp53.991.376.238,-.

Tabel D. 9 Saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 (Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	NAIK / TURUN %
Beban Amortisasi Lisensi	53.991.376.238	49.367.764.550	9,37
Beban Amortisasi Software	6.463.954.899	14.079.957.161	(54,09)
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	42.795.695	155.076.610	(72,40)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	102.008.102.600	101.347.971.926	0,65
Beban Penyusutan Irigasi	4.386.459	4.386.459	0,00
Beban Penyusutan Jaringan	12.834.442	12.834.442	0,00
Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	516.739.420	297.255.460	73,84
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	191.311.571.820	182.109.482.593	5,05
Jumlah	354.351.761.573	347.374.729.201	2,01

Berdasarkan komposisi akun, kontribusi terbesar beban penyusutan dan amortisasi berasal dari belanja penyusutan peralatan dan mesin (53,99%), belanja penyusutan gedung dan bangunan (28,79%), belanja amortisasi lisensi (15,24%).

Pada periode 2025, dibentuk jurnal akrual atas penyusutan dan amortisasi aset berdasarkan Kartu Inventaris Barang (KIB) SIMAK-

BMN, meliputi beban amortisasi software sebesar Rp6.463.954.899,-. Jurnal tersebut mencatat penambahan beban penyusutan/amortisasi di sisi Debet dan akumulasi penyusutan/amortisasi di sisi Kredit pada Neraca.

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih
Rp331.155.981.324,-

D.10 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar **Rp331.155.981.324,-** dan **Rp425.627.991.464,-**. Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban yang dicatat untuk mengantisipasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode akuntansi, sehingga nilai piutang yang disajikan mencerminkan nilai bersih yang dapat direalisasi. Dibandingkan periode sebelumnya, jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 22,20 persen.

Satker dengan beban penyisihan piutang tak tertagih terbesar adalah BPDFLH sebesar Rp175.991.433.273,-, BPDF sebesar Rp150.769.283.508,-, PIP sebesar Rp4.413.117.094,-, yang secara agregat menyumbang 100,01 persen dari total beban penyisihan piutang tak tertagih Kementerian.

Tabel D. 10 Rincian Saldo Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Tahun 2025-2024 (Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	NAIK / TURUN %
Beban Investasi Non Permanen BLU Bentuk Tagihan Diragukan Tertagih	1.543.726.211	47.281.803.489	(96,74)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang – Tunjangan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi	(18.060.000)	(560.400)	(3.122,70)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pengelola Dana Bergulir	178.860.824.156	378.259.039.414	(52,71)
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang BLU Pengelola Dana Lainnya	150.769.283.508	86.876.584	173.444,21
Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Kegiatan Operasional Lainnya BLU	0	(60.359)	100,00

Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Piutang Lainnya	207.449	892.736	(76,76)
Jumlah	331.155.981.324	425.627.991.464	(22,20)

Berdasarkan komposisi akun, kontribusi terbesar beban penyisihan piutang tak tertagih berasal dari belanja penyisihan piutang tidak tertagih – piutang blu pengelola dana bergulir (54,01%), belanja penyisihan piutang tidak tertagih – piutang blu pengelola dana lainnya (45,53%), belanja investasi non permanen blu bentuk tagihan diragukan tertagih (0,47%).

Pada periode 2025, dibentuk jurnal penyisihan piutang senilai Rp331.173.833.875,- sesuai hasil analisis kualitas piutang per tanggal pelaporan. Rinciannya meliputi beban penyisihan piutang tidak tertagih - piutang blu sebesar Rp150.769.283.508,-, beban penyisihan piutang tidak tertagih - piutang blu pengelola dana bergulir sebesar Rp178.860.824.156,-, beban investasi non permanen blu bentuk tagihan diragukan tertagih sebesar Rp1.543.726.211,-. Jurnal ini mencatat Debet Beban Penyisihan Piutang dan Kredit Penyisihan Piutang Tidak Tertagih pada Neraca.

Kegiatan Non Operasional
Rp95.201.292.703,-

Pos Kegiatan Non Operasional

Surplus dari Kegiatan Non Operasional untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar **Rp95.201.292.703,-** dan **Rp113.323.930.866,-**, atau mengalami penurunan sebesar 15,99 persen dibandingkan periode sebelumnya. Rincian Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional disajikan dalam tabel berikut.

Tabel D. 11 Rincian Saldo Kegiatan Non Operasional Tahun 2025-2024 (Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	NAIK / TURUN %
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	829.435.172	(1.699.085.166)	148,82
Surplus/Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya	94.371.857.531	115.023.016.032	(17,95)
Jumlah	95.201.292.703	113.323.930.866	(15,99)

Pelepasan Aset Non Lancar
Rp829.435.172,-

Pos Pelepasan Aset Non Lancar

Surplus Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar **Rp829.435.172,-** dan **(Rp1.699.085.166,-)**, atau mengalami kenaikan sebesar 148,82 persen dibandingkan periode sebelumnya.

Pendapatan Pelepasan Aset
(Rp4.477.021.378,-)

D.11 Pendapatan Pelepasan Aset

Jumlah Pendapatan Pelepasan Aset per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar **Rp4.477.021.378,-** dan **Rp2.802.026.854,-**. Pendapatan Pelepasan Aset merupakan pendapatan yang diperoleh dari penjualan atau pemindahtanganan aset tetap milik pemerintah, termasuk peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, serta aset lainnya. Dibandingkan periode sebelumnya, jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 59,78 persen.

Tabel D. 12 Rincian Saldo Pendapatan Pelepasan Aset Tahun 2025-2024 (Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	NAIK / TURUN %
Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	(488.053.884)	(846.639.703)	42,35
Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	(3.962.694.494)	(1.885.034.251)	(110,22)
Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	(26.273.000)	(70.352.900)	62,66
Jumlah	(4.477.021.378)	(2.802.026.854)	(59,78)

Berdasarkan komposisi akun, kontribusi terbesar pendapatan pelepasan aset berasal dari pendapatan dari penjualan peralatan dan mesin (88,51%), pendapatan dari pemindahtanganan bmn lainnya (10,90%), pendapatan dari penjualan tanah, gedung, dan bangunan (0,59%).

Beban Pelepasan Aset
Rp3.647.586.206,-

D.12 Beban Pelepasan Aset

Jumlah Beban Pelepasan Aset per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar **Rp3.647.586.206,-** dan **Rp4.501.112.020,-**. Beban Pelepasan Aset merupakan beban yang timbul dari proses penjualan atau pemindahtanganan aset tetap milik

pemerintah, yang mencatat nilai buku aset yang dilepaskan. Dibandingkan periode sebelumnya, jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 18,96 persen.

Tabel D. 13 Rincian Saldo Beban Pelepasan Aset Tahun 2025-2024 (Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	NAIK / TURUN %
Beban Pelepasan Aset	3.647.586.206	1.437.232.125	153,79
Kerugian Pelepasan Aset	0	3.063.879.895	(100,00)
Jumlah	3.647.586.206	4.501.112.020	(18,96)

Berdasarkan komposisi akun, kontribusi terbesar beban pelepasan aset berasal dari beban pelepasan aset (100,00%).

Kegiatan Non Operasional Lainnya
Rp94.371.857.531,-

Pos Kegiatan Non Operasional Lainnya

Surplus Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar **Rp94.371.857.531,-** dan **Rp115.023.016.032,-**, atau mengalami penurunan sebesar 17,95 persen dibandingkan periode sebelumnya.

Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
(Rp94.633.108.673,-)

D.13 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar **Rp94.633.108.673,-** dan **Rp127.158.427.083,-**. Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya mencakup penerimaan yang bersifat tidak rutin dan tidak terkait langsung dengan kegiatan operasional utama entitas. Dibandingkan periode sebelumnya, jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar 25,58 persen.

Tabel D. 14 Rincian Saldo Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025-2024 (Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	NAIK / TURUN %
Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.	0	(77.760.000)	100,00

Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	0	(1.840.400)	100,00
Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	0	(4.000.000)	100,00
Penerimaan Kembali Belanja Barang BLU Tahun Anggaran Yang Lalu	(94.542.835.049)	(124.985.493.778)	24,36
Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	(86.272.324)	(1.776.803.855)	95,14
Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	(4.001.300)	(312.529.050)	98,72
Jumlah	(94.633.108.673)	(127.158.427.083)	25,58

Berdasarkan komposisi akun, kontribusi terbesar pendapatan dari kegiatan non operasional lainnya berasal dari penerimaan kembali belanja barang blu tahun anggaran yang lalu (99,90%), penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran yang lalu (0,09%), penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu (0,00%).

Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Rp261.251.142,-

D.14 Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Jumlah Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar **Rp261.251.142,-** dan **Rp12.135.411.051,-**. Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya mencakup pengeluaran yang bersifat tidak rutin dan tidak terkait langsung dengan kegiatan operasional utama entitas. Dibandingkan periode sebelumnya, jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 97,85 persen.

Tabel D. 15 Rincian Saldo Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Tahun 2025-2024 (Rupiah)

URAIAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024	NAIK / TURUN %
Beban Lain-Lain	0	12.012.205.935	(100,00)
Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	680	1.635.400	(99,96)
Beban Persediaan Rusak/Usang	261.250.462	121.569.716	114,90
Jumlah	261.251.142	12.135.411.051	(97,85)

Berdasarkan komposisi akun, kontribusi terbesar beban dari kegiatan non operasional lainnya berasal dari belanja persediaan rusak/usang (100,00%), belanja penyesuaian nilai persediaan (0,00%).

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

E.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal
Rp46.424.125.342.175,-

Saldo Ekuitas awal pada tanggal 1 Januari 2025 dan 1 Januari 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp46.424.125.342.175,-** dan **Rp55.683.836.703.776,-**.

E.2 Surplus/Defisit LO

Defisit LO
Rp11.753.942.607.122,-

Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp11.753.942.607.122,-** dan defisit LO pada 31 Desember 2024 sebesar **Rp10.601.869.645.028,-**. Surplus/Defisit LO merupakan selisih kurang/lebih antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

E.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi

*Dampak Kumulatif
Perubahan
Kebijakan Akuntansi*
Rp0

Tidak terdapat Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.

E.4.1 Penyesuaian Nilai Aset

Penyesuaian Nilai Aset
Rp0

Tidak terdapat Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.

E.4.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan
Rp0

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Tidak terdapat Koreksi tambah atas nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.

E.4.3 Koreksi atas Reklasifikasi

Koreksi atas Reklasifikasi
Rp0

Koreksi atas Reklasifikasi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi atas perpindahan suatu akun dari suatu pos ke pos yang lain dalam bagan akun standar agar sesuai dengan yang seharusnya. Tidak terdapat Koreksi atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.

E.4.4 Selisih Revaluasi Aset

Selisih Revaluasi Aset
Rp0

Selisih Revaluasi Aset merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang Aset Tetap. Tidak terdapat Selisih Revaluasi Aset untuk periode yang berakhir 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.

E.4.5 Koreksi Nilai Aset Non-Revaluasi

*Koreksi Nilai Aset Non-
Revaluasi*
Rp14.011.228.562,-

Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi adalah transaksi yang mengoreksi Aset, namun bukan diakibatkan revaluasi nilai, misalnya koreksi aset atas temuan

auditor, reklasifikasi antar-aset yang menyebabkan perubahan penyusutan karena perbedaan masa manfaat aset, maupun penyebab koreksi nilai aset non-revaluasi lainnya. Koreksi Penilaian Aset Non Revaluasi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp14.011.228.562,- dan (Rp860.351.666,-). Koreksi terbesar ada pada BLU BPD LH yaitu sebesar Rp13.863.389.429. Koreksi ini berasal dari penyesuaian saldo awal aset terkait pengadaan peralatan dan mesin yang belum dicatat sebagai aset pada periode sebelumnya.

E.4.6 Lain-Lain

Lain-Lain
(Rp2.088.199.319.468,-)

Koreksi Lain-Lain merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas Pendapatan, koreksi atas Beban, koreksi atas Hibah, koreksi atas Piutang, dan koreksi atas Kewajiban. Adapun nilai Koreksi Lain-Lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar (Rp2.088.199.319.468,-) dan (Rp20.717.732.321,-).

E.5 Transaksi Antar Entitas

Transaksi Antar Entitas
Rp24.532.048.165,-

Nilai Transaksi Antar Entitas pada tanggal 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar surplus Rp24.532.048.165,- dan Rp1.363.736.367.415,-. Rincian Transaksi Antar Entitas sebagai berikut:

Tabel E. 1 Rincian Transaksi Antar Entitas Tahun 2025 dan Tahun 2024 (Rupiah)

NO	URAIAN AKUN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
1	Ditagihkan ke Entitas Lain	1.082.480.273.059	1.362.561.426.044
2	Diterima dari Entitas Lain	(15.412.243.748)	(8.876.728.294)
3	Transfer Keluar	(492.779.356.922)	(160.625.066.441)
4	Transfer Masuk	495.300.701.630	168.852.905.606
5	Pengesahan Hibah Langsung	483.059.729	835.696.500
6	Setoran Surplus BLU	(1.045.540.385.583)	
7	Pengesahan Hibah Langsung TAYL		988.134.000
	Jumlah	24.532.048.165	1.363.736.367.415

Penjelasan akun-akun Transaksi Antar Entitas sebagai berikut:

1. Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan nilai realisasi neto belanja;
2. Diterima dari Entitas Lain merupakan nilai realisasi neto PNBPN, namun tidak termasuk realisasi PNBPN BPD Perkebunan dan BPD Lingkungan Hidup;
3. Transfer Keluar merupakan nilai transaksi transfer keluar BMN (rincian per satker disajikan dalam lampiran);
4. Transfer Masuk merupakan nilai transaksi transfer masuk BMN (rincian per satker disajikan dalam lampiran);
5. Pengesahan Hibah Langsung sebesar Rp483.059.729,- merupakan nilai realisasi pada satuan kerja KPPN Kuala Tungkal.
6. Setoran Surplus BLU merupakan setoran kas dari BLU BPD sebesar Rp1.030.201.031.120,- dan BLU BPD LH sebesar Rp15.339.354.463,-.

E.5.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

DDEL
Rp15.412.243.748,-
DKEL
Rp1.082.480.273.059,-

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar-entitas atas pendapatan dan belanja pada KL yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode 31 Desember 2025, DDEL sebesar **Rp15.412.243.748,-** sedangkan DKEL sebesar **Rp1.082.480.273.059,-**.

E.5.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk
Rp495.300.701.630,-
Transfer Keluar
Rp492.779.356.922,-

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal kementerian atau lembaga, antar kementerian atau lembaga, dan antara kementerian atau lembaga dengan BA-BUN. Transfer Masuk dan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 masing-masing sebesar **Rp495.300.701.630,-** dan **Rp492.779.356.922,-**. Adapun rincian Transfer Masuk dan Transfer Keluar sampai dengan 31 Desember 2025 disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

E.5.3 Pengesahan Hibah Langsung dan Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung

Pengesahan Hibah Langsung
Rp483,059,729,-

Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung entitas dalam bentuk kas, barang, maupun jasa, sedangkan pencatatan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Pengembalian Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung entitas. Pengesaha Hibah Langsung per 31 Desember 2025 adalah sebesar **Rp483.059.729,-** yang merupakan hibah barang pada KPPN Kuala Tungkal.

E.6 Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir
Rp32.620.526.692.312,-

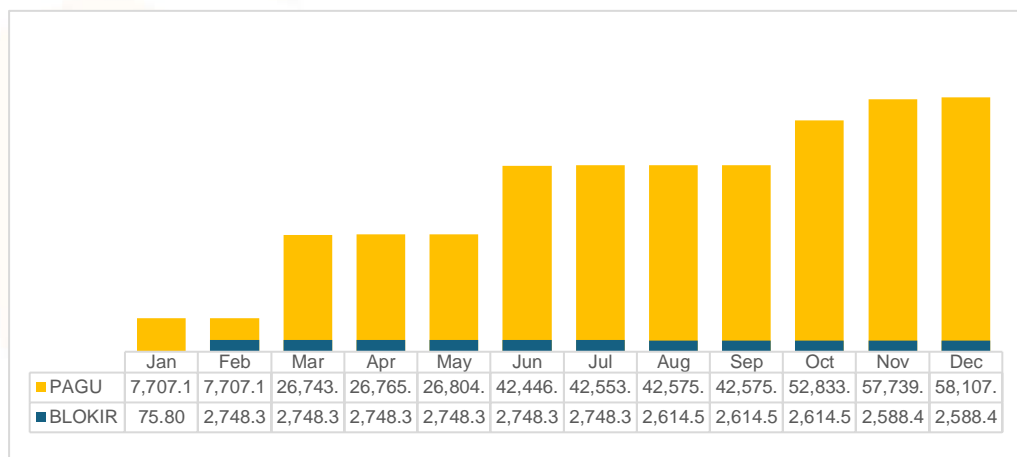
Nilai ekuitas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar **Rp32.620.526.692.312,-** dan **Rp46.424.125.342.175,-**.

F. PENGUNGKAPAN-PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 Perkembangan Program Efisiensi Anggaran

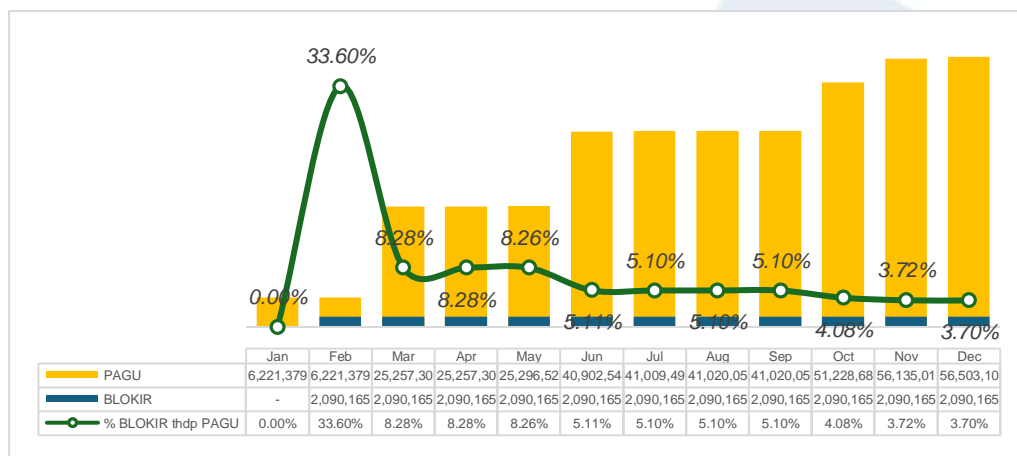
Sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, seluruh Kementerian/Lembaga Negara diinstruksikan untuk melakukan reviu sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing, dalam rangka efisiensi atas anggaran belanja.

Grafik F. 1 Alokasi Belanja Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2025 (Miliar Rupiah)



Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai salah satu entitas dibawah Kementerian Keuangan juga harus melakukan efisiensi baik pada tingkat satuan kerja dan Badan Layanan Umum. Total alokasi pada awal tahun 2025 yakni Rp7.707.192.134.000,- yang terdiri dari Rp6.221.379.617.000,- untuk satuan kerja BLU dan Rp1.485.812.517.000,- untuk satuan kerja non BLU. Sesuai Inpres 1 Tahun 2025, pada periode Februari 2025 total anggaran yang diblokir sebesar Rp2.748.355.372.000,- atau 35,66 persen dari total alokasi Ditjen Perbendaharaan.

Grafik F. 2 Alokasi dan Blokir Anggaran Satuan Kerja BLU Tahun 2025

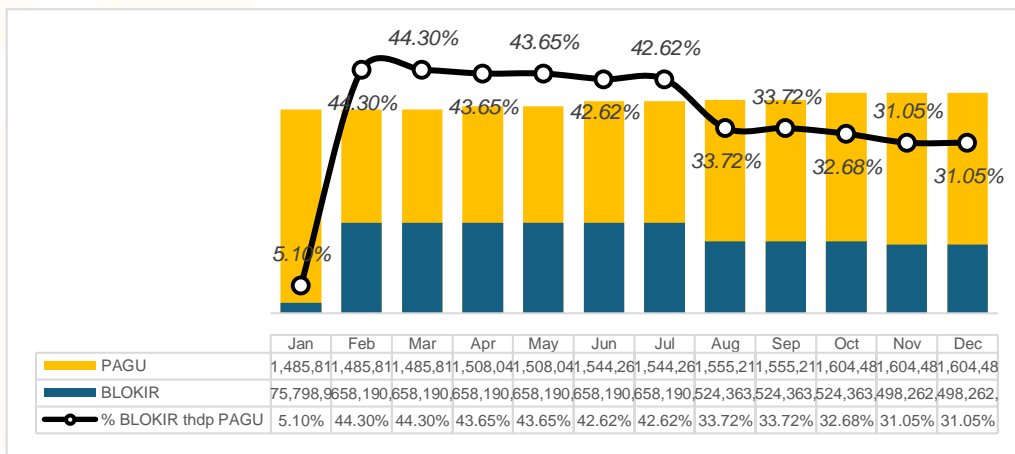


Untuk satuan kerja BLU persentase alokasi yang terkena efisiensi menunjukkan penurunan sampai pada akhir tahun 2025 yang disebabkan oleh peningkatan signifikan pada alokasi belanja satuan kerja BLU yang berasal dari peningkatan

penerimaan BLU. Nilai alokasi yang diblokir sepanjang tahun 2025 adalah Rp2.090.165.217.000,-.

Kondisi yang berbeda pada satuan kerja non BLU yang pada awal tahun 2025 menerima alokasi sebesar Rp1.485.812.517.000,- dan pada akhir Januari 2025 kemudian sesuai Inpres 1 Tahun 2025 dilakukan efisiensi sebesar 44,30 persen dari total alokasi. Nilai alokasi yang harus diefisiensikan pada periode Februari 2025 adalah sebesar Rp658.190.155.000,-.

Grafik F. 3 Alokasi dan Blokir Satuan Kerja Non BLU Tahun 2025



Perkembangan alokasi anggaran yang harus diefisiensikan sepanjang tahun 2025 kemudian menunjukkan penurunan pada periode Semester II tahun 2025. Jika dibandingkan dengan nilai alokasi yang diblokir pada periode Februari 2025 maka terjadi penurunan 24,30 persen.

Sepanjang tahun 2025 tidak hanya terjadi efisiensi tetapi karena juga terjadi peningkatan alokasi anggaran yang secara total meningkat 653,94persen yang dipengaruhi oleh peningkatan pengesahan belanja satuan kerja BLU, sedangkan untuk satuan kerja non BLU terjadi peningkatan 7,99persen dibandingkan dengan alokasi pada awal tahun 2025. Alokasi belanja Ditjen Perbendaharaan pada akhir tahun 2025 sebesar Rp58.107.597.813.000,- yang terdiri dari alokasi untuk satuan kerja BLU sebesar Rp56.503.109.356.000,- dan untuk satuan kerja non BLU sebesar Rp1.604.488.457.000,-.

F.2 Likuidasi Satker SPAN

Satuan Kerja Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) tidak lagi mendapatkan alokasi anggaran Tahun 2025 sehingga status sampai dengan 31 Desember 2025 adalah Satker inaktif bersaldo. Berdasarkan hal tersebut, sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.05/2017 tentang Pelaksanaan Likuidasi Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Pada Kementerian Negara/Lembaga Pasal 3 huruf c, Satker SPAN memenuhi persyaratan sebagai entitas akuntansi atau entitas pelaporan untuk dilikuidasi. Dalam rangka likuidasi tersebut, Satker SPAN telah menyelesaikan seluruh hak dan kewajiban sehingga aset dan kewajiban pada necara Satker SPAN per 30 Juni 2025 bersaldo nihil.

F.3 Pengungkapan Capaian Kinerja

1. Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko (CD)

Program Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko telah terealisasi sebesar Rp32.976.886.820,- atau 37,32 persen dari pagu sebesar Rp88.359.993.000,- dengan rincian sebagai berikut.

Tabel F. 1 Capaian Kinerja Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko (CD) Tahun 2025

Kode	Kegiatan	Rincian Output	Satuan	Belanja			Keluaran			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
6212	AEF	Komunikasi dan Edukasi Implementasi Aplikasi Investasi Pemerintah	Orang	356.814.000	139.529.428	39,10	80	80	100,00	
		Komunikasi dan Edukasi Peningkatan Kinerja Investasi Pemerintah	Orang	6.660.000	3.638.000	54,62	30	30	100,00	
		Komunikasi dan Edukasi Peraturan, Ketetapan dan Pedoman Mengenai Investasi Pemerintah	Orang	720.379.000	324.332.392	45,02	245	245	100,00	
		Komunikasi Peraturan dan Pedoman Mengenai Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah	Orang	2.098.653.000	747.668.662	35,63	400	400	100,00	
		Komunikasi Peraturan dan Pedoman Mengenai Pembayaran Atas Beban APBN	Orang	1.019.145.000	446.117.600	43,77	75	75	100,00	
	AEF Total				4.201.651.000	1.661.286.082	39,54	830	830	100,00
	BMB	Dukungan Pemberdayaan UMKM untuk Inklusi Pemanfaatan Digipay	kegiatan	4.116.006.000	1.381.884.603	33,57	218	246	112,84	
	BMB Total				4.116.006.000	1.381.884.603	33,57	218	246	112,84
	FAC	Bimbingan Teknis Pengelola Keuangan BLU	Orang	1.882.461.000	613.217.537	32,58	3.878	3.881	100,08	
		Edukasi Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa	Unit Kerja	1.885.058.000	756.609.674	40,14	173	173	100,00	
		Edukasi Satker terkait Peningkatan Fungsi Aplikasi BIOS	Unit Kerja	46.080.000	-	0,00	248	248	100,00	
		Komunikasi dan Edukasi Implementasi Aplikasi	Unit Kerja	6.891.410.000	1.406.007.901	20,40	20.001	20.443	102,21	
		Penajaman Metode Analytical BLU	Unit Kerja	140.374.000	18.800.000	13,39	1	1	100,00	
		Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Pembina dan Pengelola Keuangan BLU	Orang	584.339.000	200.838.100	34,37	50	50	100,00	
		Standardisasi Kompetensi Pengelola Perbendaharaan dan Edukasi Jabatan Fungsional Bidang Perbendaharaan	Orang	1.160.229.000	169.802.000	14,64	19.213	19.213	100,00	
	FAC Total				12.589.951.000	3.165.275.212	25,14	43.564	44.009	101,02
	FAH	Edukasi Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat Kuasa BUN	Laporan	6.873.338.000	1.157.866.697	16,85	744	764	102,69	
		Komunikasi dan Edukasi Dalam Rangka Penyusunan Government Financial Statistic (GFS)	Laporan	714.437.000	248.063.750	34,72	273	273	100,00	
		Komunikasi dan Edukasi Penyusunan LKKL dan LKBUN	Laporan	1.323.946.000	323.000.915	24,40	356	358	100,56	
	FAH Total				8.911.721.000	1.728.931.362	19,40	1.373	1.395	101,60
	FAL	Komunikasi dan Edukasi Dalam Rangka Penerimaan dan Pengeluaran Kas	kegiatan	362.182.000	140.730.265	38,86	12	12	100,00	
		Konsultasi Pencairan Dana	kegiatan	10.060.282.000	3.197.211.226	31,78	1.813	1.874	103,36	
		Pembinaan Pelaksanaan Anggaran	kegiatan	3.426.971.000	957.940.676	27,95	273	273	100,00	
	FAL Total				13.849.435.000	4.295.882.167	31,02	2.098	2.159	102,91
	UAL	Implementasi Digital Payment Marketplace pada Satker Kementerian Negara/Lembaga (PN)	Dokumen	86.012.000	42.185.614	49,05	100.000	100.000	100,00	
	UAL Total				86.012.000	42.185.614	49,05	100.000	100.000	100,00
	6212 Total				43.754.776.000	12.275.445.040	28,06	148.083	148.639	100,38
6213	ABA	Kajian atas Peluang Investasi dan Pinjaman Daerah	Kajian	1.723.599.000	593.736.364	34,45	66	67	101,52	
	ABA Total				1.723.599.000	593.736.364	34,45	66	67	101,52
	FAC	Monev Pengembangan Kompetensi KPA, PPK, PPSPM, Bendahara dan Pengelola Perbendaharaan	Orang	2.007.771.000	588.290.560	29,30	1.806	1.981	109,69	
	FAC Total				2.007.771.000	588.290.560	29,30	1.806	1.981	109,69
	FAE	ALCo Regional	Rekomendasi	3.344.912.000	2.919.245.505	87,27	68	77	113,24	
		Monev Pengelolaan Kas Negara	Rekomendasi	504.727.000	217.400.106	43,07	2	2	100,00	
		Rekomendasi atas Kinerja Investasi Pemerintah	Rekomendasi	4.341.989.000	1.468.423.954	33,82	437	445	101,83	
		Rekomendasi atas Pengelolaan Investasi Pemerintah oleh Operator Investasi Pemerintah (OIP)	Rekomendasi	1.933.300.000	1.490.236.805	77,08	2	2	100,00	
		Rekomendasi atas Peningkatan Kinerja Keuangan BLU dan Investasi Pemerintah di Daerah	Rekomendasi	2.502.470.000	1.010.365.180	40,37	8	8	100,00	
	Rekomendasi Peningkatan Efektivitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN	Rekomendasi	245.792.000	107.255.750	43,64	2	2	100,00		

Kode	Kegiatan	Rincian Output	Satuan	Belanja			Keluaran		
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
		Rekomendasi Terkat Kemitraan dengan Perbankan	Rekomendasi	99.324.000	43.908.300	44,21	2	2	100,00
	FAE Total			12.972.514.000	7.256.835.600	55,94	521	538	103,26
	FAH	Rekomendasi atas Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah	Laporan	28.986.000	10.884.000	37,55	1	1	100,00
	FAH Total			28.986.000	10.884.000	37,55	1	1	100,00
	FAL	Monev Penerimaan dan Pengeluaran Kas	kegiatan	1.214.935.000	304.284.128	25,05	246	263	106,91
		Rekomendasi atas Pelaksanaan Disbursement	Dokumen	18.828.000	-	0,00	4	4	100,00
		Reviu Belanja Pemerintah	Dokumen	7.877.061.000	2.741.323.982	34,80	319	329	103,13
	FAL Total			9.110.824.000	3.045.608.110	33,43	569	596	104,75
	6213 Total			25.843.694.000	11.495.354.634	44,48	2.963	3.183	107,42
6214	AED	Penetapan/Perjanjian Investasi Pemerintah dengan OIP	perjanjian	72.600.000	5.100.000	7,02	2	6	300,00
		Perjanjian Terkait Investasi Pemerintah	perjanjian	18.000.000	11.080.000	61,56	15	15	100,00
	AED Total			90.600.000	16.180.000	17,86	17	21	123,53
	FAE	Kajian dan Rekomendasi Penetapan Operator Investasi Pemerintah (OIP)	Rekomendasi	180.000.000	-	0,00	2	8	400,00
		Kajian dan Rekomendasi Terkait Investasi Pemerintah	Rekomendasi	1.551.611.000	551.983.842	35,57	41	41	100,00
		Rekomendasi Outstanding Pinjaman	Rekomendasi	61.834.000	11.045.000	17,86	38	38	100,00
	FAE Total			1.793.445.000	563.028.842	31,39	81	87	107,41
	FAH	Konsolidasi LK K/L dan LK BUN	Laporan	2.220.000	-	0,00	39	39	100,00
	FAH Total			2.220.000	-	0,00	39	39	100,00
	FAL	Dana Hasil dari Pengelolaan Kas Negara	Dokumen	793.327.000	791.929.388	99,82	5.500.000.000	5.500.000.000	100,00
		Koordinasi dan Rekonsiliasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas	Dokumen	737.203.000	143.888.275	19,52	277	290	104,69
		Surat Perintah Pencairan/Penarikan/Repayment/Peng esahan Dana	Dokumen	614.041.000	94.722.635	15,43	520.676	682.325	131,05
	FAL Total			2.144.571.000	1.030.540.298	48,05	5.500.520.953	5.500.682.615	100,00
	UAE	Evaluasi Atas Implementasi Skema Baru Pembiayaan UMKM pada Pusat Investasi Pemerintah (PN)	Laporan	1.455.148.000	350.008.237	24,05	5	5	100,00
	UAE Total			1.455.148.000	350.008.237	24,05	5	5	100,00
	6214 Total			5.485.984.000	1.959.757.377	35,72	5.500.521.095	5.500.682.767	100,00
6215	FAH	Government Financial Statistic (GFS)	Laporan	1.393.760.000	530.859.301	38,09	152	152	100,00
		Laporan Keuangan BA BUN 999.03, 999.04, 999.07	Laporan	33.263.000	15.238.000	45,81	3	3	100,00
		Laporan Keuangan BUN	Laporan	1.552.398.000	478.887.229	30,85	873	873	100,00
		Laporan Keuangan Pemerintah Pusat	Laporan	723.215.000	324.994.000	44,94	4	4	100,00
	FAH Total			3.702.636.000	1.349.978.530	36,46	1.032	1.032	100,00
	6215 Total			3.702.636.000	1.349.978.530	36,46	1.032	1.032	100,00
6216	AAA	RUU P2 APBN	RUU	775.609.000	532.383.750	68,64	1	1	100,00
	AAA Total			775.609.000	532.383.750	68,64	1	1	100,00
	AAC	RPP Investasi Pemerintah	RPP	221.790.000	221.790.000	100,00	1	1	100,00
		RPP Pelaksanaan Anggaran	RPP	80.535.000	51.075.000	63,42	1	1	100,00
	AAC Total			302.325.000	272.865.000	90,26	2	2	100,00
	AAG	Peraturan Menteri Keuangan Mengenai Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum	PerMen	517.000.000	259.669.000	50,23	30	30	100,00
		Peraturan Menteri Mengenai Pembayaran Atas Beban APBN	PerMen	504.960.000	206.664.236	40,93	3	3	100,00
		Peraturan, Ketetapan dan Pedoman Menteri Mengenai Investasi Pemerintah	PerMen	27.482.000	27.430.000	99,81	4	4	100,00
	AAG Total			1.049.442.000	493.763.236	47,05	37	37	100,00
	AAH	Pedoman Mengenai Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah	peraturan	3.804.327.000	3.221.286.996	84,67	9	9	100,00
		Peraturan dan Ketetapan Lainnya Mengenai Pengelolaan Kas dan Rekening Pemerintah	peraturan	69.179.000	28.839.900	41,69	2	2	100,00
		Peraturan Lainnya Mengenai Pembayaran Atas Beban APBN	peraturan	267.312.000	114.004.400	42,65	2	2	100,00
		Peraturan Lainnya Mengenai Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum	peraturan	415.143.000	165.723.500	39,92	3	3	100,00
		Peraturan, Ketetapan dan Pedoman Lainnya Mengenai Investasi Pemerintah	peraturan	132.175.000	11.347.000	8,58	2	9	450,00
	AAH Total			4.688.136.000	3.541.201.796	75,54	18	25	138,89
	FAE	Implementasi Virtual Account Rekening Penerimaan	Laporan	112.812.000	-	0,00	10	10	100,00
		Kajian Peningkatan Efektifitas dan Akuntabilitas Pelaksanaan APBN	Rekomendasi	2.261.361.000	944.679.937	41,77	2	2	100,00

Kode	Kegiatan	Rincian Output	Satuan	Belanja			Keluaran		
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
		Masukan Pemerintah terkait Pencetakan Uang oleh Bank Indonesia	Rekomendasi	128.800.000	-	0,00	1	1	100,00
		Rekomendasi Tarif Standar Biaya Masukan	Rekomendasi	254.418.000	111.457.520	43,81	45	45	100,00
		FAE Total		2.757.391.000	1.056.137.457	38,30	58	58	100,00
6216 Total				9.572.903.000	5.896.351.239	61,59	116	123	106,03
Grand Total				88.359.993.000	32.976.886.820	37,32	5.500.673.289	5.500.835.744	100,00

2. Program Dukungan Manajemen (WA)

Program Dukungan Manajemen telah terealisasi sebesar Rp28.998.648.311.287 atau 85,65 persen dari pagu sebesar Rp33.855.319.704.000,- dengan rincian sebagai berikut.

Tabel F. 2 Capaian Kinerja Program Dukungan Manajemen Tahun 2025 (Rupiah)

Kode	Kegiatan	Rincian Output	Satuan	Belanja			Keluaran		
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
4711	EBA	Layanan Bantuan Hukum	Layanan	176.126.000	57.027.885	32,38	1	1	100,00
	EBA Total			176.126.000	57.027.885	32,38	1	1	100,00
4711 Total				176.126.000	57.027.885	32,38	1	1	100,00
4712	CAN	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Unit	1.600.000.000	1.494.346.996	93,40	50	50	100,00
	CAN Total			1.600.000.000	1.494.346.996	93,40	50	50	100,00
	EBA	Dukungan Pimpinan dan Keprotokoleran	Layanan	4.939.760.000	1.866.766.498	37,79	12	12	100,00
		Layanan Perkantoran	Layanan	94.380.364.000	80.117.295.915	84,89	12	12	100,00
		Rekomendasi Pengelolaan Organisasi	Laporan	5.585.030.000	2.800.992.504	50,15	1	1	100,00
	EBA Total			104.905.154.000	84.785.054.917	80,82	25	25	100,00
	EBB	Peralatan Fasilitas Perkantoran	Unit	102.147.000.000	61.773.163.268	60,47	40	40	100,00
	EBB Total			102.147.000.000	61.773.163.268	60,47	40	40	100,00
	EBC	Pengembangan SDM	Orang	2.469.000.000	1.575.680.192	63,82	115	115	100,00
	EBC Total			2.469.000.000	1.575.680.192	63,82	115	115	100,00
	EBD	Laporan Keuangan Unit	Laporan	72.048.000	4.355.500	6,05	4	4	100,00
		Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Layanan	430.000.000	253.906.950	59,05	1	1	100,00
		Rekomendasi Penerapan Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal	Laporan	2.038.000.000	1.031.522.568	50,61	15	15	100,00
		Rencana Kerja dan Anggaran Unit	Dokumen	413.588.000	17.692.000	4,28	1	1	100,00
	EBD Total			2.953.636.000	1.307.477.018	44,27	21	21	100,00
	FAB	Sistem Aplikasi Internal	Modul Aplikasi	4.300.000.000	2.676.680.256	62,25	4	4	100,00
	FAB Total			4.300.000.000	2.676.680.256	62,25	4	4	100,00
	FAM	Pendanaan untuk Penelitian dan Pengembangan Perkebunan Kelapa Sawit	Rupiah	213.814.987.000	115.293.210.869	53,92	92	192	208,70
		Pendanaan untuk Peremajaan Lahan Perkebunan Kelapa Sawit	Hektar	3.424.254.795.000	1.475.265.932.207	43,08	45.370	43.589	96,07
		Pendanaan untuk Promosi dan Kemitraan Sawit	Rupiah	181.340.401.000	78.592.334.821	43,34	90	172	191,11
		Pendanaan untuk Sarana dan Prasarana Perkebunan Kelapa Sawit	Rupiah	422.319.019.000	297.565.342.762	70,46	16.000	28.917	180,73
		Pendanaan untuk SDM Perkebunan Kelapa Sawit	Orang	605.989.786.000	524.480.206.783	86,55	7.550	19.939	264,09
PNBP/Imbal Hasil Kelola Dana BLU		Milyar	8.018.710.000	4.596.629.726	57,32	665	665	100,00	
FAM Total			4.855.737.698.000	2.495.793.657.168	51,40	69.767	93.474	133,98	
UAM	Pendanaan untuk Volume Penyaluran Selisih Harga Biodiesel (PN)	Kilo Liter	50.300.000.000.000	47.173.220.717.675	93,78	7.300.000	8.114.003	111,15	
UAM Total			50.300.000.000.000	47.173.220.717.675	93,78	7.300.000	8.114.003	111,15	
4712 Total				55.374.112.488.000	49.822.626.777.490	89,97	7.370.022	8.207.732	111,37
4713	EBA	Dukungan Pimpinan dan Keprotokoleran	Layanan	411.060.000	298.477.171	72,61	12	12	100,00
		Kerumahtanggaan	Layanan	3.289.860.000	9.534.698.020	289,82	12	12	100,00
		Layanan Perkantoran	Layanan	55.222.573.000	53.654.885.904	97,16	12	12	100,00
	EBA Total			58.923.493.000	63.488.061.095	107,75	36	36	100,00

Kode	Kegiatan	Rincian Output	Satuan	Belanja			Keluaran		
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
	EBB	Peralatan Fasilitas Perkantoran	Unit	1.145.000.000	1.142.554.264	99,79	22	56	254,55
	EBB Total			1.145.000.000	1.142.554.264	99,79	22	56	254,55
	EBC	Pengembangan SDM	Orang	2.413.393.000	1.031.494.106	42,74	49	85	173,47
	EBC Total			2.413.393.000	1.031.494.106	42,74	49	85	173,47
	EBD	Dokumen Perbendaharaan Unit	Dokumen	18.964.000	510.000	2,69	1	1	100,00
		Laporan Keuangan Unit	Laporan	363.480.000	286.037.993	78,69	3	3	100,00
		Rekomendasi Penerapan Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal	Laporan	658.128.000	537.775.391	81,71	12	12	100,00
		Rencana Kerja dan Anggaran Unit	Dokumen	31.748.000	490.000	1,54	1	1	100,00
	EBD Total			1.072.320.000	824.813.384	76,92	17	17	100,00
	FAB	Sistem Aplikasi Internal	Modul Aplikasi	300.000.000	294.764.260	98,25	1	1	100,00
	FAB Total			300.000.000	294.764.260	98,25	1	1	100,00
	FAM	PNBP/Imbal Hasil Kelolaan Dana BLU	Milyar	72.354.000	57.648.399	79,68	336	564	167,67
	FAM Total			72.354.000	57.648.399	79,68	336	564	167,67
	UAM	Pendanaan untuk Usaha Mikro yang Terfasilitasi Pembiayaan UMi (PN)	Usaha Mikro	31.714.218.000	21.788.521.232	68,70	1.470.000	2.174.655	147,94
UAM Total			31.714.218.000	21.788.521.232	68,70	1.470.000	2.174.655	147,94	
4713 Total			95.640.778.000	88.627.856.740	92,67	1.470.461	2.175.414	147,94	
4714	AAH	Peraturan Lainnya terkait Organisasi	peraturan	96.887.000	23.260.000	24,01	10	11	110,00
	AAH Total			96.887.000	23.260.000	24,01	10	11	110,00
	BMB	Pembinaan/Edukasi Publik	kegiatan	13.814.184.000	8.899.804.380	64,43	1	1	100,00
	BMB Total			13.814.184.000	8.899.804.380	64,43	1	1	100,00
	CAN	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Unit	10.798.209.000	10.794.484.189	99,97	159	159	100,00
	CAN Total			10.798.209.000	10.794.484.189	99,97	159	159	100,00
	EBA	Kerumahtanggaan	Layanan	489.998.000	389.325.527	79,45	12	12	100,00
		Layanan Perkantoran	Layanan	87.279.468.000	81.641.906.647	93,54	12	12	100,00
	EBA Total			87.769.466.000	82.031.232.174	93,46	24	24	100,00
	EBB	Gedung/Bangunan	m2	3.540.276.000	-	0,00	1.461	-	0,00
		Peralatan Fasilitas Perkantoran	Unit	22.762.773.000	22.761.044.176	99,99	22	22	100,00
	EBB Total			26.303.049.000	22.761.044.176	86,53	1.483	22	1,48
	EBC	Administrasi Kepegawaian	Orang	56.951.000	38.540.584	67,67	78	94	120,51
		Pengembangan SDM	Orang	885.401.000	640.751.000	72,37	65	65	100,00
	EBC Total			942.352.000	679.291.584	72,08	143	159	111,19
	EBD	Laporan Keuangan Unit	Laporan	467.730.000	370.772.982	79,27	1	1	100,00
		Rekomendasi Kepatuhan Internal	Laporan	220.808.000	56.370.420	25,53	2	2	100,00
		Rekomendasi Manajemen Risiko	Laporan	362.715.000	41.576.213	11,46	3	3	100,00
		Rekomendasi Penerapan Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal	Laporan	176.482.000	3.707.943	2,10	2	2	100,00
		Rencana Kerja dan Anggaran Unit	Dokumen	50.079.000	-	0,00	1	1	100,00
	EBD Total			1.277.814.000	472.427.558	36,97	9	9	100,00
	FAB	Sistem Aplikasi Internal	Modul Aplikasi	3.888.205.000	3.774.766.090	97,08	1	1	100,00
	FAB Total			3.888.205.000	3.774.766.090	97,08	1	1	100,00
	FAM	Pendanaan untuk Debitur Yang Terfasilitasi Dana Bergulir Lingkungan Hidup	Orang	10.269.818.000	3.719.258.009	36,22	5.000	25.363	507,26
		Pendanaan untuk Penerima Manfaat yang Terfasilitasi Dana Program Lingkungan Hidup	Milyar	833.076.901.000	822.299.378.972	98,71	100	890	889,62
		PNBP/Imbal Hasil Kelolaan Dana BLU	Milyar	3.490.752.000	695.367.094	19,92	505	1.859	368,10
	FAM Total			846.837.471.000	826.714.004.075	97,62	5.605	28.112	501,54
4714 Total			991.727.637.000	956.150.314.226	96,41	7.435	28.498	383,29	
4715	CAN	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	Unit	829.139.000	-	0,00	60	60	100,00
	CAN Total			829.139.000	-	0,00	60	60	100,00
	EBA	Dukungan Pimpinan dan Keprotokoleraan	Layanan	11.069.684.000	4.317.638.586	39,00	2.049	2.037	99,41
		Kerumahtanggaan	Layanan	19.158.183.000	9.407.591.040	49,10	2.082	2.082	100,00
		Layanan Perkantoran	Layanan	459.350.979.000	333.762.138.477	72,66	2.139	2.139	100,00
		Rencana Kebutuhan BMN dan Pengelolaannya Unit	Dokumen	1.964.082.000	941.731.003	47,95	12	12	100,00
EBA Total			491.542.928.000	348.429.099.106	70,88	6.282	6.270	99,81	

Kode	Kegiatan	Rincian Output	Satuan	Belanja			Keluaran			
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%	
	EBB	Gedung/Bangunan	m2	221.355.029.000	59.421.149.188	26,84	59.928	39.432	65,80	
		Kendaraan Bermotor	Unit	67.449.376.000	49.722.436.492	73,72	154	133	86,36	
		Peralatan Fasilitas Perkantoran	Unit	66.431.986.000	37.615.232.203	56,62	7.357	7.080	96,23	
	EBB Total				355.236.391.000	146.758.817.883	41,31	67.439	46.645	69,17
	EBD	Dokumen Pengelolaan Kinerja Organisasi	Dokumen	4.293.258.000	1.499.051.797	34,92	501	500	99,80	
		Dokumen Perbendaharaan Unit	Dokumen	2.721.403.000	1.473.231.743	54,14	1	1	100,00	
		Laporan Keuangan Unit	Laporan	1.754.651.000	655.219.355	37,34	71	70	98,59	
		Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	Layanan	866.265.000	563.715.250	65,07	4	4	100,00	
		Rencana Kerja dan Anggaran Unit	Dokumen	2.499.137.000	1.069.550.778	42,80	221	220	99,55	
	EBD Total				12.134.714.000	5.260.768.923	43,35	798	795	99,62
4715 Total				859.743.172.000	500.448.685.912	58,21%	74.579	53.770	72,10	
4718	BMB	Implementasi PUG	kegiatan	275.660.000	22.671.000	8,22	1	1	100,00	
		Kehumasan	kegiatan	2.805.634.000	1.285.327.524	45,81	324	350	108,02	
		Pembinaan/Edukasi Publik	kegiatan	3.427.626.000	1.350.413.803	39,40	430	450	104,65	
	BMB Total				6.508.920.000	2.658.412.327	40,84	755	801	106,09
4718 Total				6.508.920.000	2.658.412.327	40,84	755	801	106,09	
4719	EBA	Hasil Survey/Rekomendasi Kepuasan Pengguna Layanan	Laporan	1.255.706.000	727.204.926	57,91	360	368	102,22	
		Implementasi ISO 37001 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan	Dokumen	469.880.000	105.308.032	22,41	1	1	100,00	
		Layanan Perkantoran	Layanan	84.094.974.000	81.549.567.967	96,97	1.972	1.972	100,00	
		Rekomendasi Pengelolaan Organisasi	Rekomendasi	14.930.622.000	8.405.305.039	56,30	429	430	100,23	
		Standar Mutu Layanan - ISO Mutu Layanan	Dokumen	707.236.000	262.318.733	37,09	440	445	101,14	
		Unit Yang Memperoleh Predikat ZI/WBK/WBBM	Dokumen	216.060.000	91.672.098	42,43	4	4	100,00	
	EBA Total				101.674.478.000	91.141.376.795	89,64	3.206	3.220	100,44
	EBC	Administrasi Kepegawaian	Orang	33.255.832.000	30.270.030.850	91,02	1.200	1.200	100,00	
		Pengelolaan Jabatan Fungsional	Orang	162.875.000	29.926.000	18,37	275	275	100,00	
		Pengembangan SDM	Orang	18.451.764.000	6.275.692.245	34,01	5.351	5.485	102,50	
EBC Total				51.870.471.000	36.575.649.095	70,51	6.826	6.960	101,96	
4719 Total				153.544.949.000	127.717.025.890	83,18	10.032	10.180	101,48	
4722	EBD	Rekomendasi Kepatuhan Internal	Laporan	729.542.000	323.568.335	44,35	1	1	100,00	
		Rekomendasi Manajemen Risiko	Laporan	117.000.000	61.810.567	52,83	1	1	100,00	
		Rekomendasi Penerapan Pengelolaan Risiko, Pengendalian dan Pengawasan Internal	Laporan	445.462.000	170.201.090	38,21	74	77	104,05	
	EBD Total				1.292.004.000	555.579.992	43,00	76	79	103,95
4722 Total				1.292.004.000	555.579.992	43,00	76	79	103,95	
4725	CCL	Operational Maintenance Sistem Aplikasi BUN	Unit	89.613.150.000	86.988.985.899	97,07	10	10	100,00	
		Operational Maintenance Sistem Aplikasi Perbendaharaan	Unit	51.861.148.000	37.691.539.369	72,68	6	6	100,00	
		Operational Maintenance Sistem Aplikasi Satker	Unit	118.153.484.000	91.218.338.953	77,20	9	9	100,00	
	CCL Total				259.627.782.000	215.898.864.221	83,16	25	25	100,00
	FAB	Sistem Aplikasi BUN	Modul Aplikasi	7.521.455.000	1.658.063.037	22,04	3	3	100,00	
		Sistem Aplikasi Perbendaharaan	Modul Aplikasi	5.426.440.000	1.494.746.040	27,55	1	1	100,00	
		Sistem Aplikasi Satker	Modul Aplikasi	7.483.634.000	1.150.202.333	15,37	1	1	100,00	
		Sistem Informasi Keuangan Republik Indonesia (SIKRI) Gen. 2	Sistem Informasi	798.101.000	138.799.000	17,39	1	1	100,00	
		Sistem Layanan Platform Pembayaran Pemerintah (PPP) (PU)	Sistem Informasi	378.004.000	217.657.400	57,58	1	1	100,00	
		Sistem Monev Kinerja Anggaran Belanja K/L Terintegrasi (IKPA dan EKA)	Modul Aplikasi	270.154.000	87.890.068	32,53	2	2	100,00	
		Sistem Pengelolaan Data Analitik	Sistem Informasi	837.683.000	204.242.800	24,38	1	1	100,00	
	FAB Total				190.089.092.000	172.268.924.451	90,63	15	15	100,00
	4725 Total				449.716.874.000	388.167.788.672	86,31	40	40	100,00
6990	ABA	Rekomendasi Kebijakan terkait Percepatan Pembangunan dan Otonomi Khusus Papua	Rekomendasi Kebijakan	22.100.209.000	5.269.075.916	23,84	4	4	100,00	
	ABA Total			22.100.209.000	5.269.075.916	23,84	4	4	100,00	
	EBA	Dukungan Pimpinan dan Keprotokolanan	Layanan	1.693.184.000	606.687.143	35,83	12	12	100,00	

Kode	Kegiatan	Rincian Output	Satuan	Belanja			Keluaran		
				Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
		Layanan Perkantoran	Layanan	21.353.026.000	19.902.290.042	93,21	12	12	100,00
	EBA Total			23.046.210.000	20.508.977.185	88,99	24	24	100,00
6990 Total				45.146.419.000	25.778.053.101	57,10	28	28	100,00
Grand Total				57.977.609.367.000	51.912.787.522.235	89,54	8.933.429	10.476.542	117,27

F.4 Pencapaian Program Prioritas Nasional

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025, pada Direktorat Jenderal Perbendaharaan terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN), pada Prioritas Nasional 3, yakni Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi, dengan rincian sebagai berikut.

1. PN 2: Implementasi Digital Payment Marketplace pada Satker Kementerian Negara/Lembaga (PN)
Pelaksanaannya di antaranya melalui *Major Project* Akselerasi Pengembangan Energi Terbarukan dan Konservasi Energi, Kegiatan Prioritas Pendanaan untuk Volume Penyaluran Selisih Harga Biodiesel, dengan pagu untuk kegiatan utama mencapai Rp50.065.369.925.000,- dan realisasi untuk kegiatan utama penyaluran insentif biodiesel sebesar Rp47.008.777.072.400,- Rincian realisasi dan capaian output pada PN 2 sebagai berikut:

Tabel F. 3 Capaian Kinerja Program Nasional (PN.3) Tahun 2025 (Rupiah)

NO	SATUAN KERJA	URAIAN OUTPUT	SATUAN	PAGU	REALISASI	%REAL	TARGET	CAPAIAN VOL	% CAPAIAN VOL
1	Badan Pengelola Dana Perkebunan	Hasil Kelolaan Dana	Kilo Liter	50.300.000.000.000	47.173.220.717.675	93,78	7.300.000	8.118.003	111,15
TOTAL				50.300.000.000.000	47.173.220.717.675	93,78	7.300.000	8.118.003	111,15

2. PN 3: Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi melalui Peran Aktif Koperasi.
Pelaksanaannya di antaranya melalui 2 (dua) kegiatan yakni kegiatan Pelaksanaan Tugas Khusus (*Special Mission*) Pengelolaan Investasi Pemerintah pada satuan kerja Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dan kegiatan Program Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko pada satuan kerja Kantor Pusat DJPb. Total pagu pada untuk PN 3 ini adalah sebesar Rp33.169.366.000,- dengan total realisasi sebesar Rp22.138.529.469,- atau sebesar 66,74 persen dari total alokasi. Rincian realisasi dan capaian output pada PN 3 sebagai berikut.

Tabel F. 4 Capaian Kinerja Program Nasional (PN.3) Tahun 2025 (Rupiah)

NO	SATUAN KERJA	URAIAN OUTPUT	SATUAN	PAGU	REALISASI	%REAL	TARGET	CAPAIAN VOL	% CAPAIAN VOL
1	Pusat Investasi Pemerintah	Pendanaan untuk Usaha Mikro yang Terfasilitasi Pembiayaan UMi (PN)	Usaha Mikro	31.714.218.000	21.788.521.232	68,70	1.470.000	2.174.655	147,94
2	Kantor Pusat DJPb	Evaluasi Atas Implementasi Skema Baru Pembiayaan UMKM pada Pusat Investasi Pemerintah (PN)	Laporan	1.455.148.000	350.008.237	24,05	5	5	100,00
TOTAL				33.169.366.000	22.138.529.469	66,74	1.470.005	2.174.660	147,94

F.5 Pencapaian Program Prioritas Utama

Pelaksanaan Program Prioritas Utama Untuk Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui 2 (dua) program prioritas yakni program swasembada energi pada satuan kerja Badan Pengelola Dana Perkebunan dan program Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi pada 2 satuan kerja yakni Pusat Investasi Pemerintah (PIP) dan Kantor Pusat DJPb dengan total pagu sebesar Rp50.333.169.359.247.144,- dan total realisasi sebesar Rp47.195.169.366.000,- atau 93,77 persen dari total alokasi. Rincian pelaksanaan program prioritas Direktorat Jenderal Perbendaharaan tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel F. 5 Capaian Kinerja Program Prioritas Utama Tahun 2025 (Rupiah)

NO	NAMA SATKER	NMPP	SATUAN	PAGU	REALISASI	%REAL	TARGET	CAPAIAN VOL	% CAPAIAN VOL
1	BADAN PENGELOLA DANA PERKEBUNAN	Swasembada Energi	Kilo Liter	50.300.000.000.000	47.173.220.717.675	93,78	7.300.000	8.114.003	111,15
2	PUSAT INVESTASI PEMERINTAH	Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi	Usaha Mikro	31.714.218.000	21.788.521.232	68,70	1.470.000	2.174.655	147,94
3	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN	Peningkatan Produktivitas UMKM dan Koperasi	Laporan	1.455.148.000	350.008.237	24,05	5	5	100,00
TOTAL				50.333.169.366.000	47.195.359.247.144	93,77	8.770.005	10.288.663	117,32%

F.6 Pengungkapan Pelaksanaan Anggaran atas Pekerjaan yang Belum Diselesaikan pada Akhir Tahun

Terdapat 21 kontrak/BAST pada 7 Satuan Kerja Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang melaksanakan pekerjaan belum selesai sampai dengan akhir tahun 2024 dengan total nilai sebesar Rp4.068.810.369,- jika dibandingkan dengan jumlah saldo RPATA pada tahun sebelumnya maka terjadi penurunan jumlah satker dari tahun sebelumnya 18 satuan kerja menjadi 7 pada tahun 2025. Saldo RPATA ini kemudian telah semuanya diselesaikan pembayarannya pada awal tahun 2026. Secara rinci jumlah saldo RPATA tahun 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel F. 6 Rincian Saldo RPATA Tahun 2025 (Rupiah)

NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	SALDO RPATA	JUMLAH KONTRAK
1	325237	KANWIL DJTJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU	40.450.000	1

NO	KODE SATKER	NAMA SATKER	SALDO RPATA	JUMLAH KONTRAK
2	527010	KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN	2.966.702.886	9
3	527027	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI DKI JAKARTA	19.980.000	2
4	528682	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI PAPUA	17.802.150	1
5	613832	KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIMIKA	174.789.813	3
6	634277	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI D.I. YOGYAKARTA	16.998.600	1
7	662788	KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA	832.086.920	4
TOTAL			4.068.810.369	21

F.7 BMN Bersengketa Di Lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan

BMN bersengketa di pengadilan merupakan BMN yang didaftarkan bersengketa di pengadilan, baik Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, PTUN maupun Mahkamah Agung. Terdapat 8 (delapan) NUP/barang yang bersengketa dengan rincian sebagai berikut.

Tabel F. 7 Daftar BMN Bersengketa Direktorat Jenderal Perbendaharaan

NO	NAMA SATKER	KODE BARANG	NAMA BARANG	NUP	LUAS BMN M ²	NILAI PEROLEHAN	STATUS
1	KANWIL DJPB PROVINSI JAWA TIMUR	2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	25	322	3.079.728.000	Kemenkeu Menang, Belum dilakukan eksekusi
2	KANWIL DJPB PROVINSI JAWA TIMUR	2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	16	315	3.012.778.000	Menunggu putusan Tingkat kasasi
3	KANWIL DJPB PROVINSI JAWA TIMUR	4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	21	50	217.789.000	Menunggu putusan Tingkat kasasi
4	KANWIL DJPB PROVINSI JAWA TIMUR	2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	24	303	2.898.005.000	Derden Verzet
5	KANWIL DJPB PROVINSI JAWA TIMUR	4010202010	Rumah Negara Golongan II Tipe D Permanen	24	50	94.383.000	Derden Verzet
6	KANWIL DJPB PROVINSI JAWA TIMUR	2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	26	328	3.137.115.000	Banding di Pengadilan Tinggi
7	KANWIL DJPB PROVINSI JAWA TIMUR	2010101004	Tanah Bangunan Rumah Negara Dalam Proses Penggolongan	1	8.880	48.169.475.000	Banding di Pengadilan Tinggi
8	KANWIL DJPB PROVINSI SULAWESI UTARA	2010101002	Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	11	620	3.883.684.000	Kemenkeu Kalah, Masih dilakukan upaya hukum lain untuk membatalkan hasil putusan tersebut

F.8 Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan BMN

Permasalahan yang perlu disampaikan terkait dengan pelaksanaan Penatausahaan dan pengelolaan BMN, antara lain sebagai berikut.

- a. Alokasi dana terkait pengadaan BMN tidak sebanding dengan jumlah kebutuhan BMN lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- b. Tidak tersedia alokasi dana yang memadai untuk penertiban aset milik Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang dikuasai masyarakat dan pihak lain yang tidak berhak;
- c. Terdapat aset Direktorat Jenderal Perbendaharaan berupa tanah yang dikuasai oleh pihak yang tidak berhak sehingga menyebabkan terjadi sengketa kepemilikan. baik yang prosesnya telah sampai pengadilan maupun yang belum. hal ini disebabkan antara lain:
 - Penghunian oleh yang pihak tidak berhak dalam jangka waktu yang lama. Penghunian yang lama menimbulkan motif untuk memiliki ataupun adanya pihak-pihak tertentu yang berusaha untuk memiliki tanah/rumah tersebut.
 - Pihak-pihak yang berani mengajukan perkara di pengadilan. Biasanya sudah mempersiapkan diri secara lebih matang sehingga memerlukan perjuangan yang berat sampai Mahkamah Agung untuk menyelesaikan sengketa. Sedangkan satker tidak menyimpan dengan baik dokumen-dokumen perolehan dan kepemilikan (jika sudah ada sertifikat maka dokumen lainnya tidak disimpan)
- d. Adanya pergantian operator baik di tingkat UAKPB maupun UAPPBW tanpa didahului dengan transfer pengetahuan menyebabkan terjadinya kesalahan dalam proses input SAKTI modul aset;
- e. Pelaksanaan pengelolaan BMN dan pengawasan serta pengendalian BMN yang belum berjalan dengan tertib sehingga pelaksanaan penetapan status dan penghapusan masih memerlukan proses yang lama;
- f. Belum tersedianya alokasi dana guna tindak lanjut rekonstruksi Barang Milk Negara berupa tanah dan gedung/bangunan hasil alih guna dari unit Eselon I lain.
- g. Masih terdapat ketidakseragaman pencatatan jenis aset pada satuan kerja yang akan ditindaklanjuti pada tahun 2026.
- h. Harus dilakukan penyesuaian dari pekerjaan rehabilitasi BMN khusus untuk gedung dan bangunan menjadi pekerjaan rekonstruksi karena kondisi struktur gedung bangunan yang tidak diketahui sebelumnya dan berisiko membahayakan penghuni jika hanya dilakukan rehabilitasi.

F.9 Mutasi Tambah BMN dari Saldo Awal pada Satuan Kerja BPD LH

Tahun 2025 terdapat mutasi tambah BMN yang berasal dari saldo awal sebesar Rp24.340.072.377,- yang berasal dari satuan kerja BPD LH. Satuan kerja BPD LH mencatat mutasi tambah dengan mekanisme saldo awal karena aset yang dicatat merupakan aset perolehan dari tahun 2024.

Tahun 2024 satuan kerja BPD LH menerima hibah program FOLU untuk program penanggulangan kebakaran hutan. Alokasi hibah yang diterima kemudian telah diserahkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai pelaksana kegiatan. Alokasi yang diterima telah direalisasikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan

belanja yang membentuk aset tetap. Namun, aset tetap ini belum dicatat dalam Laporan Keuangan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Laporan Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2024 tidak mencatat aset yang terbentuk dari belanja yang berasal dari dana hibah FOLU sehingga kemudian menjadi temuan dari KAP.

Agar aset yang telah ada ini dapat dicatat maka harus dilakukan pencatatan yang dimulai dari satuan kerja BPDH yang kemudian akan diserahkan kepada Kementerian Kehutanan sebagai pelaksana program. Pencatatan aset yang telah diperoleh pada tahun 2024 dilaksanakan dengan mekanisme pencatatan saldo awal.

Rincian aset yang dicatat dengan mekanisme saldo awal adalah sebagai berikut.

Tabel F. 8 Rincian Aset Tetap Perolehan Saldo Awal Satuan Kerja BPDH Tahun 2025

KODE BARANG	NAMA BARANG	JUMLAH	SATUAN	NILAI
3010399999	Alat Bantu Lainnya	97	Buah	156.286.340
3150302005	Tenda	26	Buah	616.829.580
3010312003	Pompa Portable	98	Unit	6.008.269.057
3010312001	Backpack Pump (Pompa Punggung Besar)	483	Unit	2.809.647.129
3010312020	Selang Air	494	Unit	2.822.450.620
3050206081	Tangki Air	26	Buah	456.368.824
3060104031	Mesin Potong	2	Buah	2.545.000.000
	Jumlah	1.226		15.414.851.550

F.10 Setoran Surplus BLU

Saldo setoran surplus BLU per 31 Desember 2025 sebesar Rp1.045.540.385.583,- yang berasal dari setoran satuan kerja BPDP sebesar Rp1.030.201.031.120,- dan dari satuan kerja BPDH sebesar Rp15.339.354.463,-. Penjelasan detail dari setoran surplus BLU adalah sebagai berikut:

- Setoran surplus pada satuan kerja BPDP merupakan setoran penerimaan negara yang berasal dari pungutan ekspor atas kelapa sawit sebesar 4 persen dari total realisasi pendapatan atas pungutan ekspor kelapa sawit Tahun 2024 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit pasal 3 mendefinisikan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit sebagai bagian dari Transfer ke Daerah (TKD). DBH sawit bersumber dari 2 (dua) penerimaan yakni pertama, bea keluar yang dikenakan atas kelapa sawit, minyak kelapa sawit mentah, dan/atau produk turunannya berdasarkan Peraturan Menteri mengenai penetapan besaran tarif bea keluar. Kedua adalah dari pungutan ekspor yang dikenakan atas kelapa sawit, minyak kelapa sawit mentah, dan/atau produk turunannya berdasarkan peraturan menteri mengenai penetapan besaran tarif pungutan

ekspor. Pagu DBH sawit ditetapkan paling rendah sebesar 4 persen dari penerimaan negara.

Sisa lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) satuan kerja BPDP per 31 Desember 2025 sebesar Rp10.954.232.970.123,- dan setelah setoran surplus BLU saldo SiLPA menjadi sebesar Rp9.924.031.939.003,-

- Setoran surplus BLU pada satuan kerja BPD LH sebesar Rp15.339.354.463,- Penyetoran surplus BLU ke Kas Negara merupakan setoran atas kegiatan penyaluran dana bersama penanggulangan bencana. Setoran ini terdiri dari setoran untuk asuransi Barang Milik Negara (ABMN) sebesar Rp7.916.351.095,- dan setoran Pra Bencana (MPN) sebesar Rp7.423.003.368,-.

Setoran surplus BLU merupakan Dana Bersama Penanggulangan Bencana atau *Pooling Fund* Bencana (PFB), yakni instrumen keuangan yang dirancang untuk mengumpulkan, mengakumulasi, dan menyalurkan dana khusus guna mendukung upaya penanggulangan bencana di Indonesia secara berkelanjutan. Dana Bersama Penanggulangan Bencana sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2021 tentang Dana Bersama Penanggulangan Bencana.

F.11 Selisih antara Neraca Akrual dan Neraca Kas

a. Pendapatan

Tabel F. 9 Selisih Saldo Akun Pendapatan pada Neraca Akrual dan Neraca Kas Tahun 2025 (Rupiah)

KODE SATKER	NAMA SATKER	KODE AKUN	AKRUAL	KAS	KETERANGAN
409999	Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit	424136	(1.515.434.709.986)	(1.551.736.252.389)	Jurnal balik akun pendapatan investasi
409999	Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit	424138	(31.862.628.101.930)	(31.504.908.924.225)	Penambahan Saldo Piutang Tahun 2025
409999	Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit	424911	(69.148.610.006)	(68.955.765.003)	Jurnal Balik Pendapatan Yang masih harus Diterima
439039	Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup	424136	(63.529.907.414)	(13.529.173.957)	Jurnal Balik Pendapatan Yang masih harus Diterima
439039	Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup	424139	(648.981.755.359)	(648.434.202.345)	Jurnal
439039	Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup	424911	(300.884.550.457)	(305.045.928.261)	Jurnal Balik Pendapatan Yang masih harus Diterima
440781	Pusat Investasi Pemerintah	424136	(282.107.417.884)	(284.632.759.766)	Jurnal balik Pendapatan yang Masih Harus diterima 2024
440781	Pusat Investasi Pemerintah	424911	(275.311.490.485)	(277.410.884.019)	Jurnal balik Pendapatan yang Masih Harus diterima 2024
440781	Pusat Investasi Pemerintah	424916	-	(82.584.400)	Jurnal balik Pendapatan yang Masih Harus diterima 2024
440781	Pusat Investasi Pemerintah	424919	(14.457.580)	(762.084.283)	Jurnal balik Pendapatan yang Masih Harus diterima 2024
527010	Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan	425131	(711.505.823)	(1.210.146.100)	Jurnal balik Pendapatan
527010	Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan	425911		(97.466.800)	Jurnal atas penyetoran kelebihan pembayaran Belanja Pegawai Tahun 2024
527010	Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan	425912	(81.814.200)	(1.270.953.841)	Penhilan RPATA
527027	Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta	425131	(30.195.000)		Jurnal Pendapatan diterima dimuka
527031	KPPN Jakarta I	425131	(108.931.334)		Jurnal Pendapatan diterima dimuka
527094	Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat	425131	(31.995.500)	(58.939.000)	Jurnal Pendapatan diterima dimuka
527120	KPPN Cirebon	425131	(16.946.250)	(17.117.000)	Jurnal Pendapatan diterima dimuka

KODE SATKER	NAMA SATKER	KODE AKUN	AKRUAL	KAS	KETERANGAN
527120	KPPN Cirebon	425911		(37.000)	Jurnal atas penyetoran kelebihan pembayaran Belanja Pegawai Tahun 2024
527141	KPPN Tasikmalaya	425131	(15.529.000)	(15.562.000)	Jurnal Pendapatan diterima dimuka
527205	KPPN Garut	425131		(112.000)	Jurnal Pendapatan diterima dimuka
527268	Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah	425151	(40.137.000)	(41.690.000)	Jurnal Penyesuaian atas pembayaran Sewa Mess Bulan Desember 2025
527268	Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah	425911		(185.000)	Jurnal atas penyetoran kelebihan pembayaran Belanja Pegawai Tahun 2024
527272	KPPN Semarang I	425131	(12.000.000)		Jurnal Pendapatan diterima dimuka
527293	KPPN Purworejo	425131	(91.123.000)	(90.528.750)	Jurnal Pendapatan diterima dimuka
527301	KPPN Purwokerto	425131	(10.505.359)	(36.946.000)	Jurnal Pendapatan diterima dimuka
527340	KPPN Magelang	425131	(20.403.336)		Jurnal Pendapatan diterima dimuka
527432	KPPN Malang	425131	(2.904.417)	(2.962.000)	Jurnal Pendapatan diterima dimuka
527467	KPPN Bondowoso	425911		(630.300)	Jurnal atas penyetoran kelebihan pembayaran Belanja Pegawai Tahun 2024
527521	KPPN Jember	425131	(7.752.000)		Jurnal Pendapatan diterima dimuka
527521	KPPN Jember	425911		(37.000)	Jurnal atas penyetoran kelebihan pembayaran Belanja Pegawai Tahun 2024
527645	Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Utara	425911		(146.000)	Jurnal atas penyetoran kelebihan pembayaran Belanja Pegawai Tahun 2024
527709	KPPN Rantau Prapat	425911		(192.000)	Jurnal atas penyetoran kelebihan pembayaran Belanja Pegawai Tahun 2024
527741	KPPN Tebing Tinggi	425131	(1.121.000)		Jurnal Pendapatan diterima dimuka
527776	Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat	425131	(35.076.581)	(36.273.000)	Jurnal Pendapatan diterima dimuka
527780	KPPN Padang	425131	(18.258.384)		Jurnal Pendapatan diterima dimuka
527890	KPPN Jambi	425911		(109.000)	Jurnal atas penyetoran kelebihan pembayaran Belanja Pegawai Tahun 2024
528057	Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat	425131	(32.569.500)		Jurnal Pendapatan diterima dimuka
528099	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Singkawang	425131	(50.242.500)	(101.338.000)	Jurnal Pendapatan diterima dimuka
528277	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Manado	425911		(70.000)	Jurnal atas penyetoran kelebihan pembayaran Belanja Pegawai Tahun 2024
528661	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Ruteng	425131	(12.719.667)		Jurnal Pendapatan diterima dimuka
528764	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Wamena	425131	(7.592.000)	(600.000)	Jurnal Pendapatan diterima dimuka
579330	KPPN Jakarta V	425131	(29.376.500)	(58.753.000)	Jurnal Pendapatan diterima dimuka
613739	Kanwil DJPb Provinsi Riau	425131	(21.646.750)	(21.729.000)	Jurnal Pendapatan diterima dimuka
613743	Kanwil DJPb Provinsi Jambi	425131	(6.000.000)	(12.000.000)	Jurnal Pendapatan diterima dimuka
613771	Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Timur	425131	(11.509.333)		Jurnal Pendapatan diterima dimuka
613771	Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Timur	425911		(37.000)	Jurnal atas penyetoran kelebihan pembayaran Belanja Pegawai Tahun 2024
613807	Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tengah	425131	(6.056.250)	(36.337.500)	Jurnal Pendapatan diterima dimuka
613832	KPPN Timika	425912	-	(115.024.780)	Penihilan RPATA

KODE SATKER	NAMA SATKER	KODE AKUN	AKRUAL	KAS	KETERANGAN
634256	Kanwil DJPb Provinsi Bangka Belitung	425911	-	(226.000)	Jurnal atas penyetoran kelebihan pembayaran Belanja Pegawai Tahun 2024
634277	Kanwil DJPb Provinsi Di Yogyakarta	425911	(123.000)	(160.000)	Jurnal atas penyetoran kelebihan pembayaran Belanja Pegawai Tahun 2024
634722	KPPN Klaten	425131	(6.696.000)		Jurnal Pendapatan diterima dimuka
635162	KPPN Kolaka	425911	-	(385.600)	Jurnal atas penyetoran kelebihan pembayaran Belanja Pegawai Tahun 2024
648830	KPPN Sidoarjo	425131	(312.750)	-	Jurnal Pendapatan diterima dimuka
648872	KPPN Pelelahari	425131	(11.339.041)	(30.263.000)	Jurnal Pendapatan diterima dimuka

b. Belanja

Tabel F. 10 Selisih Saldo Akun Belanja pada Neraca Akrual dan Neraca Kas Tahun 2025 (Rupiah)

KODE SATKER	NAMA SATKER	KODE AKUN	AKRUAL	KAS	KETERANGAN
015114	KPPN Jakarta VI	511129	318.079.000	318.153.000	Belanja pegawai yang masih harus dibayar
015114	KPPN Jakarta VI	522112	0	41.736	Belanja barang dibayar dimuka
015114	KPPN Jakarta VI	522113	188.650	152.285	Belanja barang dibayar dimuka
015115	KPPN Jakarta VII	511129	306.400.000	306.435.000	Belanja pegawai yang masih harus dibayar
325237	Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau	521111	636.431.249	636.110.832	Belanja barang dibayar dimuka
325237	Kanwil DJPb Provinsi Kepulauan Riau	522119	5.213.708	2.813.708	Belanja barang dibayar dimuka
340249	Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Barat	522112	3.072.500	2.822.700	Belanja barang dibayar dimuka
340249	Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Barat	522113	708.200	665.200	Belanja barang dibayar dimuka
409999	Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit	525112	7.153.401.571	7.038.456.071	Belanja barang BLU dibayar dimuka
409999	Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit	525113	13.485.322.668	9.673.667.710	Belanja Barang-BLU yang masih harus dibayar
409999	Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit	525117	47.381.205.488.604	49.669.014.319.743	Belanja Barang-BLU yang masih harus dibayar
440781	Pusat Investasi Pemerintah	525113	24.612.644.138	26.007.968.680	Belanja dibayar dimuka
451531	KPPN Bandung II	511129	196.951.000	194.819.000	Belanja pegawai yang masih harus dibayar
451531	KPPN Bandung II	522112	12.128.000	10.960.810	Belanja barang dibayar dimuka
451531	KPPN Bandung II	522113	581.522	570.861	Belanja barang dibayar dimuka
451547	KPPN Semarang II	521111	552.916.087	553.492.837	Belanja barang dibayar dimuka
451578	KPPN Makassar II	511129	195.437.700	209.317.000	Belanja pegawai yang masih harus dibayar
451604	KPPN Mamuju	511129	147.249.000	147.897.000	Belanja pegawai yang masih harus dibayar
452878	KPPN Tobelo	511129	75.736.000	77.468.000	Belanja pegawai yang masih harus dibayar
497593	KPPN Sinjai	522113	1.558.210	1.657.700	Belanja barang dibayar dimuka
497607	KPPN Bitung	522113	6.684.700	7.612.200	Belanja barang dibayar dimuka
497622	KPPN Marisa	511129	91.740.000	100.416.000	Belanja pegawai yang masih harus dibayar
497622	KPPN Marisa	522113	7.425.000	7.065.000	Belanja barang dibayar dimuka
527010	Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan	511129	7.560.615.350	7.567.704.250	Belanja pegawai yang masih harus dibayar
527010	Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan	511628	388.142.950	388.389.000	Belanja pegawai PPPK dibayar dimuka
527010	Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan	512211	9.017.763.850	9.021.095.050	Belanja pegawai yang masih harus dibayar
527010	Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan	522111	32.343.288.285	32.587.209.295	Belanja barang dibayar dimuka

KODE SATKER	NAMA SATKER	KODE AKUN	AKRUAL	KAS	KETERANGAN
527010	Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan	522112	3.081.729.349	3.089.710.387	Belanja barang dibayar dimuka
527010	Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan	522141	579.694.495	772.287.088	Belanja barang dibayar dimuka
527010	Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan	522191	11.879.422.021	11.965.874.474	Belanja barang dibayar dimuka
527010	Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan	523121	266.636.055.291	266.636.104.291	Belanja barang dibayar dimuka
527048	KPPN Jakarta II	522113	48.679.840	52.207.740	Belanja barang dibayar dimuka
527052	KPPN Jakarta III	512211	222.074.850	222.338.000	Belanja pegawai yang masih harus dibayar
527094	Kanwil DJPb Provinsi Jawa Barat	521114	5.019.000	4.600.500	Belanja barang dibayar dimuka
527102	KPPN Bandung I	511129	187.271.000	186.605.000	Belanja pegawai yang masih harus dibayar
527120	KPPN Cirebon	522113	5.990.537	7.025.297	Belanja barang dibayar dimuka
527137	KPPN Bogor	522113	50.720.100	58.140.900	Belanja barang dibayar dimuka
527141	KPPN Tasikmalaya	522113	2.508.750	3.463.500	Belanja barang dibayar dimuka
527158	KPPN Purwakarta	522113	1.250.000	1.131.000	Belanja barang dibayar dimuka
527183	KPPN Karawang	522113	770.000	764.000	Belanja barang dibayar dimuka
527205	KPPN Garut	522113	2.722.240	2.723.240	Belanja barang dibayar dimuka
527230	KPPN Sukabumi	511129	152.193.000	151.416.000	Belanja pegawai yang masih harus dibayar
527230	KPPN Sukabumi	522113	782.510	778.510	Belanja barang dibayar dimuka
527268	Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah	511129	534.381.000	534.494.000	Belanja pegawai yang masih harus dibayar
527268	Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah	521111	635.810.654	637.025.554	Belanja barang dibayar dimuka
527268	Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah	522111		300.189	Belanja barang dibayar dimuka
527268	Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah	522112	592.441	545.484	Belanja barang dibayar dimuka
527268	Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah	522113	12.349.325	14.435.625	Belanja barang dibayar dimuka
527268	Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah	522119	671.663		Belanja barang dibayar dimuka
527272	KPPN Semarang I	522113	20.302.800	19.875.300	Belanja barang dibayar dimuka
527289	KPPN Surakarta	521111	501.828.623	501.764.540	Belanja barang dibayar dimuka
527289	KPPN Surakarta	522113	8.335.073	7.691.873	Belanja barang dibayar dimuka
527293	KPPN Purworejo	511129	140.783.000	151.034.000	Belanja pegawai yang masih harus dibayar
527293	KPPN Purworejo	521114	2.033.500	1.821.000	Belanja barang dibayar dimuka
527293	KPPN Purworejo	522113	4.758.400	5.198.700	Belanja barang dibayar dimuka
527301	KPPN Purwokerto	521111	418.516.142	418.163.684	Belanja barang dibayar dimuka
527301	KPPN Purwokerto	521114	461.500	527.500	Belanja barang dibayar dimuka
527301	KPPN Purwokerto	522113	7.908.630	7.554.055	Belanja barang dibayar dimuka
527301	KPPN Purwokerto	522119	1.182.218	1.566.718	Belanja barang dibayar dimuka
527315	KPPN Pekalongan	511129	145.013.000	130.656.000	Belanja pegawai yang masih harus dibayar
527315	KPPN Pekalongan	522112	161.599	156.468	Belanja barang dibayar dimuka
527315	KPPN Pekalongan	522113	12.179.000	12.356.600	Belanja barang dibayar dimuka
527322	KPPN Pati	521111	303.351.854	303.715.404	Belanja barang dibayar dimuka
527322	KPPN Pati	522113	2.343.850	2.343.950	Belanja barang dibayar dimuka
527336	KPPN Kudus	522113	7.761.198	7.822.876	Belanja barang dibayar dimuka
527340	KPPN Magelang	521111	390.813.891	390.499.108	Belanja barang dibayar dimuka
527340	KPPN Magelang	522113	3.079.500	3.032.000	Belanja barang dibayar dimuka
527357	KPPN Tegal	511129	185.241.000	197.807.000	Belanja pegawai yang masih harus dibayar
527361	KPPN Cilacap	521111	348.017.671	348.079.671	Belanja barang dibayar dimuka
527361	KPPN Cilacap	522112	1.474.584	1.447.026	Belanja barang dibayar dimuka

KODE SATKER	NAMA SATKER	KODE AKUN	AKRUAL	KAS	KETERANGAN
527361	KPPN Cilacap	522113	440.400	462.900	Belanja barang dibayar dimuka
527411	Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur	511129	501.247.000	497.589.000	Belanja pegawai yang masih harus dibayar
527411	Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur	521114	5.913.500	6.553.500	Belanja barang dibayar dimuka
527432	KPPN Malang	511129	269.702.000	269.815.000	Belanja pegawai yang masih harus dibayar
527432	KPPN Malang	521114	511.800	529.200	Belanja barang dibayar dimuka
527432	KPPN Malang	522113	13.190.400	12.332.700	Belanja barang dibayar dimuka
527446	KPPN Kediri	522111	2.580.979	2.918.346	Belanja barang dibayar dimuka
527446	KPPN Kediri	522113	2.382.700	2.502.600	Belanja barang dibayar dimuka
527450	KPPN Madiun	512211	90.860.000	90.890.000	Belanja pegawai yang masih harus dibayar
527450	KPPN Madiun	521114	1.315.000	1.207.000	Belanja barang dibayar dimuka
527450	KPPN Madiun	522113	2.042.500	2.030.000	Belanja barang dibayar dimuka
527471	KPPN Pamekasan	511129	144.128.000	156.493.000	Belanja pegawai yang masih harus dibayar
527471	KPPN Pamekasan	521114	853.000	841.000	Belanja barang dibayar dimuka
527471	KPPN Pamekasan	522113	9.904.020	10.759.620	Belanja barang dibayar dimuka
527488	KPPN Bojonegoro	521114	440.215	505.930	Belanja barang dibayar dimuka
527488	KPPN Bojonegoro	522113	748.500	751.500	Belanja barang dibayar dimuka
527500	KPPN Mojokerto	521114	1.322.797	1.220.706	Belanja barang dibayar dimuka
527514	KPPN Pacitan	522113	2.338.140	2.292.210	Belanja barang dibayar dimuka
527521	KPPN Jember	521114	3.145.706	3.467.204	Belanja barang dibayar dimuka
527556	Kanwil DJPb Provinsi Aceh	511129	351.562.000	359.118.000	Belanja pegawai yang masih harus dibayar
527556	Kanwil DJPb Provinsi Aceh	521114	3.530.676	3.567.072	Belanja barang dibayar dimuka
527556	Kanwil DJPb Provinsi Aceh	522112	5.534.450	6.466.250	Belanja barang dibayar dimuka
527556	Kanwil DJPb Provinsi Aceh	522119	2.351.376	2.961.500	Belanja barang dibayar dimuka
527560	KPPN Banda Aceh	511129	196.832.000	195.831.000	Belanja pegawai yang masih harus dibayar
527560	KPPN Banda Aceh	521111	731.260.947	731.560.947	Belanja barang dibayar dimuka
527560	KPPN Banda Aceh	522112	6.384.766	7.396.996	Belanja barang dibayar dimuka
527560	KPPN Banda Aceh	522113	346.010	371.010	Belanja barang dibayar dimuka
527560	KPPN Banda Aceh	522119	3.575.667	2.890.000	Belanja barang dibayar dimuka
527577	KPPN Meulaboh	511129	112.482.000	112.743.000	Belanja pegawai yang masih harus dibayar
527581	KPPN Langsa	511129	119.742.000	130.978.000	Belanja pegawai yang masih harus dibayar
527581	KPPN Langsa	521114	2.067.500	2.148.000	Belanja barang dibayar dimuka
527581	KPPN Langsa	522111	576.291	633.180	Belanja barang dibayar dimuka
527581	KPPN Langsa	522112	10.715.130	10.714.630	Belanja barang dibayar dimuka
527581	KPPN Langsa	522113	3.309.800	3.308.800	Belanja barang dibayar dimuka
527581	KPPN Langsa	522119	3.719.343	3.285.000	Belanja barang dibayar dimuka
527598	KPPN Tapak Tuan	511129	91.959.000	92.138.000	Belanja pegawai yang masih harus dibayar
527598	KPPN Tapak Tuan	521113	4.857.590	5.040.000	Belanja barang dibayar dimuka
527598	KPPN Tapak Tuan	521114	640.500	724.000	Belanja barang dibayar dimuka
527598	KPPN Tapak Tuan	522113	3.214.560	2.954.120	Belanja barang dibayar dimuka
527603	KPPN Lhok Seumawe	511129	149.625.000	161.680.000	Belanja pegawai yang masih harus dibayar
527603	KPPN Lhok Seumawe	512211	76.554.000	82.818.000	Belanja pegawai yang masih harus dibayar
527603	KPPN Lhok Seumawe	521111	493.915.237	493.795.237	Belanja barang dibayar dimuka
527603	KPPN Lhok Seumawe	521114	369.829	358.910	Belanja barang dibayar dimuka
527666	KPPN Pematang Siantar	511129	274.830.000	252.308.000	Belanja pegawai yang masih harus dibayar

KODE SATKER	NAMA SATKER	KODE AKUN	AKRUAL	KAS	KETERANGAN
527666	KPPN Pematang Siantar	512211	132.681.000	115.441.000	Belanja pegawai yang masih harus dibayar
527666	KPPN Pematang Siantar	521114	3.946.700	4.127.200	Belanja barang dibayar dimuka
527666	KPPN Pematang Siantar	522113	1.522.900	1.516.400	Belanja barang dibayar dimuka
527670	KPPN Padang Sidempuan	522113	1.782.415	1.773.831	Belanja barang dibayar dimuka
527687	KPPN Gunung Sitoli	522113	1.284.533	919.000	Belanja barang dibayar dimuka
527691	KPPN Tanjung Balai Asahan	511129	144.466.000	144.279.000	Belanja pegawai yang masih harus dibayar
527691	KPPN Tanjung Balai Asahan	521114	1.146.000	1.144.000	Belanja barang dibayar dimuka
527691	KPPN Tanjung Balai Asahan	522113	9.475.848	8.650.688	Belanja barang dibayar dimuka
527691	KPPN Tanjung Balai Asahan	522141	3.085.000		Belanja barang dibayar dimuka
527709	KPPN Rantau Prapat	511129	97.337.000	97.411.000	Belanja pegawai yang masih harus dibayar
527709	KPPN Rantau Prapat	521114	335.000	377.500	Belanja barang dibayar dimuka
527713	KPPN Sibolga	521114	2.958.775	3.123.975	Belanja barang dibayar dimuka
527713	KPPN Sibolga	522113	2.293.510	2.321.345	Belanja barang dibayar dimuka
527741	KPPN Tebing Tinggi	521114	745.568	765.788	Belanja barang dibayar dimuka
527755	KPPN Balige	521114	2.625.825	2.519.670	Belanja barang dibayar dimuka
527776	Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat	521119	76.225.275	75.074.300	Belanja barang dibayar dimuka
527776	Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Barat	522113	19.758.173	19.121.251	Belanja barang dibayar dimuka
527780	KPPN Padang	511129	207.545.000	188.999.000	Belanja pegawai yang masih harus dibayar
527780	KPPN Padang	522113	24.224.444	26.955.007	Belanja barang dibayar dimuka
527797	KPPN Bukittinggi	511129	164.285.000	178.594.000	Belanja pegawai yang masih harus dibayar
527797	KPPN Bukittinggi	522113	16.749.500	18.302.500	Belanja barang dibayar dimuka
527802	KPPN Sijunjung	522113	6.497.500	6.168.000	Belanja barang dibayar dimuka
527819	KPPN Solok	521114	242.000	254.000	Belanja barang dibayar dimuka
527819	KPPN Solok	522113	7.226.300	7.613.300	Belanja barang dibayar dimuka
527823	KPPN Lubuk Sikaping	521114	579.000	674.500	Belanja barang dibayar dimuka
527823	KPPN Lubuk Sikaping	522113	11.544.292	11.421.192	Belanja barang dibayar dimuka
527844	KPPN Pekanbaru	511129	179.111.000	194.569.000	Belanja pegawai yang masih harus dibayar
527851	KPPN Tanjung Pinang	521111	672.948.167	673.488.167	Belanja barang dibayar dimuka
527851	KPPN Tanjung Pinang	522113	273.500	351.000	Belanja barang dibayar dimuka
527851	KPPN Tanjung Pinang	522119	14.374.812	11.513.050	Belanja barang dibayar dimuka
527865	KPPN Rengat	522113	2.985.000	3.352.500	Belanja barang dibayar dimuka
527890	KPPN Jambi	522113	4.025.450	4.413.025	Belanja barang dibayar dimuka
527908	KPPN Sungai Penuh	511129	95.016.000	92.713.000	Belanja pegawai yang masih harus dibayar
527912	KPPN Muara Bungo	522113	464.829	497.729	Belanja barang dibayar dimuka
527933	Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan	522113	9.082.884	9.600.986	Belanja barang dibayar dimuka
527975	KPPN Baturaja	522113	1.854.170	1.954.170	Belanja barang dibayar dimuka
528001	Kanwil DJPb Provinsi Lampung	511129	364.341.150	364.897.150	Belanja pegawai yang masih harus dibayar
528001	Kanwil DJPb Provinsi Lampung	521114	5.829.500	5.221.000	Belanja barang dibayar dimuka
528001	Kanwil DJPb Provinsi Lampung	522113	974.800	846.100	Belanja barang dibayar dimuka
528015	KPPN Bandar Lampung	511129	205.809.000	186.618.000	Belanja pegawai yang masih harus dibayar
528015	KPPN Bandar Lampung	522113	235.000	225.000	Belanja barang dibayar dimuka
528057	Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat	521114	3.693.163	3.664.046	Belanja barang dibayar dimuka
528057	Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat	522113	27.581.200	24.434.200	Belanja barang dibayar dimuka
528061	KPPN Pontianak	522113	8.486.100	8.663.600	Belanja barang dibayar dimuka

KODE SATKER	NAMA SATKER	KODE AKUN	AKRUAL	KAS	KETERANGAN
528082	KPPN Ketapang	521111	360.700.132	360.725.132	Belanja barang dibayar dimuka
528082	KPPN Ketapang	522113	2.591.600	2.636.100	Belanja barang dibayar dimuka
528099	KPPN Singkawang	522113	6.016.506	5.954.133	Belanja barang dibayar dimuka
528104	KPPN Putussibau	522113	2.285.500	2.352.900	Belanja barang dibayar dimuka
528125	KPPN Palangkaraya	522113	6.390.900	6.416.250	Belanja barang dibayar dimuka
528146	KPPN Buntok	522113	839.700	1.174.200	Belanja barang dibayar dimuka
528150	KPPN Pangkalan Bun	522112	2.579.007	2.306.232	Belanja barang dibayar dimuka
528150	KPPN Pangkalan Bun	522113	4.108.500	3.811.450	Belanja barang dibayar dimuka
528171	Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan	511129	344.718.000	310.499.000	Belanja pegawai yang masih harus dibayar
528171	Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan	521114	2.870.476	2.850.476	Belanja barang dibayar dimuka
528171	Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan	522112	3.509.719	4.480.969	Belanja barang dibayar dimuka
528171	Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan	522113	19.983.531	18.226.762	Belanja barang dibayar dimuka
528171	Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Selatan	522119	2.489.851	710.000	Belanja barang dibayar dimuka
528188	KPPN Banjarmasin	522113	9.475.860	9.329.571	Belanja barang dibayar dimuka
528200	KPPN Barabai	522113	2.131.500	2.192.300	Belanja barang dibayar dimuka
528221	KPPN Samarinda	522113	9.938.330	10.986.306	Belanja barang dibayar dimuka
528235	KPPN Tarakan	522113	4.352.850	4.358.150	Belanja barang dibayar dimuka
528281	KPPN Gorontalo	511129	155.937.000	158.268.000	Belanja pegawai yang masih harus dibayar
528281	KPPN Gorontalo	522113	8.905.029	9.971.635	Belanja barang dibayar dimuka
528281	KPPN Gorontalo	522119	1.586.248		Belanja barang dibayar dimuka
528310	KPPN Palu	511129	164.929.000	165.001.000	Belanja pegawai yang masih harus dibayar
528324	KPPN Luwuk	522113	1.537.500	1.531.500	Belanja barang dibayar dimuka
528345	KPPN Toli Toli	522113	3.811.850	3.780.350	Belanja barang dibayar dimuka
528366	Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan	521111	640.429.902	640.764.852	Belanja barang dibayar dimuka
528366	Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan	523119	230.987.576	231.272.976	Belanja barang dibayar dimuka
528370	KPPN Makasar I	522113	645.000	600.500	Belanja barang dibayar dimuka
528387	KPPN Pare Pare	511129	143.359.000	149.084.000	Belanja pegawai yang masih harus dibayar
528387	KPPN Pare Pare	522113	3.353.161	3.376.161	Belanja barang dibayar dimuka
528391	KPPN Banta Eng	522113	927.000	1.541.100	Belanja barang dibayar dimuka
528409	KPPN Palopo	522113	4.763.750	4.487.250	Belanja barang dibayar dimuka
528420	KPPN Watampone	522113	2.423.600	2.366.600	Belanja barang dibayar dimuka
528455	KPPN Bau Bau	522113	247.250	310.000	Belanja barang dibayar dimuka
528476	Kanwil DJPb Provinsi Maluku	521111	583.022.915	582.422.915	Belanja barang dibayar dimuka
528476	Kanwil DJPb Provinsi Maluku	522113	48.626.900	48.579.650	Belanja barang dibayar dimuka
528480	KPPN Ambon	522141	81.916.667	79.000.000	Belanja barang dibayar dimuka
528497	KPPN Ternate	521111	504.859.168	504.839.168	Belanja barang dibayar dimuka
528497	KPPN Ternate	522112	1.248.900	1.172.200	Belanja barang dibayar dimuka
528497	KPPN Ternate	522113	27.600.500	28.437.500	Belanja barang dibayar dimuka
528502	KPPN Tual	522113	13.211.000	13.144.500	Belanja barang dibayar dimuka
528519	KPPN Saumlaki	511129	80.253.000	88.338.000	Belanja pegawai yang masih harus dibayar
528519	KPPN Saumlaki	522113	12.339.500	11.690.000	Belanja barang dibayar dimuka
528544	Kanwil DJPb Provinsi Bali	511129	400.106.000	405.859.000	Belanja pegawai yang masih harus dibayar
528565	KPPN Singaraja	523121	101.971.841	96.271.841	Belanja barang dibayar dimuka
528608	KPPN Sumbawa Besar	521114	418.576	712.777	Belanja barang dibayar dimuka
528608	KPPN Sumbawa Besar	522113		686.380	Belanja barang dibayar dimuka

KODE SATKER	NAMA SATKER	KODE AKUN	AKRUAL	KAS	KETERANGAN
528629	Kanwil DJPb Provinsi Nusa Tenggara Timur	522112	1.017.000	2.034.000	Belanja barang dibayar dimuka
528654	KPPN Waingapu	522113	1.125.600	1.137.000	Belanja barang dibayar dimuka
528661	KPPN Ruteng	521114	6.564.000	5.974.000	Belanja barang dibayar dimuka
528661	KPPN Ruteng	522113	8.073.450	8.141.750	Belanja barang dibayar dimuka
528718	KPPN Manokwari	511129	126.799.000	139.529.000	Belanja pegawai yang masih harus dibayar
528739	KPPN Fak Fak	511129	72.198.000	78.210.000	Belanja pegawai yang masih harus dibayar
528739	KPPN Fak Fak	522113	1.987.525	1.967.020	Belanja barang dibayar dimuka
528743	KPPN Merauke	521114	480.500	785.000	Belanja barang dibayar dimuka
528743	KPPN Merauke	522113	574.000	577.000	Belanja barang dibayar dimuka
539032	KPPN Batam	511129	164.495.000	164.530.000	Belanja pegawai yang masih harus dibayar
539032	KPPN Batam	521111	457.422.958	456.846.208	Belanja barang dibayar dimuka
539032	KPPN Batam	522111	177.922.704	178.747.289	Belanja barang dibayar dimuka
539032	KPPN Batam	522112	1.005.000	1.305.700	Belanja barang dibayar dimuka
539032	KPPN Batam	522113	6.403.075	6.314.775	Belanja barang dibayar dimuka
539049	KPPN Serui	521114	3.715.400	3.937.500	Belanja barang dibayar dimuka
539049	KPPN Serui	522113	43.200		Belanja barang dibayar dimuka
579330	KPPN Jakarta V	511129	321.970.000	324.042.000	Belanja pegawai yang masih harus dibayar
579330	KPPN Jakarta V	522113	11.692.955	12.519.680	Belanja barang dibayar dimuka
613739	Kanwil DJPb Provinsi Riau	511129	336.619.000	336.654.000	Belanja pegawai yang masih harus dibayar
613739	Kanwil DJPb Provinsi Riau	521114	4.380.750	3.991.750	Belanja barang dibayar dimuka
613743	Kanwil DJPb Provinsi Jambi	522113	18.252.450	21.334.925	Belanja barang dibayar dimuka
613764	Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Tengah	522113	11.779.510	12.286.510	Belanja barang dibayar dimuka
613771	Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Timur	511129	347.308.000	347.382.000	Belanja pegawai yang masih harus dibayar
613771	Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Timur	521114	3.845.035	3.437.804	Belanja barang dibayar dimuka
613771	Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Timur	522113	9.624.422	9.150.118	Belanja barang dibayar dimuka
613785	Kanwil DJPb Provinsi Nusa Tenggara Barat	511129	355.460.000	355.990.000	Belanja pegawai yang masih harus dibayar
613785	Kanwil DJPb Provinsi Nusa Tenggara Barat	522113	3.914.850	4.895.100	Belanja barang dibayar dimuka
613792	Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara	521114	5.439.500	5.271.000	Belanja barang dibayar dimuka
634260	Kanwil DJPb Provinsi Banten	511129	341.456.000	370.756.000	Belanja pegawai yang masih harus dibayar
634409	KPPN Painan	522113	1.276.200	1.141.200	Belanja barang dibayar dimuka
634530	KPPN Lahat	522113	4.713.000	4.390.000	Belanja barang dibayar dimuka
634572	KPPN Liwa	511129	97.493.000	95.854.000	Belanja pegawai yang masih harus dibayar
634792	KPPN Wonosari	511129	130.039.000	130.195.000	Belanja pegawai yang masih harus dibayar
634963	KPPN Tanjung	521111	460.675.796	460.826.162	Belanja barang dibayar dimuka
634963	KPPN Tanjung	522113	4.366.600	4.283.900	Belanja barang dibayar dimuka
634984	KPPN Tanjung Redep	522113	2.871.400	3.498.400	Belanja barang dibayar dimuka
634991	KPPN Nunukan	522113	2.471.333	2.466.233	Belanja barang dibayar dimuka
635045	KPPN Amlapura	522113	6.250.200	6.962.600	Belanja barang dibayar dimuka
635155	KPPN Raha	521114	3.319.890	3.788.480	Belanja barang dibayar dimuka
635155	KPPN Raha	522113	2.330.480	2.464.230	Belanja barang dibayar dimuka
635162	KPPN Kolaka	521114	1.312.500	1.528.500	Belanja barang dibayar dimuka
635197	KPPN Kotamubagu	522113	11.694.000	12.055.000	Belanja barang dibayar dimuka
648741	Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo	522112		1.087.800	Belanja barang dibayar dimuka
648741	Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo	522113	11.232.217	12.204.609	Belanja barang dibayar dimuka

KODE SATKER	NAMA SATKER	KODE AKUN	AKRUAL	KAS	KETERANGAN
648741	Kanwil DJPb Provinsi Gorontalo	522119	1.425.000		Belanja barang dibayar dimuka
648762	KPPN Bangko	522113	2.021.900	2.043.000	Belanja barang dibayar dimuka
648779	KPPN Sekayu	522113	17.767.600	17.194.200	Belanja barang dibayar dimuka
648805	KPPN Sragen	521111	340.890.773	340.879.673	Belanja barang dibayar dimuka
648805	KPPN Sragen	522113	4.356.650	4.461.600	Belanja barang dibayar dimuka
648812	KPPN Purwodadi	521114	2.862.500	3.146.000	Belanja barang dibayar dimuka
648812	KPPN Purwodadi	522113	4.214.250	4.231.050	Belanja barang dibayar dimuka
648826	KPPN Banjarnegara	522113	743.500	744.000	Belanja barang dibayar dimuka
648830	KPPN Sidoarjo	522113	5.617.000	5.348.900	Belanja barang dibayar dimuka
648847	KPPN Selong	522113	471.460	474.960	Belanja barang dibayar dimuka
648851	KPPN Makale	522113	16.767.700	16.663.600	Belanja barang dibayar dimuka
648868	KPPN Sampit	522113	13.773.879	13.623.129	Belanja barang dibayar dimuka
648872	KPPN Peleihari	522113	4.170.200	4.011.200	Belanja barang dibayar dimuka
648889	KPPN Tuban	522113	4.145.560	4.281.040	Belanja barang dibayar dimuka
652449	KPPN Bekasi	511129	188.118.000	180.288.000	Belanja pegawai yang masih harus dibayar
652453	KPPN Atambua	521114	2.170.500	2.034.000	Belanja barang dibayar dimuka
652453	KPPN Atambua	522113	7.252.500	7.041.000	Belanja barang dibayar dimuka
662787	Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara	511129	285.884.000	274.859.000	Belanja pegawai yang masih harus dibayar
662787	Kanwil DJPb Provinsi Maluku Utara	522113	11.397.000	11.404.250	Belanja barang dibayar dimuka
662788	Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Utara	522113	15.428.500	16.339.000	Belanja barang dibayar dimuka
662789	KPPN Tanjung Selor	522113	1.595.800	1.431.000	Belanja barang dibayar dimuka

F.12 Informasi Rekening

Jumlah rekening pemerintah lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan per 31 Desember 2025 adalah 572 rekening dengan total saldo rekening yakni Rp26.441.939.939.035,00.

Rekapitulasi rekening pemerintah lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan menurut wilayah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel F. 11 Rincian Saldo dan Jumlah Rekening 31 Desember 2025 per Wilayah (Rupiah)

No	Nama Kanwil	Saldo 31 Desember 2025	Jumlah Rekening
1	Instansi Pusat	26.441.922.339.035	121
2	Provinsi Aceh	-	16
3	Provinsi Sumatera Utara	-	25
4	Provinsi Sumatera Barat	17.600.000	14
5	Provinsi Riau	-	8
6	Provinsi Jambi	-	12
7	Provinsi Sumatera Selatan	-	12
8	Provinsi Lampung	-	10
9	Provinsi Bengkulu	-	10
10	Provinsi Bangka Belitung	-	6
11	Provinsi Banten	-	8
12	Provinsi DKI Jakarta	-	22
13	Provinsi Jawa Barat	-	26
14	Provinsi Jawa Tengah	-	32
15	Provinsi DIY Yogyakarta	-	8
16	Provinsi Jawa Timur	-	33
17	Provinsi Kalimantan Barat	-	14
18	Provinsi Kalimantan Tengah	-	10
19	Provinsi Kalimantan Selatan	-	13
20	Provinsi Kalimantan Timur	-	8
21	Provinsi Bali	-	8
22	Provinsi Nusa Tenggara Barat	-	10
23	Provinsi Nusa Tenggara Timur	-	15

No	Nama Kanwil	Saldo 31 Desember 2025	Jumlah Rekening
24	Provinsi Sulawesi Selatan	-	20
25	Provinsi Sulawesi Tengah	-	10
26	Provinsi Sulawesi Tenggara	-	10
27	Provinsi Gorontalo	-	6
28	Provinsi Sulawesi Utara	-	10
29	Provinsi Maluku Utara	-	6
30	Provinsi Maluku	-	10
31	Provinsi Papua	-	29
32	Provinsi Kepulauan Riau	-	6
33	Provinsi Sulawesi Barat	-	6
34	Provinsi Papua Barat	-	10
35	Provinsi Kalimantan Utara	-	8
JUMLAH		26.441.939.939.035	572

Rekening pemerintah lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan terdiri dari 4 jenis rekening yakni Rekening Penampungan, Rekening Lainnya, Rekening Bendahara Pengeluaran dan Rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu. Rincian rekening pemerintah lingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan menurut jenisnya dapat dilihat pada grafik berikut.

Tabel F. 12 Rincian Saldo Rekening Menurut Jenis per Wilayah (Rupiah)

No.	Jenis Rekening	Jumlah	Saldo 31 Desember 2025
1	Rekening Penampungan	6	-
2	Rekening Lainnya	316	26.441.922.339.035
3	Rekening Bendahara Pengeluaran	221	17.600.000
4	Rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu	29	-
TOTAL		572	26.441.939.939.035

F.13 Tindak Lanjut Temuan BPK

Daftar temuan dan tindak lanjut temuan BPK sampai dengan Tahun Anggaran 2025 terlampir.

Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah menindaklanjuti 5 temuan BPK untuk Laporan Keuangan Direktorat Jenderal Perbendaharaan

Tabel F. 13 Rekapitulasi Daftar Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK Tahun 2024

No	Tahun	Temuan	Rekomendasi	Hasil Pemantauan Tindak Lanjut			
				Sesuai dengan Rekomendasi	Belum Sesuai dan Dalam Proses Tindak Lanjut	Belum Ditindaklanjuti	Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah
1	2024	5	12	11	1	-	-

F.14 Pengelolaan terkait Penyelesaian Kerugian Negara

Data Kerugian Negara di Lingkungan Kementerian Keuangan sebanyak 16 kasus yang terdiri dari 13 kasus dengan kualitas macet dan 1 kasus dengan kualitas piutang lancar. Saldo kerugian negara sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp29.886314.000,00 Jumlah bagian lancar piutang sampai 31 Desember 2025 yakni Rp5.000.000,00 dan jumlah TP/TGR bagian lancar sebesar Rp25.000,00

Berita Acara Rekonsiliasi Data Kerugian Negara antara Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan terlampir.

F.15 Hibah Langsung

Sampai dengan 31 Desember 2025, Direktorat Jenderal Perbendaharaan menerima hibah langsung dari entitas lain dengan realisasi sebesar Rp 483,059,729,- yang diterima oleh satuan kerja KPPN Kuala Tungkal. Hibah yang diterima merupakan hibah barang milik daerah dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tanjung Barat berupa tanah. Nomor perjanjian hibah 232/011/NH/BKAD/2025.

F.16 Ikhtisar Badan Layanan Umum (BLU)

Terdapat 3 satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) dilingkup Direktorat Jenderal Perbendaharaan yakni:

a. **Badan Pengelola Dan Perkebunan**

Maksud pembentukan BLU-BPDP adalah melakukan penghimpunan, pengelolaan dan pengembangan dana untuk menunjang program kelapa sawit, kelapa, dan kakao yang berkelanjutan sebagai komoditas strategis nasional, sesuai amanat undang-undang yang menerapkan pola pengelolaan keuangan BLU dengan mengedepankan profesionalitas, efisiensi dan efektivitas. Adapun tujuan BLU-BPDP Adalah melakukan pengelolaan Dana Perkebunan, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di bidang Perkebunan, mendorong pengembangan industri hilir, meningkatkan optimalisasi penggunaan hasil perkebunan untuk bahan baku industri, energi terbarukan dan ekspor, meningkatkan dan menjaga stabilitas pendapatan usaha Perkebunan dengan mengoptimalkan harga di tengah fluktuasi harga komoditas dunia.

b. **Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup**

BLU BPD LH didirikan sebagai amanat dari Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2017 bahwa pengelolaan pendanaan lingkungan hidup yang berasal dari dana penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan dan pemulihan lingkungan hidup dan dana amanah/bantuan konservasi dikelola oleh pemerintah pusat melalui mekanisme pola pengelolaan keuangan badan layanan umum. Amanat tersebut lalu diturunkan melalui Peraturan Presiden nomor 77 tahun 2019 bahwa unit organisasi yang melaksanakan pengelolaan dana lingkungan hidup adalah unit organisasi non eselon yang dibentuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum.

Maksud pendirian BLU BPD LH untuk menyelenggarakan pengelolaan dana lingkungan hidup dibidang kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan karbon, jasa lingkungan, industry, transportasi, pertanian, kelauatan dan perikanan, dan bidang lainnya terkait lingkungan hidup.

Tujuan pengelolaan dana lingkungan hidup oleh BLU BPD LH adalah memberikan:

- Layanan kerjasama pengelolaan dana lingkungan hidup yang dapat berasal dari program pengurangan emisi yang berasal dari negara/lembaga donor sesuai dengan mandat yang dituangkan dalam perjanjian/kontrak; dan
- Layanan Pembiayaan Usaha Kehutanan dan Investasi Lingkungan

c. Pusat Investasi Pemerintah

Pusat Investasi Pemerintah yang pada awal didirikan ditujukan untuk menjalankan tugas untuk mengelola investasi pemerintah dan mengemban misi untuk menstimulasi pertumbuhan ekonomi nasional melalui investasi di berbagai sektor strategis yang memberikan imbal hasil optimal dengan risiko yang terukur.

PIP bermaksud menyelenggarakan program pembiayaan Ultra Mikro. Adapun Tujuan Pembiayaan Ultra Mikro adalah:

- Menyediakan fasilitas pembiayaan yang ringan dan terjangkau bagi usaha mikro;
- Meningkatkan jumlah wirausaha yang terfasilitasi oleh pemerintah;
- Meningkatkan nilai keekonomian usaha mikro;
- Menynergikan program ekonomi rakyat.

Berikut iktisar laporan keuangan Badan Layanan Umum Tahun 2025.

Tabel F. 14 Ikhtisar Badan Layanan Umum

No.	Kode Satker	Nama Satker	Aset	Kewajiban	Pendapatan Total	Pendapatan BLU	Belanja Total	Belanja BLU
1	409999	Badan Pengelola Dana Perkebunan	20.868.939.614.388	5.293.038.021.932	33.237.094.153.758	33.237.094.153.758	49.822.564.405.090	49.822.564.405.090
2	439039	Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup	15.396.864.604.715	12.445.292.482.095	1.866.326.531.986	1.866.326.531.986	956.150.314.226	956.150.314.226
3	440781	Pusat Investasi Pemerintah	12.627.098.185.786	10.000.000.000.000	563.554.573.074	563.554.573.074	88.627.856.740	88.627.856.740